

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS
NASIONAL**



**KONSTRUKSI NILAI KEBANGSAAN
DALAM SEJARAH NAHDLATUL WATHAN**

Tahun Ke 1 dari Rencana 2 Tahun

Tim Pengusul

Dr. H. Khirjan Nahdi, M.Hum.

(Ketua) NIDN.0804026801

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

(Anggota 1) NIDN. 0829116801

Dr. Aswasulasikin, M.Pd.

(Anggota 2) NIDN. 0831127808

Dr. Muh. Fahrurrozi, MM.

(Anggota 3)

NIDN.0801068403

**UNIVERSITAS HAMZANWADI
SEPTEMBER 2018**

**Dibiayai Oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 0661/K8/KM/2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : KHIRJAN NAHDI,
Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi
NIDN : 0804026801
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Nomor HP : 08175707485
Alamat surel (e-mail) : nahdi_nw@yahoo.co.id; khirjan.nw@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Ir SITTI ROHMI DJALILAH M.Pd
NIDN : 0829116801
Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr ASWASULASTIKIN S.Pd, M.Pd
NIDN : 0831127808
Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

Anggota (3)

Nama Lengkap : Dr MUH. FAHRURROZI M.M, S.E.
NIDN : 0801068403
Perguruan Tinggi : Universitas Hamzanwadi

Institusi Mitra (jika ada)

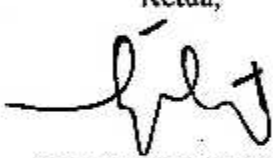
Nama Institusi Mitra : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 5 Selong Lombok Timur, Tlp. (0376) 22779

Penanggung Jawab : H. Sudirman, S.Sos.
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke I dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 90,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 90,000,000

Mengetahui,
Dekan FPBSH Universitas Hamzanwadi


(MOEDITO, Ph.D.)
NIP/NIK 3303121697

Lombok Timur, 12 - 11 - 2018
Ketua,


(KHIRJAN NAHDI,)
NIP/NIK 196812312002121005

Menyetujui,
Kepala P3MP Universitas Hamzanwadi


(ABDURASYAD, M.Pd.)
NIP/NIK 3303121727

RINGKASAN

Semua pihak harus segera mengembalikan kesadaran bahwa kondisi berkebangsaan Indonesia dewasa ini berada dalam gangguan dan tantangan. Akibat globalisasi, dengan komparasi yang membandingkan konteks lokal-nasional dengan konteks lain (bangsa dan peradaban lain) terjadi kealfaan terhadap entitas kebihnekaan, mengutamakan kepentingan individu-kelompok dibanding kepentingan bersama, dan berbagai akibat lain. Diyakini bahwa semua akibat tersebut berpengaruh terhadap harmoni berkebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang ber-Pancasila, ber-Bhineka Tunggal Ika, ber-NKRI, dan berdasar pada UUD 1945. Kesadaran dan keyakinan terganggunya kondisi berkebangsaan harus diikuti dengan tindakan proaktif semua pihak sesuai kapasitas masing-masing sebelum kondisi dimaksud menjadi semakin kompleks sehingga sulit diatasi. Konstruksi kembali entitas nilai kebangsaan yang diinisiasi, diformulasi dan dikembangkan melalui khazanah lokal sebagaimana konteks sejarah Nahdlatul Wathan sangat strategis dilakukan melalui proses kajian dan upaya transformasinya. Karena itu, bagaimana konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sejak berdiri, saat ini, dan masa depan, strategis untuk dijawab melalui kajian ini. Konstruksi dimaksud menyangkut kemerdekaan, berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Jawaban atas masalah kajian ini akan menjadi *blue print* yang strategis dalam mengembalikan kesadaran dan tindakan kebangsaan sesuai cita-cita kemerdekaan. Kajian ini berujuan: 1) terpetakannya konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan; 2) terumuskannya *blue print* rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan. Upaya penemuan data dan analisis kajian ini digunakan metode sejarah dan hermeneutika (*hermeneutics* dan *verstehen*) dengan pendekatan teks, konteks, dan hubungan teks dengan masyarakat. Luaran penting kajian ini adalah: 1) peta konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra

nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan; 2) rumusan *blueprint* rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan.

Melalui metode dan analisis data diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: 1) Konstruksi nilai kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW muncul pada setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, yakni fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Lama (1947-1965); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998); dan fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang). Fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946) bersamaan dengan lahirnya NW (Gerakan/perjuangan/Pergerakan Tanah Air) dengan berbagai *inner values* dan *collectivity values*-nya didominasi oleh matra kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945, “*Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu....*” matra ini sangat beralasan mengingat fase dan masa ini, Indonesia belum merdeka. Fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Lama (1947-1965) didominasi oleh matra kebangsaan sila-sila dalam Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998) didominasi oleh matra kebangsaan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang), matra kebangsaan penguatan kembali nilai kebangsaan NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi merupakan kontinuitas sejarah. Hamzanwadi bertanggungjawab meletakkan tonggak, menransmisikannya sebagai warisan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan *knowledge content* yang harus diwariskan melalui tahapan alih pengetahuan dan nilai (*transfer*), lalu identifikasi nilai (*identification*), dan hasilnya menjadi identitas sejarah (*admission*), yakni sejarah bangsanya. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi adalah sekumpulan nilai dasar yang menjadi acuan yang implementatif dan aplikatif dalam hidup berkebangsaan sehingga nilai tersebut menjadi dialektis. Untuk maksud ini, Hamzanwadi mengagendakan tindakan dan proses *influence, implementation, dissemination, dan socialization*. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan khazanah lokal yang memiliki matra nasional, sejajar dengan matra kebangsaan Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tungga Ika. Nilai kebangsaan Indonesia memiliki paralelisme waktu sejarah dengan sejarah NW, sejak tahun 1900-an, diawali dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan konteks lahirnya NW dengan *inner values* dan *collective values*-nya. Fase-fase selanjutnya, NW menjadi bagian strategis dalam mengisi kemerdekaan dalam rangka kebangsaan Indonesia.

PRAKATA

Laporan akhir penelitian ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban kinerja penelitian tahun pertama (2018) untuk masuk ke proses tahun kedua. Sesuai dengan usulan sebelumnya, capaian tahun ke-1 (2018) disampaikan dalam bentuk: 1) *Prototype* dokumen kebijakan Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan, yang *feasible* diimplementasikan tahun ke-2 (2019). Hingga saat ini, *prototype* kebijakan terkait kelayakan akademik sedang disiapkan Bersama mitra; 2) Draft buku monograf dari hasil kajian ini, saat ini sedang diusulkan ISBN kepada Perpustakaan Nasional RI (bukti terlampir); 3) Artikel laporan akhir ini sudah di presentasikan pada *The 4th Hamzanwadi International Conference on Education* tanggal 3-4 November 2018. Selain itu, artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sudah di *submitted* ke *Journal of Indonesian Islam (JIIS)* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; dan 4) Monitoring dan evaluasi eksternal sudah dilaksanakan tanggal 12 November 2018 di Universitas Hamzanwadi

Capaian kinerja penelitian hingga saat ini dirasakan memberi pengalaman berharga kepada tim peneliti sesuai tujuan dan manfaat program ini sebagaimana dalam Pedoman Penelitian dan PkM (XI). Atas capaian ini, tim peneliti patut bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang tiada terhingga sehingga dapat melaksanakan penelitian ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Peneliti dan tim mewakili Universitas Hamzanwadi menyampaikan terima kasih atas fasilitas penelitian yang disiapkan oleh Kementerian Ristek-Dikti melalui DRPM. Terimakasih juga disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih kepada tim peneliti dan pembantu lapangan yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan kajian ini. Terima kasih juga kepada para sumber data yang bersedia meluangkan waktu berdiskusi untuk kebutuhan penelitian ini. Tidak lupa terima kasih kepada P3MP Universitas Hamzanwadi yang menyediakan informasi dan layanan kebutuhan kajian ini sejak proposal hingga laporan akhir ini. Terima kasih.

Pancor, Nopember, 2018

Ketua Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT.....	9
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	10
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	13
BAB VI. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	32
BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN.....	33
DAFTAR RUJUKAN.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Proses Penelitian.....	34
Tabel Rencana Tahapan Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Jalan Penelitian.....	8
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Monograf**
- Lampiran 2 Dokumen Kebijakan**
- Lampiran 3 Artikel Jurnal dan Bukti Submitted**
- Lampiran 4 Artikel presentasi seminar Internasional dan Sertifikat**

BAB 1 PENDAHULUAN

Konsep kebangsaan dipahami sebagai kesadaran individu dan kolektif tentang bangsa menyangkut kemerdekaan, ideologi, kesejahteraan, persatuan, kebudayaan, dan aspek kecerdasan lainnya (Muladi, 2006). Dewasa ini, pemahaman konsep yang mendasari tindakan berkebangsaan dalam konteks keindonesiaan mengalami berbagai tantangan. Tanpa bermaksud mereduksi konteks yang terjadi dapat dikemukakan beberapa fakta: pengingkaran atas hak dasar berketuhanan dan berkemanusiaan; menguatnya identitas individual dan menafikan kebhinekaan; kecenderungan menguasai sumber daya secara individual dengan mengabaikan kepentingan massal, lambat laun akan mengganggu cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Friedman dalam buku *The World is Flat*, yang mengatakan bahwa abad ke-21 telah mengubah wajah dunia bukan lagi dunia yang bulat melainkan dunia yang rata (Tilaar, 2005), tampak tidak berlebihan dengan realitas terbuka dan luasnya berbagai akses yang menjelma menjadi budaya global. Instrumen bahasa dan arus modal global, secara perlahan namun pasti telah mengaburkan identitas asli dalam konteks Indonesia sebagai suatu bangsa. Sebagai elemen bangsa yang sadar akan kondisi ini, tidaklah mungkin akan larut dalam kondisi kontekstual tersebut dengan hanya meratapinya tanpa proaktif dalam mengembalikan kesadaran dan tindakan kolektif dalam memulihkan keadaan dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu hal strategis dilakukan adalah menemukan konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah *Nahdlatul Wathan* (disingkat NW) sebagai khazanah lokal yang memiliki matra nasional dan memenuhi kebutuhan universal masyarakat Indonesia dalam memahami konsep dan tindakan kebangsaannya, karena kelahiran organisasi sebagai gerakan, dinamika organisasi dan gerakan, hingga survivalitas dewasa ini penuh dengan tidak lepas dari entitas berkebangsaan melalui ber-Pancasila, ber-Bhineka Tunggal Ika, ber-NKRI, yang berdasarkan UUD 1945.

NW sebagai satu organisasi massa Islam, lahir di Lombok Nusa Tenggara Barat, Tahun 1934, lahir dalam kondisi bangsa belum mengenal indentitas Indonesia, sehingga ide kelahirannya tidak lepas dari kesadaran dan keinginan untuk merdeka. Pada fase awal berdirinya, NW sangat kental dengan jiwa dan perjuangan kemerdekaan. Fase selanjutnya di era kemerdekaan, melalui instrumen pendidikan (pengetahuan Islam dan umum), dakwah, sosial, dan pengembangan ekonomi, NW tetap konsisten membangun kesadaran dan praktek kebangsaan Indonesia, hingga era globalisasi dewasa ini. Upaya-upaya tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk konstruksi nilai kebangsaan yang komprehensif dalam perjalanan

sejarah menyangkut filosofi nilai dan strategi pemassalan sehingga menjadi milik kolektif yang disadari dan terimplementasi. Konstruksi nilai kebangsaan komprehensif dalam perjalanan sejarah dalam kajian ini dipahami sebagai perumusan yang memanjang dan khusus sebagai tradisi sejarah serta pemilahan berdasarkan aspek-aspek kebangsaan: kemerdekaan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem pertahanan-keamanan melalui *hermeneutics* dan *verstehen* (menafsir dan memahami) gagasan dan tindakan yang tertuang dalam berbagai artefak sejarah NW hingga saat ini (Djoko Suryo, 2008). Masalah penting yang dijawab dalam kajian ini: bagaimana konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sejak berdiri, saat ini, dan masa depan? Masalah ini terkait dengan konstruksi nilai kebangsaan menyangkut kemerdekaan, berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Jawaban atas masalah kajian ini akan menjadi *blue print* yang strategis dalam mengembalikan kesadaran dan tindakan kebangsaan sesuai cita-cita kemerdekaan. Kajian ini berujuan: 1) terpetakannya konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan; 2) terumuskannya *blue print* rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan. Hasil yang diperoleh melalui tujuan penelitian ini bermanfaat secara strategis dalam memulihkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan komitmen kolektif mengimplementasikannya melalui warisan khazanah budaya lokal menuju cita-cita luhur berkebangsaan Indonesia. Beberapa argumentasi yang menjadikan proses dan hasil kajian ini menjadi sangat urgen: 1) kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini sedang dalam ujian serius, ditandai dengan hilangnya *trust* sesama anak bangsa, kecenderungan saling melemahkan antarkelompok dan golongan, dan kecenderungan menguasai sumber daya dengan mengabaikan kepentingan bersama; 2) objek kajian ini adalah khazanah lokal yang memiliki matra nasional sehingga mudah ditransformasikan dalam konteks lokal dalam upaya mewujudkan cita-cita kebangsaan Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya manfaat dan urgensi hasil kajian ini, luaran penting kajian ini adalah: 1) peta konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan (Tahun ke-1); 2) rumusan *blueprint* rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan (tahun ke-2); pilot transformasi konstruksi nilai kebangsaan berdasarkan *blue print* (buku teks/modul, panduan teknis, dan indikator) sebagai proses rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan (Tahun ke-3); buku teks/modul, panduan teknis, dan indikator ber-ISBN, HKI (Hak Cipta),

dan Publikasi Internasional (Tahun ke-3). Sebagai luaran tambahan, artikel kajian ini akan dipresentasikan dalam temu ilmiah dan prosiding nasional, selengkapnya terlampir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Wacana kebangsaan dalam perspektif sejarah suatu bangsa menjadi relasi kausalitas yang beragam. Sejarah Indonesia mencatat kemunculan ide-ide kebangsaan dimulai sejak tiga dasawarsa pertama abad XX. Ricklefs (1998) menyebutnya sebagai “Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional”, yang ditandai dengan berbagai perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama. Kesadaran yang pertama muncul adalah tentang suasana keterjajahan, dan pada saat yang sama munculnya gerakan-gerakan anti penjajahan. Beberapa catatan sejarah sebagai kelanjutan perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama dengan munculnya ide-ide baru mengenai organisasi yang berpengaruh pada ide tentang kepemimpinan baru, definisi-definisi baru identitas yang melahirkan analisis baru tentang lingkungan keberagamaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Perspektif komparatif sejarah kebangsaan, Lewis (2009) mencatat kesadaran kebangsaan suatu bangsa memiliki relasi kausal yang berbeda. Dalam hal fungsi dan tujuan, Lewis membagi catatan sejarah dalam tiga klasifikasi: *remembred history*, *recovered history*, dan *invented history*. Merujuk Bhaskar (Salim, 2002), sejarah Indonesia mengalami tiga fase penting: *the genuine* (awal) (pra dan awal kemerdekaan); *the change* (perubahan) (akhir orde lama hingga akhir orde baru); dan *the development* (pengembangan) (fase kedua) (akhir orde baru, orde reformasi hingga saat ini). Berdasarkan pandangan Lewis dan Bhaskar, kebangsaan dalam sejarah Indonesia dipahami sebagai proses pembentukan pada fase awal (pra kemerdekaan) yang melahirkan ide dan gagasan merdeka, keberagamaan, politik, sosial, dan budaya. Secara performatif, implementasi nilai-nilai kebangsaan dikenal dengan wawasan kebangsaan mengalami masa kegemilangan pada fase perubahan, walaupun dirasakan penuh dengan kesemuan dan tendensi pelanggaran kekuasaan rezim orde baru. Pada fase pengembangan, dengan berubahnya sistem demokrasi dan ketatanegaraan, dan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi dirasakan kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan mengalami krisis. Karena itu, proses pengungkapan kembali nilai kebangsaan Indonesia dan mereformulasi implementasinya merupakan agenda *recovered history* dan *invented history* sebagaimana dikemukakan Lewis. Dalam sebuah forum Internasional tentang pendidikan karakter, Nahdi (2014) menyebutnya sebagai praktek “melupakan dan tidak mengapresiasi sejarah bangsa”. Proses yang akan dilakukan adalah mengingat kembali peta konstruksi nilai kebangsaan yang bersumber dari khazanah lokal dan bermatra nasional, dipetakan kembali dan mereformulasi implementasinya.

Berbagai perbedaan kausal yang melahirkan ide dan implementasi nilai kebangsaan menggambarkan dinamika relasionalnya secara unik sesuai pengalaman berkebangsaan masing-masing peradaban bangsa. Bangsa China, sebagaimana dideskripsikan Zheng Wang (2008) tentang China di era 80-an sebagai bangsa yang korup, anti demokrasi, dan pemimpin yang dikator. Puncak dari semua kondisi berbangsa tersebut adalah tragedi Tiananment. Melalui kajiannya, Zheng Wang merumuskan suatu model pendidikan sejarah tentang ideologi kebangsaan China dengan mengenalkan kembali situs-situs sejarah bangsa China, seperti keunggulan dalam perang, mitologi, dan sikap heroik bangsanya dalam membela kebenaran yang diyakini. Dengan mengutip Pennebaker (1997), Zheng Wang meyakini bahwa memori kolektif tentang nasionalisme, tidak saling mencurigai, dan menghargai perbedaan menjadi akar kuat atmosfer kecintaan pada bangsa dan kebangsaan. Dengan pernyataan yang bersifat manasuka, Zheng Wang menyimpulkan, jika hendak membentuk jiwa nasionalisme dan kebangsaan secara alamiah harus dilakukan dengan mempengaruhi pikiran dan emosi kolektif setiap waktu dan tempat dalam konteks pendidikan. Media komunikasi yang berbasis teknologi, seperti film, radio, dan televisi dapat mengakselerasi proses tersebut.

Lain China, beda pula Amerika dalam memahami kebutuhan nilai kebangsaan bagi rakyat dan bangsanya. Jika China memandang nilai dan implementasi nilai kebangsaan berdasarkan kebutuhan demokrasi, keadilan, dan transparansi yang diinspirasi dari pengalaman buruk bangsanya secara internal, bangsa Amerika memandang kebangsaan berdasarkan nilai-nilai universal demokrasi, penegakan hukum, pasar bebas, dan institusi atau pembagian kekuasaan. Minxin Pei (1998) dalam *The Paradoxes of American Nationalism* menggambarkan kondisi internal Amerika sebagai negara tujuan urbanisasi para imigran dari berbagai belahan bumi. Untuk menyatukan pandangan tentang bangsa Amerika, nilai kebangsaan tidak mungkin direduksi melalui keunikan masing-masing nilai milik para imigran, melainkan harus melebur semuanya menjadi nilai bangsa Amerika dalam kebijakan *melting pot*. Presiden George Walker Bush pernah mengatakan bahwa nilai kebangsaan bagi Amerika bukanlah suatu jalan: bukan jalan demokrasi, bukan jalan hukum, bukan jalan birokrasi, dan bukan jalan pasar bebas, tetapi semuanya merupakan suatu keyakinan individu yang menjelma menjadi keyakinan kolektif. Untuk terciptanya kondisi tersebut, semua bangsa Amerika harus memperjuangkannya sebagai pandangan masa depan, walaupun dengan perang sekalipun. Kondisinya menjadi sangat berbeda dengan realitas kebangsaan di Indonesia yang sejak sebelum bernama Indonesia sudah berbeda satu sama lain dalam berbagai hal: agama, budaya, etnik, adat istiadat, dan bahasa. Ketika menjadikan suatu

identitas kebangsaan Indonesia, diperlukan proses sublimasi nilai dasar yang bersumber dari berbagai entitas berbeda untuk ditransformasikan dalam entitas kebangsaan yang dimiliki bersama. Proses ini bermakna bahwa secara substantif pertimbangan lokalitas, geografi, etnisitas, dan agama yang berbeda menjadi acuan dalam membentuk nilai dan implementasi nilai kebangsaan yang meng-Indonesia. Proses institusionalisasi dan strukturisasi nilai dan implementasi nilai kebangsaan menjadi ranah kebijakan dan birokrasi.

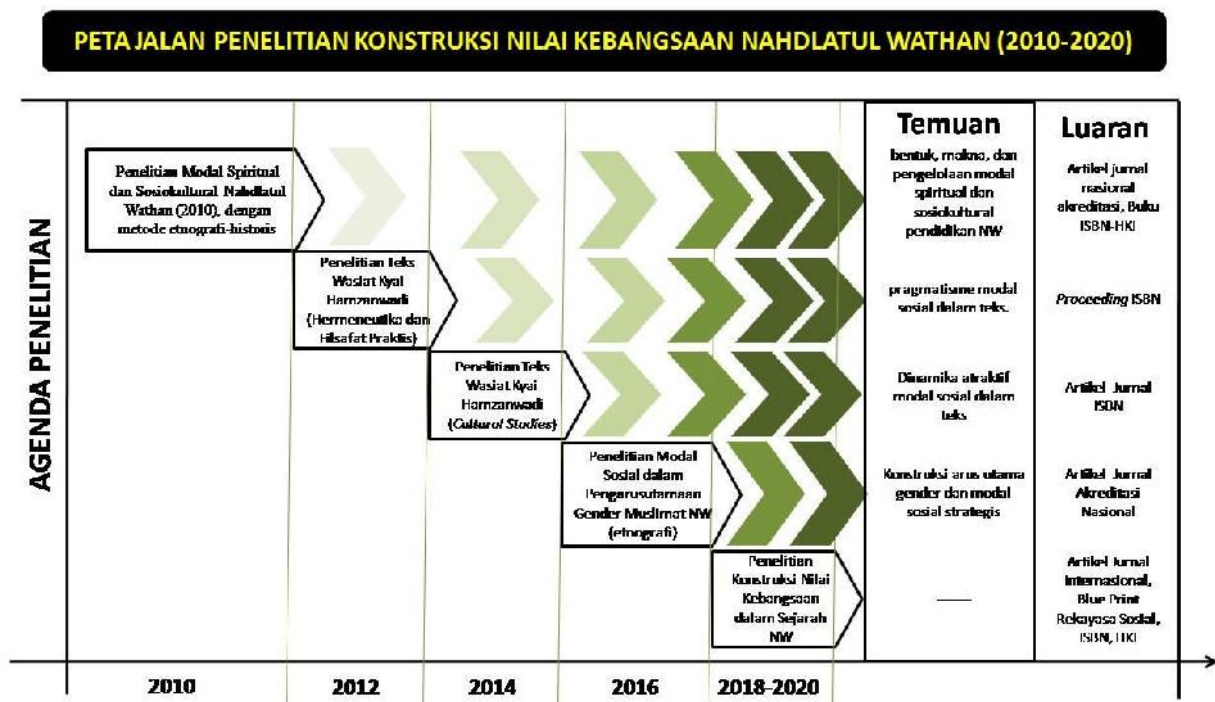
Perbandingan antara peta konstruksi nilai dan implementasi nilai kebangsaan bangsa China, Amerika, dan Indonesia menunjukkan bahwa kondisi Indonesia jauh lebih kompleks dibanding keduanya. Sebagai negara yang tidak pernah mengalami kolonialisme, China relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaannya. Amerika, walaupun pernah dijajah dan sebagai negara kumpulan para imigran, relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaan, serta melakukan penekanan jika terjadi persoalan dalam implementasinya. Indonesia, selain pernah menjadi negara jajahan, juga menjadi bangsa yang penuh dengan berbagai perbedaan. Pengalaman menjadi bangsa terjajah melahirkan nilai kebangsaan yang merdeka, dan nilai kebangsaan yang meng-Indonesia harus mengakomodasi setiap perbedaan yang menjadi keunikannya. Kondisi kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah dan bangsa yang unik dengan berbagai perbedaan memiliki dua agenda strategis, sebagaimana digambarkan John W Myers (1983); kebangsaan mendahulukan kepentingan bangsa, sedangkan patriotisme menempatkan cita-cita bangsa. Konteks keindonesiaan saat ini membutuhkan keduanya. Sikap kebangsaan yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa dewasa ini dan masa depan haruslah memiliki sikap patriotik dengan menyadari dan memahami cita-cita bangsa di masa lalu sebagai bangsa terjajah, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sikap patriotisme, setiap anak bangsa memiliki penghargaan atas masa lalu bangsanya dan meneladaninya terus menerus.

Harus disadari bahwa sikap kebangsaan akan mengalami persoalan dalam dinamika masyarakat suatu bangsa. Dinamika masyarakat tradisional menuju kosmopolitan berdampak pada konstruksi nilai kebangsaan, sebagaimana gambaran masyarakat tradisional Eropa menjadi kosmopolitan pasca Perang Dunia dan Revolusi Perancis di gambarkan Anthony D. Smith (2009) dalam *Cosmopolitanism and Nationalism*. Smith menggambarkan tiga kelompok kosmopolitan Eropa: individualis, multikultural, dan statis. *Pertama*, kelompok individualis mengutamakan hal-hal mendasar tentang hak asasi, seperti pengakuan atas rasionalitas, kehormatan, nilai moral, kebebasan, dan rasa aman. Kelima hal dimaksud tidak terikat oleh kewarganegaraan seseorang, kelas sosial, jender, ras, dan suku/etnik. *Kedua*, kelompok multikultural meyakini bahwa persoalan ras dan suku/etnik tidak bisa

disederhanakan atau direduksi atas nama apa pun dan dengan alasan apa pun dalam konteks berkebangsaan. Keyakinan ini lahir dari realitas bahwa ras dan etnik berbeda sejak pertama keberadaannya. Dalam konteks ini, konsep kebangsaan lahir menawarkan katalis baru sebagai identitas bersama yang tidak menafikan identitas asli masing-masing ras dan etnik. *Ketiga*, kelompok statis yakni kelompok yang relatif tidak terpengaruh dengan dinamika yang berkembang, mereka cukup bertahan dan membatasi diri pada nilai-nilai kebangsaan lama mereka dengan dipandu oleh sistem hukum yang ketat. Melalui ketiga kelompok kosmopolit yang digambarkan Smith, khusus pada multikultural sebagaimana kasus Indonesia, terlebih pada dinamika global dewasa ini, penting menempatkan budaya-budaya lokal sebagai khazanah ras dan etnik yang berbeda-beda sebagai suatu kekuatan, sebagai basis nilai, sebagai pemandu gerak peradaban, dan harus memiliki perekat kokoh satu sama lain melalui penciptaan entitas universal. Seth Jordan (2017) dalam review terhadap *Architecture as Peacework* (Rudolph Steiner), ditulis dalam *When Nationalism Rears Its Ugly Head* menjelaskan pentingnya pandangan konsep kemanusiaan yang satu sama lain saling membutuhkan, tidak ada yang berdiri sendiri, dan budaya universal harus dijadikan perekat dan fondasi nilai bersama dalam konteks kebangsaan. Tidak disangkal bahwa Nahdlatul Wathan sebagai lembaga yang lahir dari khazanah lokal bermatra nasional menawarkan dan mengembangkan nilai universal dalam berkebangsaan terkait kemerdekaan, keberagaman, instrumen organisasi, ide-ide modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Pendiri Nahdlatul Wathan paham bahwa kebutuhan akan kemerdekaan, agama, organisasi, modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi tidak terikat karena beraneka suku bangsa di Indonesia.

Empat penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan kajian ini dalam hal objek, *setting*, metodologi, dan teori. *Pertama*, penelitian Modal Spiritual dan Sosiokultural Nahdlatul Wathan (2010), dengan metode etnografi-historis. Melalui penelitian ini ditemukan bentuk, makna, dan pengelolaan modal spiritual dan sosiokultural pendidikan Nahdlatul Wathan. Artikel terbit dalam jurnal *Islamic Studies Islamica* UIN Sunan Ampel Surabaya Volume VII/2/2013, dan edisi buku ilmiah populer memperoleh HKI tahun 2015. *Kedua*, penelitian Teks Wasiat Kyai Hamzanwadi (2012), dengan metode Hermeneutika dan Filsafat Praktis. Melalui kajian ini ditemukan pragmatisme modal sosial dalam teks. Artikel yang dipresentasikan dalam temu ilmiah internasional terbit dalam *proceeding* Seminar Internasional: Menimang Bahasa, membangun Bangsa FKIP Universitas Mataram, tahun 2012. *Ketiga*, penelitian Teks Wasiat Kyai Hamzanwadi (2014), dengan metode *Cultural Studies*. Melalui kajian ini ditemukan dinamika atraktif modal sosial dalam teks. Artikel terbit

dalam Jurnal *SeBaSa* FKIP Universitas Hamzanwadi, Volume II/1/2014. *Keempat*, penelitian Modal Sosial dalam Pengarusutamaan Gender Muslimat Nahdlatul Wathan (2016), dengan metode etnografi. Melalui penelitian ini ditemukan konstruksi arus utama gender dan modal sosial strategis di kalangan Muslimat Nahdlatul wathan. Artikel penelitian ini terbit dalam Jurnal Review Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 06, No. 01 Juni 2016. Keempat penelitian sebelumnya dan rencana penelitian ini tampak pada *roadmap* berikut:



Penelitian pertama fokus pada keberadaan modal spiritual dan sosiokultural pada dunia pendidikan, termasuk di dalamnya nilai kebangsaan dipandu dengan berbagai modal strategis. Penelitian kedua dan ketiga fokus pada pragmatisme modal sosial dan pola atraksinya secara bolak-balik dalam dinamika sejarah Nahdlatul Wathan. Penelitian keempat fokus pada konstruksi modal sosial dalam pengarusutamaan gender Muslimat Nahdlatul Wathan. Penelitian ini memiliki piranti dengan keempat penelitian sebelumnya, yakni memiliki nuansa nilai kebangsaan sebagai entitas yang diwariskan dalam dinamika sejarah berkebangsaan melalui Nahdlatul Wathan melalui penemuan, perumusan peta konstruksi nilai kebangsaan dan pola pewarisannya. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan data yang komprehensif tentang nilai kebangsaan pada tiga fase sejarah menyangkut ide kemerdekaan, organisasi, pendidikan, agama, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Terpetakannya konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan;
- b. Terumuskannya *blue print* rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh melalui tujuan penelitian ini bermanfaat secara strategis dalam memulihkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan komitmen kolektif mengimplementasikannya melalui warisan khazanah budaya lokal menuju cita-cita luhur berkebangsaan Indonesia.

BAB 4 METODE PENELITIAN

Nilai kebangsaan yang dimaksud dalam penelitian ini dipahami sebagai pemikiran Kyai Hamzanwadi sebagai pendiri Nahdlatul Wathan tentang kebangsaan Indonesia. Temuan dan analisis data digunakan metode sejarah dan hermeneutika (*hermeneutics* dan *verstehen*) dengan pendekatan teks, konteks, dan hubungan teks dengan masyarakat (Kuntowijoyo, 2003). Tradisi hermeneutika dalam analisis teks (tek sejarah) sebagaimana Ankersmit (1987), bahwa upaya penafsiran teks masa lampau dan berupaya menerangkan tindakan para pelaku sejarah. Secara teknis, pemahaman teks dilakukan dengan menelusuri dan menjelaskan pesan dan pengertian dasar teks dengan mencoba memahami praktek dan kondisi kesejarahan (Gadamer, 1987). Keseluruhan proses tampak dalam matriks di bawah ini.

Tahun I					
Metode dan Pendekatan	Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	Analisis Data	Lokasi	Luaran dan Indikator	Pen. Jwb.
Metode dan Pendekatan Sejarah dan Hermeneutika Teks dalam 3 fase sejarah	Evidensi teks sejarah dan artefak, yakni menampakkan secara jelas teks dan artefak melalui penelusuran situs dan interview	Menafsir dan memahami teks dan artefak	Situs sejarah	Laporan peta konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai modal budaya lokal yang memiliki matra nasional sesuai aspek-aspek kebangsaan	Ketua dan anggota
Metode dan Pendekatan Sejarah dan Hermeneutika Konteks Sejarah dalam 3 fase sejarah	Evidensi konteks sejarah yakni menampakkan secara jelas konteks melalui penelusuran situs dan interview	Menafsir dan memahami konteks			
Metode dan Pendekatan Sejarah dan Hermeneutika dalam Hubungan Sejarah dengan Masyarakat dalam 3 fase sejarah	Evidensi hubungan dengan masyarakat yakni menampakkan secara jelas hubungan dengan masyarakat melalui penelusuran situs dan interview	Menafsir dan memahami hubungan dengan masyarakat			
Publikasi Tahun 1				Ada publikasi	

Tahun II				
Kegiatan	Metode	Sumber	Indikator	Pen. Jwb.
Menyusun rumusan <i>blueprint</i> rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan	Merumuskan sistematika <i>Blueprint</i> Menghimpun Substansi <i>Blueprint</i> dalam <i>Sistematika</i>	Laporan temuan penelitian tahun I	Ada dokumen <i>blueprint</i>	Ketua dan Anggota
Publikasi Tahun 2			Ada publikasi	

Tahun III				
Kegiatan	Metode	Luaran	Indikator	Pen. Jwb.
<i>Piloting</i> transformasi konstruksi nilai kebangsaan	Deseminasi, sosialisasi dalam	Proses dan hasil <i>piloting</i>	Ada laporan proses dan hasil	Ketua dan anggota

berdasarkan <i>blueprint</i> (buku teks/modul, panduan teknis, dan indikator) sebagai proses rekayasa sosial kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan	variasi kelompok			
Pendokumentasian <i>blueprint</i> dalam bentuk buku teks/modul, panduan teknis, dan indikator ber-ISBN, HKI (Hak Cipta),	Penulisan buku, pendaftaran ISBN dan HKI	Dokumen <i>blueprint</i> ber-ISBN dan HKI	Ada dokumen	Ketua dan anggota
Publikasi Internasional	<i>Submitted</i> ke Jurnal Internasional	Publikasi internasional	Ada jurnal internasional yang memuat artikel hasil penelitian ini	Ketua dan anggota
Presentasi dalam temu ilmiah dan prosiding nasional	Submitted paper dan presentasi	Presentasi dan prosiding	Ada undangan, makalah, sertifikat keikutsertaan	Ketua dan anggota

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. HASIL PENELITIAN

A. KONSTRUKSI NILAI KEBANGSAAN DALAM SEJARAH NW (Teks-Konteks-Masyarakat dan Matra Kebangsaan)

Nilai kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan adalah sejarah pemikiran Pendiri Organisasi Nahdlatul Wathan (disingkat NW), yakni Tuan Guru Kyai Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (dalam laporan ini disebut Hamzanwadi). Pemikiran kebangsaan lahir bersamaan dengan lahirnya pemikiran keislaman, jelasnya tegaknya ajaran Islam dalam konteks lokal Lombok NTB sebagai bagian dari NKRI. Pemikiran itu kongkretnya, Islam sebagai agama membutuhkan konteks yang aman, nyaman, merdeka, dan berdaulat sebagai sebuah bangsa. Karenanya, dalam pemikiran Hamzanwadi, kebangsaan dan keislaman adalah dua entitas sejajar, satu sebagai ajaran, satunya lagi sebagai wadah atau konteks yang menjamin ajaran Islam berjalan dengan baik. Stromberg (1968) menyebutnya sebagai *history of thought, history of idea*, atau *intellectual history*, di mana pemikiran kebangsaan melahirkan tindakan kebangsaan, sekaligus pemikiran keislaman melahirkan tindakan keislaman yang diperjuangkan bersamaan oleh Hamzanwadi, walaupun selanjutnya pemikiran dan tindakan keislaman tidak dibahas karena tidak menjadi scope kajian ini. Pemikiran dalam maksud ini tidak dipisahkan dan dimaknai sama dengan kesadaran, karena memang pemikiran sebagai sebagai khazanah individual Hamzanwadi ditawarkan sebagai instrumen kesadaran tentang kebangsaan yang secara kontekstual sedang terjajah, dan memunculkan kesadaran tentang semangat merdeka sebagai bangsa. Sebagai pemikiran dan tindakan kebangsaan dalam sejarah NW, bahasan kajian ini secara atraktif berkaitan dengan teks, konteks, dan pengaruh pikiran dan tindakan kebangsaan dalam fase sejarah NW dengan menarik piranti nilai kebangsaan yang dimaksud dalam konteks kebangsaan Indonesia.

1. Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan (1934-1946)

a. Lahirnya NW dan NWDI

Fase ini ditandai dengan lahirnya NW, dari bahasa Arab *nahdlah* berarti perjuangan, kebangkitan, atau pergerakan, dan *wathaniah*, berarti bangsa, tanah air, atau negara. Sebagai teks, kata NW merupakan diksi dengan nuansa makna yang komprehensif. Kebangkitan, perjuangan, pergerakan berkaitan dengan integrasi, simultansi, dan konsistensi tindakan berdasarkan pemikiran tentang *wathaniah* 'bangsa, tanah air, negara, yang ketika teks ini dimunculkan, konteks Indonesia belum lahir sebagai bangsa berdaulat, masih sebagai tanah

air terjajah, dan belum berbentuk negara. Agenda kebangsaan menyangkut kemerdekaan, berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal sama sekali belum terwujud, karena konteks awal, yakni merdeka yang mempersyaratkan semua agenda itu belum terwujud. Karena konteks sebagai Indonesia belum merdeka, dan semua agenda kebangsaan Indonesia belum dapat diwujudkan, pemikiran Hamzanwadi melalui NW pertama dan utama adalah membangun kesadaran tentang Indonesia merdeka. Setelah teks NW dalam konteks masyarakat ketika itu, tanggapan masyarakat dengan munculnya pemikiran membangun kesadaran Indonesia merdeka tidak serta merta berterima. Penolakan muncul dari tiga kelompok yang berbeda dengan argumentasi masing-masing. Kelompok pertama, adalah kalangan kolonial Hindia Belanda, yang selalu curiga dengan agenda-agenda kelompok pribumi karena mereka ingin melanggengkan kekuasaannya sebagai bangsa kolonial. Untuk menyasati ini, Hamzanwadi meyakinkan Pemerintah Kolonial Belanda bahwa agenda melalui NW adalah pendidikan agama Islam, bukan agenda-agenda untuk Indonesia Merdeka. Karena itu, setelah kata NW, dilekatkan kata Diniyah Islamiyah, disingkat NWDI, walaupun sesungguhnya, selain agenda pendidikan agama Islam, agenda penyadaran tentang Indonesia merdeka tetap disisipkan oleh Hamzanwadi kepada murid-muridnya. Kelompok kedua yang menolak kehadiran NW-NWDI dan Hamzanwadi adalah elit lokal yang selama ini memiliki pengaruh secara sosial dan kultural di masyarakat. Kelompok ini terbelah dua, satu kelompok berafiliasi dengan kolonial Belanda, sehingga penolakannya karena memperoleh fasilitas dari kolonial Belanda. Fakta sejarah ini terbukti melalui beberapa kali terbongkarnya agenda-agenda penyadaran Indonesia Merdeka oleh Hamzanwadi bocor dan diketahui oleh kolonial Belanda, lalu digagalkan. Satu lagi kelompok yang memang memiliki pengaruh karena status sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat. Alasan penolakan kelompok kedua ini adalah takut kehilangan pengaruh di masyarakat, sehingga mereka terganggu dalam proses reproduksi sosial, ekonomi, dan budaya. Kelompok ketiga yang menolak adalah beberapa di antaranya menjadi tokoh agama Islam dan melakukan pembelajaran agama Islam secara tradisional. Penolakan mereka karena menganggap pola dan substansi pendidikan agama Islam yang ditawarkan Hamzanwadi melenceng dari ajaran Islam yang dipahami sebelumnya. Namun demikian, Hamzanwadi tetap pada pemikiran dan agendanya melakukan penyadaran tentang keberagaman Islam dan kebangsaan.

Sebagai pemikiran dan penyadaran tentang kebangsaan Indonesia dengan berbagai entitas dengan kemerdekaan sebagai entitas pertama dan utama, sebagaimana dikatakan

Brinton (1963) bahwa pemikiran dan penyadaran sejarah bertanggung jawab memberi pengaruh pada peradaban banyak orang di masa sejarah itu dan masa-masa selanjutnya. Memahami Brinton, Hamzanwadi dengan pemikiran dan penyadaran Indonesia merdeka menjadi sejajar dengan idealisme objektif Indonesia setelah merdeka menjadi bangsa Indoneisa yang berdaulat, berideologi, berkonstitusi, berkesatuan, dan berbhineka (Sekr. MPRRI, 2016). Ketika Hamzanwadi menyebut merdeka menjadi syarat utama ber-Indonesia melalui *Nahdlah Wathaniah*, fase sejarah berikutnya (18 Agustus 1945) dirumuskan:

“...kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dhapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”.... (Pembukaan UUD 1945).

Fenomena sejarah dengan kata “MERDEKA” selanjutnya terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, Kuntowijoyo (2003) menyebutnya sebagai genesis pemikiran, bahwa tidak ada yang baru di kolong langit. Pemikiran dan tindakan penyadaran oleh Hamzanwadi tentang Indonesia merdeka sehingga memenuhi persyaratan dikatakan sebagai bangsa merupakan habitualitas individual yang kompleks dan futuristik melalui proses intelektual yang dilaluinya. Proses intelektualitas dimaksud berupa sublimasi pengalaman sosiokultural sebagai bagian dari bangsa yang terjajah, dan analisis kritis terhadap teks-teks dalam Islam (sebut Qur’an, Hadist, dan petunjuk ulama). Sebagai hasil futurisasi Hamzanwadi pada sebelum Indonesia merdeka memiliki kontinuitas sejarah di masa kini dan masa depan dengan salah satu matra kebangsaan Indonesia, yakni dokumen UUD 1945, yang di dalamnya tertera rumusan “MERDEKA” sebagai milik semua bangsa. Bangsa dalam pemahaman ini menjadi sangat luas melintasi semua batasan peradaban kemanusiaan. Masih mengacu Kuntowijoyo (2003) bahwa pemikiran untuk menyadarkan sebagai genesis, teks NW yang muncul ketika konteks sebelum Indonesia merdeka, yang berpengaruh terhadap proses implementasi keyakinan ketuhanan melalui instrumen agama, termasuk agama Islam, Hamzanwadi menempatkan kemerdekaan menjadi jaminan berlangsungnya ajaran-ajaran ketuhanan. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia melalui Pancasila, khususnya “Ketuhanan yang Mahaesa” menjadi sejalan dengan pikiran penyadaran Hamzanwadi dengan *Nahdlah Wathaniah*-nya. Sebagai satu kesatuan integral dengan tanggung jawab berketuhanan, hak inidvidu dan kolektif berikutnya adalah penegakan-pemenuhan hak-hak kemanusiaan dalam arti menyeluruh: diakui sebagai manusia individu dan sosial, diakui sebagai entitas berpikir, dan berbudaya dalam membentuk ada kemanusiaan maka pikiran penyadaran kemerdekaan melalui NW mengakomodasi matra kebangsaan Pancasila, “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Demikian selanjutnya, karena MERDEKA adalah

milik semua anak bangsa dengan berbagai atribut: suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadatnya, dan semuanya harus dipersatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia, tidak memerlukan syarat lain kecuali merdeka. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia, “*Persatuan Indonesia*” memiliki kesejajaran dengan pemikiran-penyadaran MERDEKA oleh Hamzanwadi melalui NW. Adakah konteks sejarah yang memungkinkan proses demokrasi, seperti musyawarah-mufakat, dan proses-proses transformasi nilai kebersamaan sebagaimana pepatah lama “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dapat berlangsung tanpa konteks MERDEKA? Rasanya tidak mungkin! Semuanya membutuhkan kemerdekaan sebagai bangsa. Karenanya, matra Pancasila “*Keryakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*” menjadi sejalan dengan penyadaran tentang MERDEKA sebagai bangsa, bangsa Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW. Jika sila-sila dalam matra kebangsaan Pancasila, keseluruhannya mempersyaratkan kemerdekaan, dan keempatnya mengantarkan terciptanya “*keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* (rakyat dan bangsanya), maka tidaklah mungkin keadilan dapat tercipta tanpa konteks bangsa MERDEKA. Karena itu, Hamzanwadi dengan NW memiliki futuristik yang efektif dalam menawarkan pikiran-penyadaran kemerdekaan sebagai syarat utama dan pertama sebagai bangsa, bangsa Indonesia.

Pikiran dan penyadaran tentang kemerdekaan sebagai syarat kebangsaan Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW dan NWDI berlanjut pada tahap konsistensi dalam bentuk proposisi sebagai pilar strategis perjuangan melahirkan kebangsaan dan keagamaan. Proposisi dimaksud adalah Yakin, ikhlas, dan istiqamah sebagai tiga entitas hirarkis, bersiklus, dan integral membentuk keteguhan hati dan pikiran atas kebenaran tentang pentingnya berkebangsaan dan beragama, serta bersungguh-sungguh menjudkannya dalam keseharian secara konsisten. Ketiga proposisi pilar strategis ini, dalam tradisi manajemen modern dewasa ini setara dengan acuan nilai yang dimiliki oleh setiap komunitas dalam bekerja bersama untuk tujuan bersama. Dalam relasi antarmanusia dengan satu cita-cita dan tujuan bersama, yakni kemerdekaan sebagai bangsa, harus memiliki *inner values*, yang meyakinkan diri masing-masing berdasarkan analisis nalarnya bahwa apa yang akan dilakukan dan diperjuangkan dalam bentuk kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia akan tercapai. Keyakinan itulah yang mendorong semangat mereka ketika itu untuk secara konsisten melakukan agenda-agenda perjuangan untuk tercapainya Indonesia merdeka dan menjadi suatu bangsa. Keyakinan, keikhlasan, dan keistiqamahan merupakan internalisasi spiritualitas kepada yang menganugerahkan segala cita-cita dan tujuan. Matra Pancasila tentang “*Ketuhanan Yang Mahaesa*” menjadi strategis dikaitkan dengan maksud Indonesia

sebagai bangsa dan bangsa Indonesia yang beragama, atau meyakini adanya Tuhan dengan berbagai ketentuannya. Selain *inner values* yakin, ikhlas, dan istiqamah, terdapat tiga proposisi lain yang ditawarkan Hamzanwadi dalam pemikiran dan penyadaran kemerdekaan untuk menjadi Indonesia berkebangsaan dalam posisi sebagai *collectivity values*, yakni kompak, utuh, dan bersatu. Posisi *collectivity values* ini sebagai *supporting spirit* bagi keseluruhan yang berjuang bersama dalam pencapaian Indonesia merdeka sebagai bangsa, bangsa Indonesia. Rasionalisasinya, setiap yang diyakini, diikhlasakan, dan diistiqamahkan untuk diperjuangkan, tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya kekompakan, keutuhan, dan persatuan. Karena itu, matra "*Persatuan Indonesia*" dalam sila ke-3 Pancasila menjadi penting, strategis, dan sejajar dengan maksud Hamzanwadi dengan proposisi kompak, utuh, dan bersatu dalam memperjuangan Indonesia merdeka menjadi suatu bangsa, bangsa Indonesia.

b. Lahirnya NBDI

Senada dengan Kuntowijoyo, Louis O. Mink yang membahas *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood*, sebagaimana dikutip Sri Suhandjati (2003), tahapan berikut dari proses pemikiran untuk penyadaran adalah tahapan evolusi pemikiran. Evolusi pemikiran untuk penyadaran berkaitan dengan penambahan, perluasan dan kedalaman *scope* pemikiran menyangkut aspek-aspek kemanusiaan. Pada fase lahirnya NW dan NWDI kental dengan nuansa pemikiran dan penyadaran pentingnya merdeka sebagai syarat pertama dan utama berbangsa, diikuti dengan *inner values* yakin, ikhlas, istiqamah, berikut kompak, utuh, bersatu sebagai *collectivity values*, dan tersirat maupun tersurat sejajar dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Evolusi berikutnya terjadi ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Dalam hal pemikiran dan penyadaran kemerdekaan sebagai syarat berbangsa dan beragama masih tetap mewarisi evolusi ini, diperluas pada sasaran dan *benefecieries*-nya, yakni kaum wanita. Kondisi evolusi ini wajar karena instrumen transmisi pemikiran untuk penyadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagamaan itu adalah institusi pendidikan, berbentuk madrasah. Secara universal dan mendasar, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Untuk memenuhi Hamzanwadi keterpenuhan hak dasar dalam hal pendidikan, Hamzanwadi mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita, yang diberi nama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI).

Dua kondisi yang disikapi dengan lahirnya NBDI sebagai habitualitas kontekstual Hamzanwadi; *pertama*, agenda dan akibat politik etik kolonial Belanda, tidak semua kalangan pribumi termasuk wanita memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. *Kedua*, budaya patriarkhi masyarakat Sasak ketika itu menempatkan wanita pada lapis kedua

di masyarakat. Habitualitas kontekstual Hamzanwadi, selanjutnya melahirkan pikiran futuristik bahwa wanita juga harus diberikan kesempatan yang sama sebagaimana pria untuk mengenyam pendidikan. Dalam pandangan demokrasi pendidikan, pikiran futuristik ini memenuhi maksud dalam agenda pendidikan untuk semua (*education for all*). Tiga frasa kunci dalam narasi besar pemikiran dan kesadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagaman oleh Hamzanwadi melalui NBDI. *Pertama*, frasa tujuan pendidikan untuk mencerdaskan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tentang tanggung jawab negara sebagai bangsa, yakni...’mencerdasakan kehidupan bangsa’,....kata “mencerdasakan” dalam konteks ini, dalam tradisi Hermeneutika Kritis bermakna kecerdasan intelektual. Dengan kecerdasan intelektual itulah diharapkan ada kesadaran tentang pentingnya merdeka sebagai suatu bangsa, sehingga dengan kesadaran itu, wanita memiliki kepentingan, cicta-cita, dan tujuan sama dengan pria, yakni terwujudnya Indonesia merdeka, sebagai bangsa Indonesia. *Kedua*, frasa pendidikan sebagai hak dasar manusia, pria dan wanita (*education for all*). Frasa ini menyiratkan pada bagian utuh Pembukaan UUD 1945, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, selanjutnya dikenal sebagai sila ke-2 Pancasila. Pendidikan dihajatkan untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk pada tahap awal kesadaran akan pentingnya merdeka sebagai bangsa, lalu perolehan pendidikan sudah memenuhi aspek hak dasar kemanusiaannya untuk menjadi lebih beradab. Ketiga, frasa terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi pria dan wanita menyiratkan aspek keadilan bagi seluruh anak bangsa (pria dan wanita). Bagian utuh Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, selanjutnya kita kenal sebagai sila ke-5 Pancasila.

c. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Kajian sejarah dengan pendekatan teks, teks lahir dari konteks, dan teks-konteks bergerak dalam ruang sosial masyarakat pemilik sejarah, dan produk dari ketiganya disebut sebagai kejadian atau fenomena sejarah. Teks NW, NWDI, NBDI yang lahir dari buah pikiran dan kesadaran merdeka sebagai syarat pertama dan utama sebagai bangsa oleh Hamzanwadi, selanjutnya kita sebut sebagai pergerakan, perjuangan, sebagaimana pergerakan dan perjuangan anak bangsa lainnya demi Indonesia merdeka bukanlah sebuah absurditas sebagaimana digambarkan dalam tokoh mitis *Sisyphus* oleh Albert Camus dalam *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (Albert Camus, 1955), atau pemikiran Perang Dunia II (PD II) yang melahirkan kesia-siaan, tetapi pikiran dan kesadaran oleh Hamzanwadi dengan teks, konteks, dan hubungan teks-konteks dengan masyarakat beserta berbagai proposisi *inner values-collectivity values*-nya membuahkan hasil gemilang, dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tentu Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil kerja kolektif seluruh anak bangsa di berbagai belahan bumi Indonesia (sejak 17 Agustus 1945) disebut Indonesia sebagai ganti Hindia Belanda. Karena itu, berita gembira tentang Indonesia Merdeka harus disebarluaskan kepada siapa saja yang mencita-citakannya. Pikiran penyadaran yang dilakukan Hamzanwadi dalam konteks lokal, yang akhirnya membuahkan hasil pertama: Indonesia Merdeka, merupakan pikiran dan penyadaran menyejarah, sebagaimana Gadamer (1972), "*Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein*" atau kesadaran menyejarah, yakni Hamzanwadi memenuhi tanggung jawab sejarah melalui bergiat mencipta masa depan.

Teks lain sejarah Kemerdekaan Indonesia mencatat, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan menyerahnya pasukan pendudukan tentara Jepang kepada Tentara Sekutu. Teks ini penting untuk konsolidasi berita tentang *de facto* Indonesia Merdeka. Untuk kepentingan konsolidasi berita *de facto* Indonesia Merdeka, Hamzanwadi menginisiasi tiga agenda: *pertama*, konsolidasi kepada para santri dan pejuang lokal untuk tetap waspada, karena situasi semacam ini dapat menimbulkan berbagai kondisi transisi konteks lokal. *Kedua*, Hamzanwadi menginisiasi pengibaran Bendera Merah Putih sebagai simbol ke-Indonesiaan. Dalam nalar Hermeneutika Kritis, dapat dikatakan, inilah saat pertama kalinya Merah Putih berkibar di tanah Lombok di awal Indonesia Merdeka. *Ketiga*, Hamzanwadi menginisiasi rampasan senjata perang tentara Jepang, yang dikenal dengan Peristiwa Wanasaba dan Peristiwa Kopang, karena di dua tempat inilah tentara Jepang bermarkas. Inisiasi yang dilakukan Hamzanwadi sebagai bentuk konsolidasi *de facto* Indonesia Merdeka adalah tindakan heroik seorang pemimpin perjuangan di medan perang, (perhatikan Film-Film Perang Nasional produksi PPNI, seperti "*Janur Kuning*", "*Naga Bonar*", atau Film-Film Perang produksi Hollywood, seperti "*Pearl Harbour*", "*Saving Private Ryan*", "*Black Hawk Down*", "*Green Zone*", dan lain-lain), yang ketika berhasil menumpas musuh, lazim membagi pasukan menjadi tiga kelompok: kelompok pasukan pertama bertanggung jawab menjaga situasi dan kondisi, serta kirim berita kemenangan kepada komando Pusat; kelompok pasukan kedua bertanggung jawab kibarkan bendera sepanjang wilayah teritori tertentu; dan kelompok pasukan ketiga bertanggungjawab merampas senjata musuh, atau melucuti senjata. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Merdeka, yang kita kenal dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pernyataan pembuka dalam Pembukaan UUD 1945 tentang "*Kemerdekaan adalah hak segala bangsa...*" terwujud berkat perjuangan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk oleh Hamzanwadi. Barulah agenda-agenda lain sebagai bangsa bisa diwujudkan, seperti berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan

bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal, karena syarat pertama dan utama sudah diwujudkan, yakni Indonesia Merdeka.

d. Gerilya dan Penyerangan NICA

Tahapan-tahapan selanjutnya dalam tradisi sejarah dikenal sebagai *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran, sebagaimana disebutkan oleh Feith dan Castle (eds, 1970), dalam *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Kondisi Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 tidak serta merta dikui oleh pihak Hindia Belanda. Terbukti, Australia sebagai salah satu negara Sekutu dalam PD II, yang bertanggungjawab melucuti tentara Jepang, justru ditumpangi NICA untuk maksud menguasai kembali Indonesia. Jika dianalogikan dengan siklus narasi sejarah: *Colligation*, *plot*, dan *struktur*, oleh W.H. Walsh (1967) dalam buku: *Philosophy of History: An Introduction*, melalui *Colligation*, *plot*, dan *struktur* memungkinkan kita memahami dua hal sekaligus: *pertama*, bahwa Hamzanwadi terlibat langsung dalam peristiwa heroik penyerbuan NICA 7 Juni 1946, termasuk sebagai aktor intelektual peristiwa tersebut. Peristiwa dan waktu terjadinya terutama koordinasi dan komunikasi penyerbuan di bawah pimpinan Pejuang Rakyat (TGH Faesal) dan Hamzanwadi sejajar dengan koordinasi dan komunikasi antara Letkol Soeharto dan Sri Sultan HB IX pada peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1948. Inisiator serangan tersebut adalah Sri Sultan HB IX dan komandan pasukannya adalah Letkol Soeharto. Dalam konteks ini, siapa yang meragukan keterlibatan Sri Sultan HB IX dalam peristiwa tersebut? Hanya sejarah yang kurang mencatat sebagai teks sejarah. *Kedua*, oleh Hamzanwadi, Madrasah NWDI dan NBDI diposisikan sebagai markas perlawanan, perisai dari serangan NICA, dan tumbal perjuangan. Sebagai markas, semua agenda penyerbuan dirancang dan diorganisir di lingkungan kedua madrasah ini. Sebagai perisai, posisi kedua Madrasah ini tidak begitu dicurigai karena agenda yang tampak kasat mata adalah agenda pendidikan Agama Islam. Sebagai tumbal, beberapa santri kedua Madrasah ini ditahan, bahkan saudara kandung Hamzanwadi (TGH Faesal) gugur, dan dimakamkan tidak jauh dari kompleks Madrasah NWDI dan NBDI, yang selanjutnya masyarakat Lombok, NTB mengenal pemakaman TGH Faesal sebagai Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong.

2. Fase mengisi kemerdekaan Era Orde Lama (1947-1965)

a. Hamzanwadi Merefresentasi Negara (Anggota Delegasi Kehormatan Hajji NIT)

Kembali pada tahapan salah satu tahapan sejarah menurut Feith dan Castle; *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran, bahwa merdeka menjadi syarat pertama dan utama berlangsungnya proses berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Pada fase ini, walaupun Indonesia sudah merdeka tapi masih mencari bentuk ideal sebagai suatu negara. Kondisi saat ini (1947) masih nuansa negara-negara boneka sebagai bentuk negara oleh Hindia Belanda melalui politik *divide et impera*. Pulau Lombok sebagai salah pulau dalam gugusan Sunda Kecil masuk dalam 13 daerah dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Salah satu agenda untuk menemukan bentuk Indonesia sebagai negara, tokoh-tokoh lokal daerah bagian Negara Indonesia Timur, termasuk Hamzanwadi menyetujui dibubarkan Negara Indonesia Timur (1949), dan menyatakan kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase sebelumnya (sebelum 1949) dimanfaatkan untuk mendeklarasikan NKRI kepada seluruh penjuru dunia, termasuk misi diplomasi pengakuan NKRI yang dilakukan oleh Hamzanwadi selaku anggota kehormatan hajji NIT tahun 1947.

Frasa kunci pada bagian ini adalah kelanjutan pikiran dan kesadaran merdeka sebagai *internal dialects* dan kesinambungan sejarah dalam bentuk mengisi agenda berbangsa Indonesia, yakni meninggalkan bentuk negara peninggalan Hindia Belanda dan menggalang dukungan *de facto* NKRI melalui proses diplomasi. Matra kebangsaan strategis yang dikandung dalam maksud NKRI adalah beberapa pasal dalam UUD 1945; Pasal 1 (1); Pasal 18 (1); Pasal 18 B (1); Pasal 18 B (2); Pasal 25A; dan Pasal 37 (5), (Sekretariat Jenderal MPRRI, 2016). Selain tersurat tentang pasal-pasal dalam UUD 1945, rumusan pasal-pasal tersebut menyiratkan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila, "*Persatuan Indonesia*". "*Persatuan Indonesia*" dalam makna ini dipahami sebagai *unity* dari berbagai perbedaan '*diveristy*' yang mewarnai unsur-unsur pembentuk keindonesiaan: perbedaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Karena itu, selain matra Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila, konteks ini kental dengan matra "*Bhineka Tunggal Ika*" (*unity in diversity*).

b. Menghimpun Sumber Daya Lokal (Hamzanwadi sebagai Dewan Syuriah PUIL, Masyumi, dan Konsulat NU)

Perjuangan Indonesia merdeka, diplomasi untuk pengakuan, dan mengisinya dengan berbagai agenda pembangunan membutuhkan wadah untuk menghimpun sumber daya lokal yang memiliki cita-cita dan tujuan bersama setelah Indonesia merdeka. PUIL, Masyumi, dan Konstituante adalah wadah pergerakan mengisi kemerdekaan Indonesia untuk berbagai agenda: politik, ideologi, agama, sosial-ekonomi, dan kebudayaan, yang unsur-unsurnya berasal dari tokoh-tokoh pergerakan-perjuangan lokal/daerah. Dapat dipahami keberadaan wadah-wadah tersebut sebagai instrumen gerakan mengisi kemerdekaan Indonesia. Melalui wadah-wadah tersebut, para tokoh pejuang pergerakan daerah/lokal menyampaikan aspirasinya untuk berbagai agenda mengisi kemerdekaan Indonesia dalam satu sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fakta sejarah ini, matra kebangsaan strategis yang ditawarkan Hamzanwadi sebagai representasi NW, NWDI, NBDI dan salah seorang tokoh perjuangan pergerakan dari daerah adalah “Persatuan Indonesia”. “*Persatuan Indonesia*” dalam maksud ini adalah satu cita-cita, yakni mengisi Indonesia merdeka dengan agenda-agenda kebangsaan, karena hal yang sama juga sedang digerakkan oleh putra-putra Indonesia dari daerah lain di Indonesia. Sebagai wadah instrumen ide dan gagasan mengisi kemerdekaan Indonesia, agenda Hamzanwadi menyiratkan matra “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, yang tidak memungkinkan seluruh rakyat untuk menyampaikan ide dan gagasan mengisi kemerdekaan hadir bersama dalam satu proses pengambilan keputusan. Karena itu dibutuhkan sistem perwakilan. Selanjutnya, perwakilan-perwakilan masing-masing daerah memiliki berbagai perbedaan, tetapi perbedaan itu diikat oleh satu agenda, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, matra kebangsaan strategis dalam konteks sejarah ini adalah “*Bhineka Tunggal Ika*” dengan makna “berbeda-beda, satu tujuan”.

c. NW sebagai Aset Negara-Bangsa

Bulan Mei 2016, pada acara sarasehan penyiapan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Hamzanwadi, mengacu narasi sejarah *Colligation*, *plot*, dan *struktur*, oleh W.H. Walsh, penulis/peneliti sebagai pemandu acara tersebut menyampaikan pengantar, “berdiskusi tentang Nahdlatul Wathan, tentu berdiskusi tentang Hamzanwadi sebagai tokoh sentral pada fase sejarah awal, perubahan, dan pengembangannya, sesungguhnya kita sedang berdiskusi tentang kebangsaan Indonesia”. Pernyataan pengantar di atas cukup beralasan mengingat cita-cita NW pada fase awal sejalan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia, yakni

Indonesia merdeka, lalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berikut mengisinya dengan agenda-agenda pembangunan pada fase perubahan dan pengembangan. Terjadi semacam linieritas dalam cita-cita dan agenda antara Indonesia sebagai bangsa dan NW sebagai organisasi pergerakan kebangsaan. Acuan dokumentatif yang dapat memperkuat argumentasi tersebut bahwa NW, berikutnya NWDI, dan NBDI lahir sebagai organisasi/wadah perjuangan masyarakat Lombok NTB untuk bangsa, negara, dan agama mengakomodasi konteks lokal sejalan dengan konteks negara dan berada dalam lingkup Negara Kesatuan republik Indonesia. Matra strategis dalam fase sejarah ini adalah mengakomodasi berbagai perbedaan dengan satu tujuan, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*”, dan dalam satu wadah negara Kesatuan Indonesia, “*Persatuan Indonesia*”. Proses penyatuan pikiran yang berbeda-beda tersebut memerlukan proses permusyawaratan melalui organisasi NW, “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”. Mengingat wadah NW adalah wadah menghimpun agenda-agenda perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia, sangatlah tepat jika NW menjadi bagian aset penting negara dan bangsa Indonesia. Diresmikannya NW sebagai organisasi massa tahun 1953 berdasarkan ketentuan legalitas di tingkat negara berarti negara memenuhi tanggung jawab melegalkan aset negara untuk kepentingan kebangsaan.

3. Fase Mengisi Kemerdekaan Era Orde Baru (1966-1998)

a. Hamzanwadi: Dialektika Ulama-Umara

Kembali mengacu pada rangkaian sejarah sebagai teks naratif menurut Walsh, pada *colligation* yang membangun *inner connection* antara ilmu keagamaan (Islam) yang dipelajari Hamzanwadi di Madrasah *ash-Shaulatiah* yang menjadikannya sebagai ulama dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin (umara). Terdapat hubungan antara dua kompetensi berbeda, namun keduanya berkaitan dalam bentuk saling mereferensi dalam membangun dua kapasitas pada satu personalitas Hamzanwadi. Lalu terdapat juga *inner connection* antara jaringan ilmu di Madrasah *ash-Shaulatiah* dengan kondisi di Indonesia pada saat bersamaan. Dua *inner connection* ini membantu kita memahami lebih jauh penjelasan Azzyumardi Azra (1994) “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII”, yang generasinya sampai pada sosok Hamzanwadi di Lombok. Piranti sejarah yang penting dipahami adalah latar belakang para ulama Timur Tengah masa itu dan kondisi Indonesia yang menuntut para ulama juga terjun dalam agenda-agenda kebangsaan. Inner connection itulah yang mengharuskan Hamzanwadi mengambil peran sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kurun

waktu 1971-1982. Pada saat bersamaan, Hamzanwadi juga sebagai Anggota Konstituante MPR RI. Jelas tergambar bahwa ada tanggung jawab ganda yang diperankan Hamzanwadi, sebagai ulama sekaligus umara. Tentu kedua peran tersebut tidak semata untuk simbol sosial, namun substansi tanggung jawab sejarah yang melingkupinya. Dipahami bahwa peran ganda sebagai ulama dan umara oleh Hamzanwadi dalam rangka memperkuat pengkhidmatan terhadap bangsa, negara, dan agama. Melalui peran ganda tersebut, Hamzanwadi dapat memainkan fungsi-fungsi katalis masyarakat yang diwakilinya dalam konteks pembangunan nasional.

Satu pembuktian atas peran ganda ulama dan umara oleh Hamzanwadi, bahwa dalam majelis-majelis taklim yang difasilitasinya, selain menyampaikan substansi ajaran dan praktek keislaman, Hamzanwadi juga menyampaikan substansi ketatanegaraan. Hamzanwadi melakukan *content knowledge transmission* tentang relasi hirarkis beberapa dokumen legal negara sebagai bagian tidak terpisahkan dari matra UUD 1945. Sebagai contoh, pidato Hamzanwadi pada satu majelis ta'lim tahun 1970-an, yang intinya adalah “tanggung jawab seorang pemimpin (pemimpin negara) dengan berbagai persyaratan, proses pemilihan, dan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhinya. Pada data kajian ini tergambar dengan jelas relasi hirarkis antara UUD 1945 sebagai hukum dasar, Undang- Undang-Undang (UU) sebagai turunannya, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknisnya. Sebagai ulama, tentu kiprah Hamzanwadi sudah sangat jelas sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content*, sedangkan kiprah sebagai umara dapat ditelusuri pada agenda-agenda pembangunan di era pemerintahan ketika Hamzanwadi mengemban peran ganda tersebut.

b. NW.NWDI, NBDI dan Kontekstualisasi Dinamika Sejarah Bangsa

Sejarah adalah teks, konteks, dan hubungannya dengan masyarakat dalam proses menyejarah. Menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, penyadaran, dan melaksanakan agena kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Untuk memenuhi dinamika dan kontinuitas tersebut, Hamzanwadi melakukan dinamisasi struktural dan kultural. Secara struktural, organisasi NW dikonstruksi mengikuti kebutuhan kontekstual pembangunan, sesuai misi pendidikan, sosial, dakwah Islam, dan pengembangan ekonomi ummat. Unit-unit kerja yang berada di bawah koordinasi NW dibentuk untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian misi pendidikan melalui sekolah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga kursus vokasi. Untuk pencapaian misi dakwah, dibentuk lembaga dakwah dan lembaga kajian keislaman. Untuk mendukung

pencapaian misi sosial, dibentuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bersifat *carity* kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk pengembangan misi ekonomi, dibentuk beberapa lembaga keuangan mikro, dan biro-biro layanan ekonomi lain. Secara kultural, Hamzanwadi menginisiasi penyesuaian pada semua capaian misi, bidang kerja, dan unit kerja. Unit kerja pendidikan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Unit kerja bidang sosial disesuaikan dengan substansi kerja-kerja bidang sosial kemasyarakatan. Unit kerja bidang pengembangan ekonomi juga disesuaikan dengan substansi agenda pembangunan bidang ekonomi.

Jika boleh menamabah atribut pada personalitas Hamzanwadi, selain sebagai “bapak Madrasah dan “tokoh masjid” karena Hamzanwadi mendorong pendirian dan membina banyak madrasah, menginisiasi pendirian masjid dan mengisinya dengan majelis-majelis pengajian, beliau layak digelar beberapa atribut lain. Hamzanwadi layak disebut sebagai bapak “modernisasi pendidikan”, karena melakukan perubahan dan penyesuaian mendasar terhadap bentuk dan sistem pendidikan di tingkat lokal sesuai kebutuhan nasional. Hamzanwadi layak disebut sebagai “pelopor kesejahteraan keluarga dan kesehatan anak”, karena Hamzanwadi satu-satunya ulama yang memberikan fatwa *syar’i* untuk program Keluarga Berencana dan imunisasi, dan NW menjadi salah satu penggerak penting di NTB. Hamzanwadi juga sangat layak digelar “Tokoh Transmigrasi, Intensifikasi-Ekstensifikasi Pertanian”, karena Hamzanwadi melalui majelis-majelis pengajian terus mendorong pemerataan kesejahteraan melalui program transmigrasi, serta menggiatkan pola pertanian dengan sistem gogo-rancah. Agenda-agenda penyesuaian struktural dan kultural yang dilakukan Hamzanwadi tidak lain hanya untuk memenuhi hajat dalam Pembukaan UUD 1945, “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, cerdas spiritual, cerdas akademis, cerdas sosial, cerdas ekonomi, dan cerdas budaya. Jika seluruh aspek kecerdasan terpenuhi, barulah kita sebagai bangsa menjadi bangsa berkebangsaan yang memenuhi matra “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” dalam rangka “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, karena matra-matra kebangsaan yang dipenuhi mencakup seluruh elemen bangsa; anak-anak, remaja, dewasa, pranata keluarga, pria-wanita, tidak terlupakan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus.

4. Fase Mengisi Kemerdekaan Era Reformasi (1999-Sekarang)

a. NW Menjawab Sejarah

Frasa ini penting diulang: menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, penyadaran, dan melaksanakan agenda kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Mengakomodasi pikiran frasa di atas, Hamzanwadi adalah peletak sejarah, generasi berikut melanjutkan estafet sejarah. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja pikiran dan tindakan Hamzanwadi sebagai peletak sejarah, dan generasi berikut sebagai pelanjut estafet sejarah senada dengan konsep Ernest Renan (1823-1892, dalam Prisma, 13/2/3/2013), bahwa “bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu azas-aka”¹ yang terjadi dari dua hal: rakyat yang dulunya menjalani satu riwayat; dan sekarang mempunyai kemauan hidup menjadi satu (menyatu). Demikian juga Bung Karno menguti Renan (dalam Prisma, 13/2/3/2013), bangsa adalah *le desir d’etre ensemble* (kehendak akan bersatu), satu jiwa dan memiliki rasa kesetiakawanan. Sebagai peletak sejarah, Hamzanwadi menginisiasi gerakan kebangsaan bersamaan dengan lahirnya NW/NWDI (fase *the genuine* sejarah NW), lalu mengisi dan mengembangkan kebangsaan pada fase berikutnya (fase *the change* dalam sejarah NW), berikutnya dilanjutkan pada fase sekarang (fase *the development* dalam sejarah NW) oleh generasi penerus Hamzanwadi. Peran ulama-umara yang diemban oleh Hamzanwadi, berlanjut pada peran ganda Tuan Guru Bajang KH. Muhammad Zainul Majdi (disebut TGB) sebagai salah satu penerus strategis pada fase ini.

Sebagai ulama diemban oleh TGB dengan mengambil peran sebagai pengasuh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW Pancor) dan agenda safari dakwah sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content* ke seluruh penjuru tanah air Indonesia dan mancanegara. Sebagai umara, TGB berkiprah dalam kancah politik nasional sebagai Anggota DPR RI (2004-2008). Kiprah itu diperluas lagi dalam agenda-agenda eksekusi pembangunan mengisi pembangunan dengan menjadi Gubernur NTB (2008-2013 dan 2013-2018), dan peran-peran lain yang tidak kalah strategis dalam mengisi pembangunan kebangsaan di era reformasi ini. Sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan peran-peran strategis lainnya, TGB menganut prinsip “kecintaan terhadap daerah adalah kecintaan terhadap Bangsa Indonesia”. Karena itu, visi personal-individual harus ditransformasikan menjadi visi kolektif-institusional di tingkat daerah dan negara. Perwujudan rasa cinta dan visi tersebut menurut TGB bertransformasi dalam bentuk tanggung jawab menegakkan nilai-nilai ketuhanan dan memaksimalkan sumber daya yang dikaruniakan Tuhan di bumi Indonesia. Cinta-visi dan tanggung jawab ini tidak lain untuk

maksud “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, untuk sampai pada terpenuhinya rasa keadilan bagi semua, sebagaimana “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

b. Narasi Sejarah NW adalah Sejarah Bangsa

Sejarah NW dan sejarah kebangsaan Indonesia sebagai narasi sejarah memiliki rangkaian paralel dalam hal tujuan, yang dibentuk melalui *colligation*, *plot*, dan struktur. Melalui *colligation*, nilai kebangsaan Indonesia juga tampak dalam pikiran-penyadaran, dan agenda kebangsaan oleh Hamzanwadi melalui NW. Keduanya menjadi satu *inner connection*, yakni kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, yang bersumber dari empat matra kebangsaan Indonesia: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Karena dibentuk oleh berbagai perbedaan dalam Bhineka Tunggal Ika, ketika proses *colligation* yang membentuk *inner connection* tersebut terjadi melalui NW di Lombok-NTB maka kebangsaan yang dimaksud adalah kebangsaan Indonesia. Melalui *plot* dipahami bahwa terjadi relasi atraktif antara peristiwa sejarah kebangsaan Indonesia dan sejarah NW sebagai teks, lalu teks dari konteks, dan konteks berpengaruh kepada masyarakat ketika teks sejarah terbentuk. Dua peristiwa sejarah berbeda dengan tujuan sama ini membentuk suatu rangkaian peristiwa yang kita pahami sebagai peristiwa sejarah kebangsaan. Melalui struktur dipahami bahwa setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, juga terjadi pada sejarah NW, yang keduanya memunculkan warna matra kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. perbedaan dalam hal struktur hanya tampak pada bentuk strukturnya, tetapi nilai struktur tetap paralel dan memiliki *inner connection*, yakni kebangsaan Indonesia. Memahami maksud analisis ini, mengakomodasi Gadamer (1972), narasi tentang sejarah NW sejajar dengan narasi kebangsaan Indonesia.

c. Tokoh NW dan Pengakuan Negara

Kajian ini merupakan kajian Sejarah dengan Hermeneutika sebagai alat analisis, sehingga bukan biografi atau otobiografi, yang bertanggungjawab melakukan proses evidensi teori, yakni menemukan fakta dan relasi fakta dengan fakta lain dalam proses sejarah, yang tidak saja memperkuat posisi teori tapi menjadikan suatu teori menjadi sangat dialektis memandu proses kajian. Melalui proses evidensi teori dan fakta sejarah dalam kajian ini, tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan tokoh strategis dalam proses dan peristiwa sejarah. Berdasarkan bantuan Hermeneutika, proses kajian ini memandang dan memahami (*understand and verstehen*) Hamzanwadi dari luar dirinya secara subjektif dengan

melihat hubungan kausal antara dirinya dengan peristiwa sejarah yang dilaluinya (Dilthey, 1962). Dipahami bahwa Hamzanwadi, pikiran, tindakan, dan makna serta akibat pikiran dan tindakannya memiliki sumbangan besar terhadap terbentuknya Indonesia merdeka dan Indonesia yang berkebangsaan, melalui wadah kultural-struktural NW. Hamzanwadi bagi dirinya adalah pribadi yang sudah selesai; sudah melahirkan pikiran, sudah melakukan penyadaran, sudah mengagendakan pikirannya dalam tindakan nyata, Indonesia sudah merdeka, dan sudah menjadi bangsa yang berkebangsaan. Generasi hari ini dan masa depan membutuhkan panutan dan teladan dalam mengisi tantangan masa depan. Tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional sebagai Pahlawan Nasional kepada Hamzanwadi dengan sebutan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Pahlawan Nasional.

B. KONSTRUKSI NILAI KEBANGSAAN DALAM SEJARAH NW (Proses *Knowledge Content* dan Dialektika Tanggung Jawab Sejarah)

Sejarah dengan berbagai aspeknya adalah juga sekumpulan pengetahuan dan nilai yang perlu diwariskan kepada generasi masa depan melalui proses pendidikan. Dalam hal sejarah kebangsaan dalam sejarah NW, tujuan akhir proses pendidikan pengetahuan dan nilai adalah terbentuknya generasi yang sadar akan sejarah bangsanya, yang dengannya memiliki apresiasi yang sama dengan generasi pencipta sejarah sebelumnya dalam konteks bangsa yang menyejarah. Tahapan awal yang dilakukan oleh Hamzanwadi untuk maksud ini adalah *transfer* atau alih pengetahuan dan nilai melalui berbagai proses pendidikan dan pengajaran, formal maupun informal, kultural dan struktural. Melalui tahapan transfer, generasi selanjutnya diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi (*identification*) nilai-nilai luhur sejarah kebangsaannya, secara khusus yang dipikirkan dan diagendakan oleh Hamzanwadi melalui NW. Hasil proses *identification*, para generasi diharapkan memiliki sikap; menerima atau menolak, mengikuti atau melawan, mengembangkan atau menghalangi sebagai suatu pilihan bagi dirinya sebagai individu atau kolektif. Dengan sikap melalui proses *identification*, generasi akan menjadi individu atau kelompok yang memiliki identitas sejarah yang *inner* dengan dirinya, dan dengannya akan memiliki tanggung jawab sejarah (*admission*), termasuk tanggung jawab terhadap sejarah bangsa.

Setelah *knowledge content*, sejarah dengan sejumlah pengetahuan dan nilai harus dipahami melalui proses dialektika sejarah. Dialektika sejarah yang dimaksud adalah pengetahuan dan nilai kebangsaan NW oleh Hamzanwadi pada masing-masing fase sejarah

kebangsaan Indonesia menjadi acuan nilai, sumber pemikiran, dan referensi tindakan dalam rangka kebangsaan. Sebagai sebuah nilai, sumber pemikiran, dan referensi tindakan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang ditawarkan Hamzanwadi melalui NW memiliki relasi dipengaruhi dan mempengaruhi (*influence*). Hamzanwadi dan NW berada di tengah antara pengaruh sebelumnya: pengaruh pergumulan pendidikan dan konteks sejarah, dan pengaruh sesudah nilai, pemikiran dan tindakan dicetuskan. Pendidikan, kondisi daerah dan bangsa menjadikan Hamzanwadi sadar bahwa Indonesia harus merdeka, harus menjadi bangsa, dan harus menyejahterakan bangsanya. Kesadaran itu diwujudkan dengan mendirikan NW dan berkiprah melalui NW. Saat berikutnya, ujud dalam bentuk ide dan tindakan itu mampu menggugah kalangan lain di sekitarnya yang memiliki kesadaran yang sama, lalu berjuang bersama-sama. Karena tidaklah heran pada masa-masa awal, semua agenda perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dilakukan kolektif bersama masyarakat dan para murid-muridnya. Nilai kebangsaan yang ditawarkan Hamzanwadi melalui NW mampu mempengaruhi personalitas maupun kolektivitas lain dalam memperjuangkan dan mengisi Indonesia merdeka sebagai bangsa. Bentuk pengaruh itu melalui agenda-agenda bersama mengimplementasikan (*implementation*) secara produktif nilai-nilai kebangsaan dalam mengisi Indonesia merdeka pada masing-masing fase kebangsaan. Munculnya pengaruh dari pikiran dan agenda-agenda kebangsaan melalui NW bukan satu hal yang sekali jadi. Semuanya membutuhkan perjuangan keras tanpa batas. Majelis-majelis pengajian yang difasilitasi Hamzanwadi selaku ulama yang menguatkannya sebagai tokoh masjid dalam rangka *transmission of islamic knowledge content* merupakan ruang-ruang untuk proses diseminasi (*dissemination*) atau penyebarluasan pikiran dan agenda kebangsaan secara natural. Maka tidak berlebihan, setiap memulai majelis, selalu diingatkan *inner values*: yakin, ikhlas, dan istiqamah, serta *collectivity values*: kompak, utuh, bersatu. Termasuk juga menyampaikan pesan pembangunan untuk kesejahteraan sebagai bangsa, sehingga tidak jarang pengajian disertai informasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga dan balita, kerukunan rumah tangga, kependudukan, pertanian, ketaatan pada hukum agama dan negara, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Media-media strategis untuk maksud ini adalah kumpulan doa (*hizib*), syair (wasiat), lagu (*nasyid*), dan dokumen penguatan komitmen (*bai'at*). Tidak sampai di situ saja, Hamzanwadi juga menguatkan ide dan agenda kebangsaan secara terstruktur (*socialization*) melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah) dengan memberikannya label NW. Demikian juga, kelompok-kelompok lain yang bertanggungjawab sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan pergerakan kebangsaan melalui NW dilabeli dengan NW: Muslimat NW, Pelajar

NW, Pemuda NW, Mahasiswa NW, Sarjana NW, Satuan Tugas NW, dan Majelis-Majelis Ta'lim NW. Jadi, jangan terlalu cepat curiga kalau semua dilabeli NW, tidak untuk sekadar berbeda dengan label-label lain, tetapi label NW adalah simbol, substansi, dan spirit perjuangan-pergerakan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia melalui NW. Jadi, dialektika sejarah NW sebagai tanggung jawab sejarah dalam sejarah kebangsaan Indonesia mengikuti tahapan mempengaruhi (*influence*), diterapkan atau diwujudkan (*implementation*), disampaikan secara alamiah (*dissemination*), dan disampaikan secara terstruktur (*socialization*).

C. TEMUAN PENELITIAN

Melalui tahapan dan proses relasi teks, konteks, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dalam narasi sejarah NW berikut matra kebangsaan yang mewarnainya, dihasilkan temuan penelitian sebagaimana di bawah ini.

1. Konstruksi nilai kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW muncul pada setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, yakni fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Lama (1947-1965); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998); dan fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang). Mengingat teks sejarah kebangsaan Indonesia dan sejarah NW lahir dari konteks yang berkesinambungan, berbeda-beda, dan memiliki pengaruh berbeda terhadap kehidupan masyarakat, sehingga nilai kebangsaan yang mewarnai dinamikanya berbeda-beda untuk masing-masing fase sejarah kebangsaan. Fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946) bersamaan dengan lahirnya NW (Gerakan/perjuangan/Pergerakan Tanah Air) dengan berbagai *inner values* dan *collectivity values*-nya didominasi oleh matra kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945, “*Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu....*” matra ini sangat beralasan mengingat fase dan masa ini, Indonesia belum merdeka. Fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Lama (1947-1965) bersamaan kiprah Hamzanwadi sebagai representasi NW di tingkat negara didominasi oleh matra kebangsaan sila-sila dalam Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Matra ini penting, sebagai negara yang baru merdeka memerlukan kekuatan bersama sebagai satu bangsa. Fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998) bersamaan dengan kiprah NW dan Hamzanwadi dalam pembangunan berbagai bidang, didominasi oleh matra kebangsaan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Matra ini penting pada fase dan masa ini mengingat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika cukup terjaga, sehingga negara dan bangsa fokus untuk membangun untuk kesejahteraan. Fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang), bersamaan dengan kiprah NW

melalui generasi baru ulama dan umara didominasi oleh matra kebangsaan penguatan kembali nilai kebangsaan NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Kondisi ini sangat wajar mengingat dunia termasuk Indonesia berada pada puncak revolusi industri fase keempat dengan teknologi komunikasi dan informasi sebagai *core*-nya. Akibatnya, dunia menjadi kampung kecil tanpa batas, sehingga percaturan global menjadi sangat terbuka. Transisi di era terbuka sangat riskan terhadap keutuhan sebagai bangsa dan negara, kebhinekaan tidak lagi menjadi perekat kohesivitas sosiokultural, bahkan menjadikan semakin menguatnya identitas yang divergen. Sebentar lagi Indonesia akan memperoleh bonus demografi, sedangkan daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Dengan alasan demokrasi modern, Indonesia menganut sistem multipartai, dan banyak persoalan lain yang membutuhkan penguatan nilai kebangsaan menyangkut NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi merupakan kontinuitas sejarah. Hamzanwadi bertanggungjawab meletakkan tonggak, menransmisikannya sebagai warisan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan *knowledge content* yang harus diwariskan melalui tahapan alih pengetahuan dan nilai (*transfer*), hasil transfer akan melahirkan kemampuan memilih sebagai dasar agenda selanjutnya (*identification*), dan hasil *identification* akan menjadikan generasi masa depan yang memiliki identitas sejara, yakni sejarah bangsanya.
3. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi adalah sekumpulan nilai dasar yang menjadi acuan yang implementatif dan aplikatif dalam hidup berkebangsaan sehingga nilai tersebut menjadi dialektis. Untuk maksud ini, Hamzanwadi mengagendakan tindakan sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo (2003) melalui proses *influence*: Hamzanwadi dan NW berada di tengah antara pendidikan sebelumnya dan konteks saat itu yang menginspirasi dan mempengaruhi pikiran dan tindakannya, lalu pikiran dan tindakannya itu mempengaruhi konteksnya pada saat berikutnya. Selanjutnya pikiran dan tindakan itu diimplementasikan untuk agenda-agenda kebangsaan. Sebagai ide, pikiran dan tindakan kebangsaan perlu disampaikan, ditransmisikan secara natural melalui proses diseminasi. Majelis-majelis pengajian memiliki peran strategis untuk maksud diseminasi ini. Tidak cukup melalui diseminasi, perlu dilembagakan (sosialisasi), maka pikiran dan agenda perjuangan kebangsaan disosialisasi melalui pelebagaan: sekolah-madrasah, dan lembaga-lembaga pengembangan kebangsaan dengan label NW.

2. LUARAN YANG DICAPAI

- A. Draf dokumen kebijakan (terlampir)
- B. Draf artikel publikasi (terlampir)
- C. Abstrak Persentasi (terlampir)
- D. Draf Dokumen Buku Monograf (terlampir)

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Bagian ini dibagi dalam dua bagian: rencana kegiatan tahun ke-1 yang sedang berproses (hampir tuntas) dan rencana kegiatan tahun ke-2 , sebagaimana dalam matrik di bawah ini.

Kegiatan Tahun ke-1 (sedang berproses)	Bukti Capaian	Rencana Kegiatan Tahun ke-2	Bukti Capaian
1. Draf Kebijakan Implementasi Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan	Draft (lampiran)	FGD utk <i>feasibility</i> , Implementasi Kebijakan	-
2. Artikel Seminar Internasional	Abstrak, Bukti penerimaan	<i>Full paper</i> dan seminar, sertifikat presenter	-
3. Artikel Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi	Draf Artikel	<i>Accepted</i> Artikel Publikasi Internasional Bereputasi	-
4. Draf Monograf	Draf monograf	Cetak Monograf ber-ISBN	-

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan khazanah lokal yang memiliki matra nasional. Data sejarah menunjukkan matra kebangsaan yang dilahirkan Hamzanwadi melalui NW memiliki sejajar dengan matra kebangsaan Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tungga Ika.
2. Setiap nilai kebangsaan Indonesia memiliki paralelisme waktu sejarah dengan sejarah NW, mengingat proses pergerakan kebangsaan sejak tahun 1900-an, diawali dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan paralel dengan konteks lahirnya NW dengan *inner values* dan *collective values*-nya. Demikian pula pada fase-fase selanjutnya, NW menjadi bagian strategis dalam mengisi kemerdekaan dalam rangka kebangsaan Indonesia.
3. Sejarah kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW merupakan sekumpulan pengetahuan dan nilai yang penting diwariskan pada generasi selanjutnya. Fakta sejarah mencatat, pewarisan oleh Hamzanwadi dilakukan melalui tahap *transfer*, *identification*, dan *admission*. Pengetahuan dan nilai sejarah kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW berdialektika melalui tahap *influence*, *implementation*, *dissemination*, dan *socialization*.

B. SARAN

Hasil dan luaran penelitian ini berbentuk dokumen kebijakan dengan substansi nilai kebangsaan yang membutuhkan proses pewarisan kepada generasi bangsa dalam rangka memulihkan pemahaman dan implementasi nilai kebangsaan. Agenda-agenda pewarisan dalam bentuk diseminasi dan sosialisasi melalui berbagai agenda efektif perlu dilakukan pada tahapan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankersmit, F.R. (1991). *Refleksi tentang sejarah: pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah*. (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta. Gramedia. (Buku asli terbit tahun 1990).
- Azra, Azyyumardi. (1994). *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad xvii dan xviii: melacak akar-akar pembaruan pemikiran islam di indonesia*. Bandung. Mizan.
- Brinton, Crane. (1963). *The shaping of modern thought*. Englewood NJ. Prentice Hall.
- Camus, Albert. 1955). *The myth of sisyphus and other essays*. New York. Random House.
- Dillon, H.S. dan Idham s Bey. (2013). *Soekarno dan bangsa* (Prisma, 13/2/3/2013). Jakarta. LP3ES.
- Dilthey, Wilhelm. (1962). *Pattern and meaning in history: thought on history and society*. New York. Harper Torchbook.
- Fattah, Abdul, dkk.. (2017). *Dari nahdlatul wathan untuk indonesia: perjuangan TGKH. muhammad zainuddin abdul madjid (1908-1997)*. Mataram. Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Feith, Herbert and Lance Castle, eds. (1970). *Indonesian political thinking 1945-1965*. (terjemahan LP3ES Jakarta, 1988). Ithaca. Cornell University Pres.
- Gadamer, Hans Georg. (1972). *Truth and historicity*. Heidelberg. The Hague.
- . (1987). *Hermeneutics, tradition and reason*. Cambrigde. Polity Press.
- Jordan, S. (2017). When Nationalism Rears its Ugly Head A Review of Architecture as Peacework by Rudolf Steiner. *Lilipoh Spring* (Society and Community).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Lewis, Bernard. (2009). *Sejarah: diingat, ditemukan kembali, ditemu-ciptakan* (terjemahan oleh Bambang A. Widiyanto dari judul asli: History: Remembered, Recovered, Invented). Yogyakarta. Ombak.
- Muladi. (2006). *Wawasan kebangsaan. konsep, nilai, dan makna*. Jakarta. Lemhanas.
- Myers, J. (1983). Saluting the flag is not enough. *Educational leadership*, 40(6), 37-37.
- Nahdi, Khirjan. (2012). *Paradigma transformatif wacana wasiat renungan masa pengalaman baru karya Kyai Hamzanwadi: relasi filsafat praktis dan hermeneutika dalam dinamika sejarah*. Prosiding Seminar Internasional: Meniman Bahasa, membangun Bangsa FKIP Universitas Mataram. Mataram.
- . (2012). *Nahdlatul wathan dan peran modal : studi etnografi-historis modla spiritual dan sosiokultural*. Yogjakarta. Insyira.
- . (2013). *Modal spiritual dan sosiokultural Nahdlatul Wathan*. *Jurnal Islamic Studies Islamica UIN Sunan Ampel Surabaya* Volume VII/2/2013. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- . (2014). *Wasiat renungan masa-pengalaman baru karya Hamzanwadi: Pragmatisme puisi lama pada era Modern menurut cultural studies*. Artikel terbit dalam *Jurnal SeBaSa FKIP Universitas Hamzanwadi*, Volume II/1/2014. FKIP Universitas Hamzanwadi. Selong.
- . (2016). *Peran modal sosial dalam pengarusutamaan gender pada kalangan muslimat Nahdlatul Wathan*. *Jurnal Review Politik. UIN Sunan Ampel Surabaya* Volume 06. No. 01. Jun 2016, Surabaya UIN Sunan Ampel.
- Pei, M. (2003). The paradoxes of American nationalism. *Foreign Policy*, 31-37.
- Ricklefs, M.C. (1998) . *Sejarah indonesia modern* (terjemahan dari buku asli: A history of modern indonesia, oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

- Salim, Agus. (2002). *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Sekretariat Jenderal MPRRI. (2016). *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta. Smith, A. D. (2009). Cosmopolitanism and Nationalism. *The Hedgehog Review*, Fall, 66-75.
- Stromberg, Roland N. (1968). *European intellectual history since 1789*. New York. Meredith-Century-Croft.
- Suhandjati, Sri. (2003). *Ajaran tatakrama yasadipuroII: perpaduan syariat islam dengan budaya jawa*. Yogyakarta. UIN SUKA.
- Suryo, Djoko. (2008). "Pengantar Buku Penjelasan Sejarah Kuntowijoyo", *Penjelasan sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto pendidikan Nasional: tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi kultural*. Jakarta. Kompas.
- Walsh, W.H. (1967). *Philosophy of history: an introduction*. New York. Harper Book.
- Wang, Z. (2008). National humiliation, history education, and the politics of historical memory: Patriotic education campaign in China. *International Studies Quarterly*, 52(4), 783-806.

LAMPIRAN 1

**Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam
Sejarah Nahdlatul Wathan: Verstehen &
Understanding Khasanah Lokal Bermatra
Nasional**

Acknowledgment

Dengan selesainya penelitian tahun pertama (2018) ini. Tim peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur sebagai mitra dalam penelitian ini.
3. Para pengurus cabang NW se-Pulau Lombok yang telah membentuk dalam penyediaan data dan triangulasi data lapangan penelitian ini.

Pengantar dan Terima Kasih Penulis

*Bismillahi Wabihammdih,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Indonesia adalah kesatuan wilayah, kumpulan kelompok-kelompok etnis, variasi bahasa daerah dan bahasa persatuan, perbedaan-perbedaan budaya lokal, dan lain-lain, yang semuanya menggunakan atribut keindonesiaan. Dari berbagai perbedaan itulah lahir satu pikiran, cita-cita, dan tindakan-tindakan menuju Indonesia sejahtera. Pikiran, cita-cita, dan tindakan menuju Indonesia sejahtera memiliki acuan ideologis, ketentuan hukum fundamental, kesatuan wilayah fisik-non fisik, yang mengakomodasi setiap perbedaan secara lokal. Keempatnya, masing-masing kita kenal sebagai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Keempatnya adalah geneologis historis Indonesia, untuk Indonesia menuju masa depan yang sejahtera. Sebagai geneologis dan historis Indonesia, nilai dan implementasi nilai keempatnya lahir dari habitualitas dan lokalitas keindonesiaan dan kembali kepada keindonesiaan. Hal mana juga lahir dari Nahdlatul Wathan dalam perjalanan sejarahnya, di Lombok Nusa Tenggara Barat. Untuk memudahkan pemahaman dan hubungan antarperistiwa yang melahirkan pikiran, cita-cita, dan tindakan berdasarkan acuan ideologis (Pancasila), hukum fundamen (Undang-Undang Dasar 1945), wilayah

fisik-non fisik (NKRI), dan berbagai perbedaan lokal (Bhineka Tunggal Ika), tulisan ini dimulai sejak fase kelahiran Nahdlatul Wathan sebagai satu khazanah lokal dengan cita-cita, pikiran, dan tindakan sama dengan Keindonesiaan, hingga fase saat ini. Argumentasinya, formalitas keindonesiaan muncul sejak awal 1900-an, sejak dimulainya gerakan kemerdekaan Indonesia, dan sejak itulah keempat matra ini diformalkan, walaupun sebagai nilai sudah ada sejak sebelum menjadi Indonesia.

Dengan selesainya penulisan buku ini, sejak pengumpulan data penelitian dan analisis data, penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Riset dan PkM (DPRM) Kemenristekdikti RI yang telah memfasilitasi proses penelitian. Terima kasih kepada Pengurus PB NW dan Pengurus Wilayah NW NTB yang selalu mendorong dan mengapresiasi setiap penghidmatan kepada perjuangan NW melalui penulisan tentang NW dengan berbagai dinamikanya sebagai bagian dari warisan kepada generasi bangsa di masa depan. Terima kasih juga kepada Universitas Hamzanwadi melalui Pusat Penelitian, PkM dan Publikasi (P3MP) yang menyediakan fasilitas kebijakan penelitian sebagai tanggung jawab Tri Dharma. Demikian pula terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Kantor BAPPEDA NTB yang memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu hingga hadirnya buku ini, yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga buku ini bermanfaat.

*Wallahul Muwaffiqu Walhadi Ila Sabilirrasyad,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pancor, Lombok Timur Oktober 2018

Khirjan Nahdi

Daftar Isi

Pengantar dan Terima Kasih Penulis.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
Tujuan dan Urgensi	1
Beberapa Konsep	3
Posisi Penulis	7
BAB II : KEBANGSAAN DAN NAHDLATUL WATHAN	
Fase Merebut Kemerdekaan dan Lahirnya NW, NWDI, NBDI	8
Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah	9
Masa Proklamasi Kemerdekaan	14
BAB III : KEBANGSAAN INDONESIA DAN PERAN NAHDLATUL WATHAN	
<i>De Facto</i> Indonesia Merdeka dan Peran Diplomasi Hamzanwadi.....	19
Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah Menghimpun Sumber Daya Lokal (Hamzanwadi sebagai Dewan Syuriah PUIL, Masyumi, dan Konsulat NU)	21
Posisi NW sebagai Aset Bangsa dan Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan	22
NW sebagai Aset Negara-Bangsa.....	28
Peran NW dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.....	29
Hamzanwadi: Dialektika Ulama-Umara.....	32
NW, NWDI, NBDI dan Kontekstualisasi Dinamika Sejarah Bangsa	34

BAB IV : KEBANGSAAN INDONESIA DAN NAHDLATUL WATHAN MENJAWAB SEJARAH	
NW Menjawab dan Melanjutkan Sejarah	
Kebangsaan	36
Narasi Sejarah NW adalah Sejarah Bangsa	38
Refresentasi NW dan Pengakuan Negara	38
Tokoh NW dan Pengakuan Negara	40
BAB V : HAMZANWADI: HABITUS, LOKALITAS, DAN KEBANGSAAN	
Habitus individu dan Realitas Lokal	36
Madrasah ash-Shaulatiyah dan Konteks	
Habitulasi.....	44
Institusionalisme Ide dan Gerakan	
Kebangsaan	46
Aktor Intelektual Perlawanan Fisik	48
Merdeka adalah Membangun.....	51
BAB VI : PENUTUP	
Diskusi: Nilai Kebangsaan Dalam Sejarah NW (Proses Knowledge Content dan Dialektika Tanggung Jawab Sejarah	
Simpulan.....	57
Daftar Pustaka	58

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan dan Urgensi

Konsep kebangsaan dipahami sebagai kesadaran individu dan kolektif tentang bangsa menyangkut kemerdekaan, ideologi, kesejahteraan, persatuan, kebudayaan, dan aspek kecerdasan lainnya (Muladi, 2006). Dewasa ini, pemahaman konsep yang mendasari tindakan berkebangsaan dalam konteks keindonesiaan mengalami berbagai tantangan. Tanpa bermaksud mereduksi konteks yang terjadi dapat dikemukakan beberapa fakta: pengingkaran atas hak dasar berketuhanan dan berkemanusiaan; menguatnya identitas individual dan menafikan kebhinekaan; kecenderungan menguasai sumber daya secara individual dengan mengabaikan kepentingan massal, lambat laun akan mengganggu cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Friedman dalam buku *The World is Flat*, yang mengatakan bahwa abad ke-21 telah mengubah wajah dunia bukan lagi dunia yang bulat melainkan dunia yang rata

(Tilaar, 2005), tampak tidak berlebihan dengan realitas terbuka dan luasnya berbagai akses yang menjelma menjadi budaya global. Instrumen bahasa dan arus modal global, secara perlahan namun pasti telah mengaburkan identitas asli dalam konteks Indonesia sebagai suatu bangsa. Sebagai elemen bangsa yang sadar akan kondisi ini, tidaklah mungkin akan larut dalam kondisi kontekstual tersebut dengan hanya meratapinya tanpa proaktif dalam mengembalikan kesadaran dan tindakan kolektif dalam memulihkan keadaan dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu hal strategis dilakukan adalah menemukan konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah *Nahdlatul Wathan* (disingkat NW) sebagai khazanah lokal yang memiliki matra nasional dan memenuhi kebutuhan universal masyarakat Indonesia dalam memahami konsep dan tindakan kebangsaannya, karena kelahiran organisasi sebagai gerakan, dinamika organisasi dan gerakan, hingga survivalitas dewasa ini penuh dengan tidak lepas dari entitas berkebangsaan melalui ber-Pancasila, ber-Bhineka Tunggal Ika, ber-NKRI, yang berdasarkan UUD 1945.

NW sebagai satu organisasi massa Islam, lahir di Lombok Nusa Tenggara Barat, Tahun 1934, lahir dalam kondisi bangsa belum mengenal identitas Indonesia, sehingga ide kelahirannya tidak lepas dari kesadaran dan keinginan untuk merdeka. Pada fase awal berdirinya, NW sangat kental dengan jiwa dan perjuangan kemerdekaan. Fase selanjutnya di era kemerdekaan, melalui instrumen pendidikan (pengetahuan Islam dan umum), dakwah, sosial, dan pengembangan ekonomi, NW tetap konsisten membangun kesadaran dan praktek kebangsaan Indonesia, hingga era globalisasi dewasa ini. Upaya-upaya tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk konstruksi nilai kebangsaan yang komprehensif dalam perjalanan sejarah menyangkut filosofi nilai dan strategi pemassalan sehingga menjadi milik kolektif yang disadari dan terimplementasi. Konstruksi nilai kebangsaan komprehensif dalam perjalanan sejarah dalam kajian ini dipahami sebagai perumusan yang memanjang dan khusus sebagai tradisi sejarah serta pemilahan berdasarkan aspek-aspek kebangsaan: kemerdekaan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem pertahanan-keamanan melalui

hermeneutics dan *verstehen* (menafsir dan memahami) gagasan dan tindakan yang tertuang dalam berbagai artefak sejarah NW hingga saat ini (Djoko Suryo, 2008).

Buku ini bertujuan memetakan konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah NW sebagai instrumen strategis memulihkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan komitmen kolektif mengimplementasikannya melalui warisan khazanah budaya lokal menuju cita-cita luhur berkebangsaan Indonesia. Beberapa argumentasi urgensi buku ini: 1) kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini sedang dalam ujian serius, ditandai dengan hilangnya *trust* sesama anak bangsa, kecenderungan saling melemahkan antarkelompok dan golongan, dan kecenderungan menguasai sumber daya dengan mengabaikan kepentingan bersama; 2) isi buku ini adalah khazanah lokal yang memiliki matra nasional sehingga mudah ditransformasikan dalam konteks lokal dalam upaya mewujudkan cita-cita kebangsaan Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan dari hasil kajian yang difasilitasi oleh Kajian Strategis Nasional DRPM

Kemenristekdikti RI tahun 2018-2019, terdiri atas 5 bab. Bab 1 Pendahuluan, memuat tujuan dan urgensi buku yang disesuaikan dengan tujuan dan urgensi kajian. Diikuti beberapa konsep yang menaungi kajian dan pemikiran tentang kebangsaan dalam konteks Indonesia dan perspektif komparatif pengalaman kebangsaan bangsa dan peradaban lain. Bagian lain di pendahuluan berkaitan dengan posisi penulis, yang mendeskripsikan posisi penulis, sebagai “orang dalam” di Nahdlatul Wathan, untuk menghindari kekhawatiran subjektivitas dalam proses kehadiran buku ini. Isi terkait dengan judul semuanya pada bab 2, 3, dan 4 dengan diawali oleh narasi sejarah sebagai gabungan teks-konteks, dan hubungannya dengan masyarakat. Bagian berikutnya diipayungi dengan *colligation*, plot dan struktur yang merujuk pada warna matra kebangsaan dalam keseluruhan narasi sejarah Nahdlatul Wathan pada masing-masing fase. Bab 5, Bagian Penutup berisi diskusi dan simpulan. Diskusi merupakan temuan kajian, yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk penyempurnaannya. Terakhir simpulan, sebagai ringkasan jawaban atas masalah dalam kajian ini, dan menjelma menjadi buku saat ini.

Beberapa Konsep

Wacana kebangsaan dalam perspektif sejarah suatu bangsa menjadi relasi kausalitas yang beragam. Sejarah Indonesia mencatat kemunculan ide-ide kebangsaan dimulai sejak tiga dasawarsa pertama abad XX. Ricklefs (1998) menyebutnya sebagai “Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional”, yang ditandai dengan berbagai perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama. Kesadaran yang pertama muncul adalah tentang suasana keterjajahan, dan pada saat yang sama munculnya gerakan-gerakan anti penjajahan. Beberapa catatan sejarah sebagai kelanjutan perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama dengan munculnya ide-ide baru mengenai organisasi yang berpengaruh pada ide tentang kepemimpinan baru, definisi-definisi baru identitas yang melahirkan analisis baru tentang lingkungan keberagamaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Perspektif komparatif sejarah kebangsaan, Lewis (2009) mencatat kesadaran kebangsaan suatu bangsa memiliki relasi kausal yang berbeda. Dalam hal fungsi dan tujuan, Lewis membagi catatan sejarah

dalam tiga klasifikasi: *remembred history*, *recovered history*, dan *invented history*. Merujuk Bhaskar (Salim, 2002), sejarah Indonesia mengalami tiga fase penting: *the genuine* (awal) (pra dan awal kemerdekaan); *the change* (perubahan) (akhir orde lama hingga akhir orde baru); dan *the development* (pengembangan) (fase kedua) (akhir orde baru, orde reformasi hingga saat ini). Berdasarkan pandangan Lewis dan Bhaskar, kebangsaan dalam sejarah Indonesia dipahami sebagai proses pembentukan pada fase awal (pra kemerdekaan) yang melahirkan ide dan gagasan merdeka, keberagamaan, politik, sosial, dan budaya. Secara performatif, implementasi nilai-nilai kebangsaan dikenal dengan wawasan kebangsaan mengalami masa kegemilangan pada fase perubahan, walaupun dirasakan penuh dengan kesemuan dan tendensi pelanggaran kekuasaan rezim orde baru. Pada fase pengembangan, dengan berubahnya sistem demokrasi dan ketatanegaraan, dan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi dirasakan kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan mengalami krisis. Karena itu, proses pengungkapan kembali nilai kebangsaan Indonesia dan mereformulasi

implementasinya merupakan agenda *recovered history* dan *invented history* sebagaimana dikemukakan Lewis. Dalam sebuah forum Internasional tentang pendidikan karakter, Nahdi (2014) menyebutnya sebagai praktek “melupakan dan tidak mengapresiasi sejarah bangsa”. Proses yang akan dilakukan adalah mengingat kembali peta konstruksi nilai kebangsaan yang bersumber dari khazanah lokal dan bermatra nasional, dipetakan kembali dan mereformulasi implementasinya.

Berbagai perbedaan kausal yang melahirkan ide dan implementasi nilai kebangsaan menggambarkan dinamika relasionalnya secara unik sesuai pengalaman berkebangsaan masing-masing peradaban bangsa. Bangsa China, sebagaimana dideskripsikan Zheng Wang (2008) tentang China di era 80-an sebagai bangsa yang korup, anti demokrasi, dan pemimpin yang dikator. Puncak dari semua kondisi berbangsa tersebut adalah tragedi Tiananment. Melalui kajiannya, Zheng Wang merumuskan suatu model pendidikan sejarah tentang ideologi kebangsaan China dengan mengenalkan kembali situs-situs sejarah bangsa China, seperti keunggulan dalam perang, mitologi, dan sikap heroik bangsanya dalam membela kebenaran yang

diyakini. Dengan mengutip Pennebaker (1997), Zheng Wang meyakini bahwa memori kolektif tentang nasionalisme, tidak saling mencurigai, dan menghargai perbedaan menjadi akar kuat atmosfer kecintaan pada bangsa dan kebangsaan. Dengan pernyataan yang bersifat manusuka, Zheng Wang menyimpulkan, jika hendak membentuk jiwa nasionalisme dan kebangsaan secara alamiah harus dilakukan dengan mempengaruhi pikiran dan emosi kolektif setiap waktu dan tempat dalam konteks pendidikan. Media komunikasi yang berbasis teknologi, seperti film, radio, dan televisi dapat mengakselerasi proses tersebut.

Lain China, beda pula Amerika dalam memahami kebutuhan nilai kebangsaan bagi rakyat dan bangsanya. Jika China memandang nilai dan implementasi nilai kebangsaan berdasarkan kebutuhan demokrasi, keadilan, dan transparansi yang diinspirasi dari pengalaman buruk bangsanya secara internal, bangsa Amerika memandang kebangsaan berdasarkan nilai-nilai universal demokrasi, penegakan hukum, pasar bebas, dan institusi atau pembagian kekuasaan. Minxin Pei (1998) dalam *The Paradoxes of American Nationalism* menggambarkan kondisi internal Amerika

sebagai negara tujuan urbanisasi para imigran dari berbagai belahan bumi. Untuk menyatukan pandangan tentang bangsa Amerika, nilai kebangsaan tidak mungkin direduksi melalui keunikan masing-masing nilai milik para imigran, melainkan harus melebur semuanya menjadi nilai bangsa Amerika dalam kebijakan *melting pot*. Presiden George Walker Bush pernah mengatakan bahwa nilai kebangsaan bagi Amerika bukanlah suatu jalan: bukan jalan demokrasi, bukan jalan hukum, bukan jalan birokrasi, dan bukan jalan pasar bebas, tetapi semuanya merupakan suatu keyakinan individu yang menjelma menjadi keyakinan kolektif. Untuk terciptanya kondisi tersebut, semua bangsa Amerika harus memperjuangkannya sebagai pandangan masa depan, walaupun dengan perang sekalipun. Kondisinya menjadi sangat berbeda dengan realitas kebangsaan di Indonesia yang sejak sebelum bernama Indonesia sudah berbeda satu sama lain dalam berbagai hal: agama, budaya, etnik, adat istiadat, dan bahasa. Ketika menjadikan suatu identitas kebangsaan Indonesia, diperlukan proses sublimasi nilai dasar yang bersumber dari berbagai entitas berbeda untuk ditransformasikan dalam entitas kebangsaan yang

dimiliki bersama. Proses ini bermakna bahwa secara substantif pertimbangan lokalitas, geografi, etnisitas, dan agama yang berbeda menjadi acuan dalam membentuk nilai dan implementasi nilai kebangsaan yang meng-Indonesia. Proses institusionalisasi dan strukturisasi nilai dan implementasi nilai kebangsaan menjadi ranah kebijakan dan birokrasi.

Perbandingan antara peta konstruksi nilai dan implementasi nilai kebangsaan bangsa China, Amerika, dan Indonesia menunjukkan bahwa kondisi Indonesia jauh lebih kompleks dibanding keduanya. Sebagai negara yang tidak pernah mengalami kolonialisme, China relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaannya. Amerika, walaupun pernah dijajah dan sebagai negara kumpulan para imigran, relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaan, serta melakukan penekanan jika terjadi persoalan dalam implementasinya. Indonesia, selain pernah menjadi negara jajahan, juga menjadi bangsa yang penuh dengan berbagai perbedaan. Pengalaman menjadi bangsa terjajah melahirkan nilai kebangsaan yang merdeka, dan nilai kebangsaan yang meng-Indonesia harus mengakomodasi setiap

perbedaan yang menjadi keunikannya. Kondisi kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah dan bangsa yang unik dengan berbagai perbedaan memiliki dua agenda strategis, sebagaimana digambarkan John W Myers (1983); kebangsaan mendahulukan kepentingan bangsa, sedangkan patriotisme menempatkan cita-cita bangsa. Konteks keindonesiaan saat ini membutuhkan keduanya. Sikap kebangsaan yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa dewasa ini dan masa depan haruslah memiliki sikap patriotik dengan menyadari dan memahami cita-cita bangsa di masa lalu sebagai bangsa terjajah, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sikap patriotisme, setiap anak bangsa memiliki penghargaan atas masa lalu bangsanya dan meneladaninya terus menerus.

Harus disadari bahwa sikap kebangsaan akan mengalami persoalan dalam dinamika masyarakat suatu bangsa. Dinamika masyarakat tradisional menuju kosmopolitan berdampak pada konstruksi nilai kebangsaan, sebagaimana gambaran masyarakat tradisional Eropa menjadi kosmopolitan pasca Perang Dunia dan Revolusi Perancis di gambarkan Anthony

D. Smith (2009) dalam *Cosmopolitanism and Nationalism*. Smith menggambarkan tiga kelompok kosmopolitan Eropa: individualis, multikultural, dan statis. *Pertama*, kelompok individualis mengutamakan hal-hal mendasar tentang hak asasi, seperti pengakuan atas rasionalitas, kehormatan, nilai moral, kebebasan, dan rasa aman. Kelima hal dimaksud tidak terikat oleh kewarganegaraan seseorang, kelas sosial, jender, ras, dan suku/etnik. *Kedua*, kelompok multikultural meyakini bahwa persoalan ras dan suku/etnik tidak bisa disederhanakan atau direduksi atas nama apa pun dan dengan alasan apa pun dalam konteks berkebangsaan. Keyakinan ini lahir dari realitas bahwa ras dan etnik berbeda sejak pertama keberadaannya. Dalam konteks ini, konsep kebangsaan lahir menawarkan katalis baru sebagai identitas bersama yang tidak menafikan identitas asli masing-masing ras dan etnik. *Ketiga*, kelompok statis yakni kelompok yang relatif tidak terpengaruh dengan dinamika yang berkembang, mereka cukup bertahan dan membatasi diri pada nilai-nilai kebangsaan lama mereka dengan dipandu oleh sistem hukum yang ketat. Melalui ketiga kelompok kosmopolit yang digambarkan Smith,

khusus pada multikultural sebagaimana kasus Indonesia, terlebih pada dinamika global dewasa ini, penting menempatkan budaya-budaya lokal sebagai khazanah ras dan etnik yang berbeda-beda sebagai suatu kekuatan, sebagai basis nilai, sebagai pemandu gerak peradaban, dan harus memiliki perekat kokoh satu sama lain melalui penciptaan entitas universal. Seth Jordan (2017) dalam review terhadap *Architecture as Peacwork* (Rudolph Steiner), ditulis dalam *When Nationalism Rears Its Ugly Head* menjelaskan pentingnya pandangan konsep kemanusiaan yang satu sama lain saling membutuhkan, tidak ada yang berdiri sendiri, dan budaya universal harus dijadikan perekat dan fondasi nilai bersama dalam konteks kebangsaan. Tidak disangkal bahwa Nahdlatul Wathan sebagai lembaga yang lahir dari khazanah lokal bermatra nasional menawarkan dan mengembangkan nilai universal dalam berkebangsaan terkait kemerdekaan, keberagaman, instrumen organisasi, ide-ide modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Pendiri Nahdlatul Wathan paham bahwa kebutuhan akan kemerdekaan, agama, organisasi,

modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi tidak terikat karena beraneka suku bangsa di Indonesia.

Posisi Penulis

Sebagai “orang dalam” di lingkungan Nahdlatul Wathan, posisi penulis beresiko secara akademis karena ada kekhawatiran dominasi subjektif terkait sebagian atau seluruh isi buku ini. Untuk menghindari kekhawatiran itu, buku yang sampai pada khalayak pembaca saat ini tidak muncul sebagai monograf dari buah pemikiran semata, tetapi produk integrasi antara acuan konsep dan data lapangan, sehingga secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Inspirasinya berawal dari pertanyaan, siapa sesungguhnya Indonesia? Indonesia adalah integrasi dari beraneka lokalitas, termasuk pemikiran, gagasan, dan tindakan. Ketika berdiskusi tentang kebangsaan (Indonesia), tentu berdiskusi tentang kebangsaan yang berasal dari berbagai khazanah lokal, termasuk Nahdlatul Wathan dan Hamzanwadi sebagai figur sentralnya. Dengan demikian, kekhawatiran, bahkan kecurigaan subjektivitas dalam buku ini bisa dihindari.

BAB II

KEBANGSAAN DAN NAHDLATUL WATHAN

Fase Merebut Kemerdekaan dan Lahirnya NW, NWDI, NBDI Narasi Sejarah

Nama dan Tujuan Madrasah Nahdlatul Wathan

Nama NW bermula dari Pesantren al-Mujahidin (1934). Izin pendirian dan pembukaan madrasah dikeluarkan oleh *Oost Controlier* Hindia Belanda di Selong, Lombok Timur (1937) dengan nama resmi Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI). Madrasah ini bertujuan memberikan pelajaran agama islam yang lebih bermutu kepada masyarakat sebagai respons kondisi masyarakat Lombok yang diwarnai kebodohan dan keterbelakangan (Dinsos NTB, 2017).

Nama Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah.

Nahdlatul Wathan sebagai nama madrasah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, *nahdah* berarti perjuangan, kebangkitan, dan pergerakan. *Wathan* berarti tanah air, bangsa atau negara. Sedangkan *Diniyyah Islamiyyah* berarti agama Islam. Nama tersebut merefleksikan suasana psikologis dan kondisi sosial pada saat itu, terutama berkaitan dengan jargon-jargon jihad (perjuangan) menggelorakan semangat patriotisme dalam melakukan perlawanan terhadap penetrasi kolonialisme

Belanda dan Jepang, serta upaya memberdayakan pendidikan untuk kecerdasan masyarakat yang sedang terpuruk dan terbelakang (Sumber: Yusuf, 1976; Nahdi, 2012).

Pilar Yakin, Ikhlas, Istiqamah sebagai pikiran perjuangan keagamaan dan kebangsaan.

Yakin sebagai pilar strategis perjuangan NW merupakan sikap percaya pada *iradah* Allah. Yakin merupakan modal spiritual sebagai komitmen hati dan moral dalam menegakkan ajaran tauhid. Yakin sebagai pilar strategis perjuangan NW menjadi menyedjarah dalam mewarnai kelahiran NW/NWDI hingga saat ini. Yakin berkaitan dengan kepercayaan hati dan pikiran atas kebenaran berdasarkan pertimbangan nalar dan pengalaman empirik. Ikhlas mengacu pada kerelaan dan kesungguhan hati membela dan memperjuangkan kebenaran yang menjadi keyakinannya. Sedangkan istiqamah berhubungan dengan kedisiplinan atau konsistensi sikap seorang dalam mengembangkan kebenaran yang diyakininya. Ketiganya (yakin, ikhlas, dan istiqamah) merupakan tiga entitas yang hierarkis, bersiklus, dan integral dalam membentuk keteguhan hati dan pikiran atas kebenaran, bersungguh-sungguh dalam melakukannya dalam kehidupan nyata, dan konsisten atas pilihan itu (Nahdi, 2012).

Semboyan Kompak, Utuh, Bersatu sebagai nuansa kultural perjuangan keagamaan dan kebangsaan.

...setelah pilar Yakin, Ikhlas, dan Istiqamah menjadi nilai dasar perjuangan NWDI, semboyan Kompak, Utuh, dan Bersatu sebagai nilai kultural pada tingkat transformasi. Ketiga semboyan ini selalu digelorkan pada kegiatan pengajian dan pembelajaran di Madrasah NWDI...(Sumber: Nahdi, 2012).

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

Nilai kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan adalah sejarah pemikiran Pendiri Organisasi Nahdlatul Wathan (disingkat NW), yakni Tuan Guru Kyai Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (dalam laporan ini disebut Hamzanwadi). Pemikiran kebangsaan lahir bersamaan dengan lahirnya pemikiran keislaman, jelasnya tegaknya ajaran Islam dalam konteks lokal Lombok NTB sebagai bagian dari NKRI. Pemikiran itu kongkretnya, Islam sebagai agama membutuhkan konteks yang aman, nyaman, merdeka, dan berdaulat sebagai sebuah bangsa. Karenanya, dalam pemikiran

Hamzanwadi, kebangsaan dan keislaman adalah dua entitas sejajar, satu sebagai ajaran, satunya lagi sebagai wadah atau konteks yang menjamin ajaran Islam berjalan dengan baik. Stromberg (1968) menyebutnya sebagai *history of thought*, *history of idea*, atau *intellectual history*, di mana pemikiran kebangsaan melahirkan tindakan kebangsaan, sekaligus pemikiran keislaman melahirkan tindakan keislaman yang diperjuangkan bersamaan oleh Hamzanwadi, walaupun selanjutnya pemikiran dan tindakan keislaman tidak dibahas karena tidak menjadi scope kajian ini. Pemikiran dalam maksud ini tidak dipisahkan dan dimaknai sama dengan kesadaran, karena memang pemikiran sebagai sebagai khazanah individual Hamzanwadi ditawarkan sebagai instrumen kesadaran tentang kebangsaan yang secara kontekstual sedang terjajah, dan memunculkan kesadaran tentang semangat merdeka sebagai bangsa. Sebagai pemikiran dan tindakan kebangsaan dalam sejarah NW, bahasan kajian ini secara atraktif berkaitan dengan teks, konteks, dan pengaruh pikiran dan tindakan kebangsaan dalam fase sejarah NW dengan menarik

piranti nilai kebangsaan yang dimaksud dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Fase ini ditandai dengan lahirnya NW, dari bahasa Arab *nahdlah* berarti perjuangan, kebangkitan, atau pergerakan, dan *wathaniah*, berarti bangsa, tanah air, atau negara. Sebagai teks, kata NW merupakan diksi dengan nuansa makna yang komprehensif. Kebangkitan, perjuangan, pergerakan berkaitan dengan integrasi, simultansi, dan konsistensi tindakan berdasarkan pemikiran tentang *wathaniah* ‘bangsa, tanah air, negara, yang ketika teks ini dimunculkan, konteks Indonesia belum lahir sebagai bangsa berdaulat, masih sebagai tanah air terjajah, dan belum berbentuk negara. Agenda kebangsaan menyangkut kemerdekaan, berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal sama sekali belum terwujud, karena konteks awal, yakni merdeka yang mempersyaratkan semua agenda itu belum terujud. Karena konteks sebagai Indonesia belum merdeka, dan semua agenda kebangsaan Indonesia belum dapat diwujudkan,

pemikiran Hamzanwadi melalui NW pertama dan utama adalah membangun kesadaran tentang Indonesia merdeka. Setelah teks NW dalam konteks masyarakat ketika itu, tanggapan masyarakat dengan munculnya pemikiran membangun kesadaran Indonesia merdeka tidak serta merta berterima. Penolakan muncul dari tiga kelompok yang berbeda dengan argumentasi masing-masing. Kelompok pertama, adalah kalangan kolonial Hindia Belanda, yang selalu curiga dengan agenda-agenda kelompok pribumi karena mereka ingin melanggengkan kekuasaannya sebagai bangsa kolonial. Untuk menyasati ini, Hamzanwadi meyakinkan Pemerintah Kolonial Belanda bahwa agenda melalui NW adalah pendidikan agama Islam, bukan agenda-agenda untuk Indonesia Merdeka. Karena itu, setelah kata NW, dilekatkan kata Diniyah Islamiyah, disingkat NWDI, walaupun sesungguhnya, selain agenda pendidikan agama Islam, agenda penyadaran tentang Indonesia merdeka tetap disisipkan oleh Hamzanwadi kepada murid-muridnya. Kelompok kedua yang menolak kehadiran NW-NWDI dan Hamzanwadi adalah elit lokal yang selama ini memiliki pengaruh secara sosial dan kultural di

masyarakat. Kelompok ini terbelah dua, satu kelompok berafiliasi dengan kolonial Belanda, sehingga penolakannya karena memperoleh fasilitas dari kolonial Belanda. Fakta sejarah ini terbukti melalui beberapa kali terbongkarnya agenda-agenda penyadaran Indonesia Merdeka oleh Hamzanwadi bocor dan diketahui oleh kolonial Belanda, lalu digagalkan. Satu lagi kelompok yang memang memiliki pengaruh karena status sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat. Alasan penolakan kelompok kedua ini adalah takut kehilangan pengaruh di masyarakat, sehingga mereka terganggu dalam proses reproduksi sosial, ekonomi, dan budaya. Kelompok ketiga yang menolak adalah beberapa di antaranya menjadi tokoh agama Islam dan melakukan pembelajaran agama Islam secara tradisional. Penolakan mereka karena menganggap pola dan substansi pendidikan agama Islam yang ditawarkan Hamzanwadi melenceng dari ajaran Islam yang dipahami sebelumnya. Namun demikian, Hamzanwadi tetap pada pemikiran dan agendanya melakukan penyadaran tentang keberagaman Islam dan kebangsaan.

Sebagai pemikiran dan penyadaran tentang kebangsaan Indonesia dengan berbagai entitas dengan kemerdekaan sebagai entitas pertama dan utama, sebagaimana dikatakan Brinton (1963) bahwa pemikiran dan penyadaran sejarah bertanggung jawab memberi pengaruh pada peradaban banyak orang di masa sejarah itu dan masa-masa selanjutnya. Memahami Brinton, Hamzanwadi dengan pemikiran dan penyadaran Indonesia merdeka menjadi sejajar dengan idealisme objektif Indonesia setelah merdeka menjadi bangsa Indoneisa yang berdaulat, berideologi, berkonstitusi, berkesatuan, dan berbhineka (Sekr. MPRRI, 2016). Ketika Hamzanwadi menyebut merdeka menjadi syarat utama ber-Indonesia melalui *Nahdlah Wathaniah*, fase sejarah berikutnya (18 Agustus 1945) dirumuskan:

“...kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dhapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”... (Pembukaan UUD 1945).

Fenomena sejarah dengan kata “MERDEKA” selanjutnya terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, Kuntowijoyo (2003) menyebutnya sebagai genesis

pemikiran, bahwa tidak ada yang baru di kolong langit. Pemikiran dan tindakan penyadaran oleh Hamzanwadi tentang Indonesia merdeka sehingga memenuhi persyaratan dikatakan sebagai bangsa merupakan habitualitas individual yang kompleks dan futuristik melalui proses intelektual yang dilaluinya. Proses intelektualitas dimaksud berupa sublimasi pengalaman sosiokultural sebagai bagian dari bangsa yang terjajah, dan analisis kritis terhadap teks-teks dalam Islam (sebut Qur'an, Hadist, dan petunjuk ulama). Sebagai hasil futurisasi Hamzanwadi pada sebelum Indonesia merdeka memiliki kontinuitas sejarah di masa kini dan masa depan dengan salah satu matra kebangsaan Indonesia, yakni dokumen UUD 1945, yang di dalamnya tertera rumusan "MERDEKA" sebagai milik semua bangsa. Bangsa dalam pemahaman ini menjadi sangat luas melintasi semua batasan peradaban kemanusiaan. Masih mengacu Kuntowijoyo (2003) bahwa pemikiran untuk menyadarkan sebagai genesis, teks NW yang muncul ketika konteks sebelum Indonesia merdeka, yang berpengaruh terhadap proses implementasi keyakinan ketuhanan melalui instrumen agama, termasuk agama Islam, Hamzanwadi

menempatkan kemerdekaan menjadi jaminan berlangsungnya ajaran-ajaran ketuhanan. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia melalui Pancasila, khususnya “*Ketuhanan yang Mahaesa*” menjadi sejalan dengan pikiran penyadaran Hamzanwadi dengan *Nahdlat Wathaniah*-nya. Sebagai satu kesatuan integral dengan tanggung jawab berketuhanan, hak individu dan kolektif berikutnya adalah penegakan-pemenuhan hak-hak kemanusiaan dalam arti menyeluruh: diakui sebagai manusia individu dan sosial, diakui sebagai entitas berpikir, dan berbudaya dalam membentuk ada kemanusiaan maka pikiran penyadaran kemerdekaan melalui NW mengakomodasi matra kebangsaan Pancasila, “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Demikian selanjutnya, karena MERDEKA adalah milik semua anak bangsa dengan berbagai atribut: suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadatnya, dan semuanya harus dipersatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia, tidak memerlukan syarat lain kecuali merdeka. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia, “*Persatuan Indonesia*” memiliki kesejajaran dengan pemikiran-penyadaran MERDEKA oleh Hamzanwadi melalui

NW. Adakah konteks sejarah yang memungkinkan proses demokrasi, seperti musyawarah-mufakat, dan proses-proses transformasi nilai kebersamaan sebagaimana pepatah lama “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dapat berlangsung tanpa konteks MERDEKA? Rasanya tidak mungkin! Semuanya membutuhkan kemerdekaan sebagai bangsa. Karenanya, matra Pancasila “*Keryakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*” menjadi sejalan dengan penyadaran tentang MERDEKA sebagai bangsa, bangsa Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW. Jika sila-sila dalam matra kebangsaan Pancasila, keseluruhannya mempersyaratkan kemerdekaan, dan keempatnya mengantarkan terciptanya “*keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* (rakyat dan bangsanya), maka tidaklah mungkin keadilan dapat tercipta tanpa konteks bangsa MERDEKA. Karena itu, Hamzanwadi dengan NW memiliki futuristik yang efektif dalam menawarkan pikiran-penyadaran kemerdekaan sebagai syarat utama dan pertama sebagai bangsa, bangsa Indonesia.

Pikiran dan penyadaran tentang kemerdekaan sebagai syarat kebangsaan Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW dan NWDI berlanjut pada tahap konsistensi dalam bentuk proposisi sebagai pilar strategis perjuangan melahirkan kebangsaan dan keagamaan. Proposisi dimaksud adalah Yakin, ikhlas, dan istiqamah sebagai tiga entitas hirarkis, bersiklus, dan integral membentuk keteguhan hati dan pikiran atas kebenaran tentang pentingnya berkebangsaan dan beragama, serta bersungguh-sungguh menjudkannya dalam keseharian secara konsisten. Ketiga proposisi pilar strategis ini, dalam tradisi manajemen modern dewasa ini setara dengan acuan nilai yang dimiliki oleh setiap komunitas dalam bekerja bersama untuk tujuan bersama. Dalam relasi antarmanusia dengan satu cita-cita dan tujuan bersama, yakni kemerdekaan sebagai bangsa, harus memiliki *inner values*, yang meyakinkan diri masing-masing berdasarkan analisis nalarnya bahwa apa yang akan dilakukan dan diperjuangkan dalam bentuk kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia akan tercapai. Keyakinan itulah yang mendorong semangat mereka ketika itu untuk secara konsisten melakukan agenda-agenda perjuangan untuk

tercapainya Indonesia merdeka dan menjadi suatu bangsa. Keyakinan, keikhlasan, dan keistiqamahannya merupakan internalisasi spiritualitas kepada yang menganugerahkan segala cita-cita dan tujuan. Matra Pancasila tentang “Ketuhanan Yang Mahaesa” menjadi strategis dikaitkan dengan maksud Indonesia sebagai bangsa dan bangsa Indonesia yang beragama, atau meyakini adanya Tuhan dengan berbagai ketentuannya. Selain *inner values* yakin, ikhlas, dan istiqamah, terdapat tiga proposisi lain yang ditawarkan Hamzanwadi dalam pemikiran dan penyadaran kemerdekaan untuk menjadi Indonesia berkebangsaan dalam posisi sebagai *collectivity values*, yakni kompak, utuh, dan bersatu. Posisi *collectivity values* ini sebagai *supporting spirit* bagi keseluruhan yang berjuang bersama dalam pencapaian Indonesia merdeka sebagai bangsa, bangsa Indonesia. Rasionalisasinya, setiap yang diyakini, diikhlasakan, dan diistiqamahkan untuk diperjuangkan, tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya kekompakan, keutuhan, dan persatuan. Karena itu, matra “Persatuan Indonesia” dalam sila ke-3 Pancasila menjadi penting, strategis, dan sejajar dengan maksud Hamzanwadi dengan proposisi kompak, utuh,

dan bersatu dalam memperjuangkan Indonesia merdeka menjadi suatu bangsa, bangsa Indonesia.

Senada dengan Kuntowijoyo, Louis O. Mink yang membahas *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood*, sebagaimana dikutip Sri Suhandjati (2003), tahapan berikut dari proses pemikiran untuk penyadaran adalah tahapan evolusi pemikiran. Evolusi pemikiran untuk penyadaran berkaitan dengan penambahan, perluasan dan kedalaman *scope* pemikiran menyangkut aspek-aspek kemanusiaan. Pada fase lahirnya NW dan NWDI kental dengan nuansa pemikiran dan penyadaran pentingnya merdeka sebagai syarat pertama dan utama berbangsa, diikuti dengan *inner values* yakin, ikhlas, istiqamah, berikut kompak, utuh, bersatu sebagai *collectivity values*, dan tersirat maupun tersurat sejajar dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Evolusi berikutnya terjadi ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Dalam hal pemikiran dan penyadaran kemerdekaan sebagai syarat berbangsa dan beragama masih tetap mewarisi evolusi ini, diperluas pada sasaran dan *benefecieries*-nya, yakni kaum wanita. Kondisi evolusi ini wajar karena

instrumen transmisi pemikiran untuk kesadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagaman itu adalah institusi pendidikan, berbentuk madrasah. Secara universal dan mendasar, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Untuk memenuhi Hamzanwadi keterpenuhan hak dasar dalam hal pendidikan, Hamzanwadi mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita, yang diberi nama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI).

Dua kondisi yang disikapi dengan lahirnya NBDI sebagai habitualitas kontekstual Hamzanwadi; *pertama*, agenda dan akibat politik etik kolonial Belanda, tidak semua kalangan pribumi termasuk wanita memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. *Kedua*, budaya patriarkhi masyarakat Sasak ketika itu menempatkan wanita pada lapis kedua di masyarakat. Habitualitas kontekstual Hamzanwadi, selanjutnya melahirkan pikiran futuristik bahwa wanita juga harus diberikan kesempatan yang sama sebagaimana pria untuk mengenyam pendidikan. Dalam pandangan demokrasi pendidikan, pikiran futuristik ini memenuhi maksud dalam agenda pendidikan untuk semua (*education for all*). Tiga frasa

kunci dalam narasi besar pemikiran dan penyadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagaman oleh Hamzanwadi melalui NBDI. *Pertama*, frasa tujuan pendidikan untuk mencerdaskan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tentang tanggung jawab negara sebagai bangsa, yakni...’mencerdaskan kehidupan bangsa”,....kata “mencerdaskan” dalam konteks ini, dalam tradisi Hermeneutika Kritis bermakna kecerdasan intelektual. Dengan kecerdasan intelektual itulah diharapkan ada kesadaran tentang pentingnya merdeka sebagai suatu bangsa, sehingga dengan kesadaran itu, wanita memiliki kepentingan, cicta-cita, dan tujuan sama dengan pria, yakni terwujudnya Indonesia merdeka, sebagai bangsa Indonesia. *Kedua*, frasa pendidikan sebagai hak dasar manusia, pria dan wanita (*education for all*). Frasa ini menyiratkan pada bagian utuh Pembukaan UUD 1945, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, selanjutnya dikenal sebagai sila ke-2 Pancasila. Pendidikan dihajatkan untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk pada tahap awal kesadaran akan pentingnya merdeka sebagai bangsa, lalu perolehan pendidikan sudah memenuhi aspek hak dasar kemanusiaannya untuk menjadi lebih beradab.

Ketiga, frasa terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi pria dan wanita menyiratkan aspek keadilan bagi seluruh anak bangsa (pria dan wanita). Bagian utuh Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, selanjutnya kita kenal sebagai sila ke-5 Pancasila.

Masa Proklamasi Kemerdekaan

Kajian sejarah dengan pendekatan teks, teks lahir dari konteks, dan teks-konteks bergerak dalam ruang sosial masyarakat pemilik sejarah, dan produk dari ketiganya disebut sebagai kejadian atau fenomena sejarah. Teks NW, NWDI, NBDI yang lahir dari buah pikiran dan kesadaran merdeka sebagai syarat pertama dan utama sebagai bangsa oleh Hamzanwadi, selanjutnya kita sebut sebagai pergerakan, perjuangan, sebagaimana pergerakan dan perjuangan anak bangsa lainnya demi Indonesia merdeka bukanlah sebuah absurditas sebagaimana digambarkan dalam tokoh mitis *Sisyphus* oleh Albert Camus dalam *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (Albert Camus, 1955), atau pemikiran Perang Dunia II (PD II) yang melahirkan kesia-siaan, tetapi pikiran dan kesadaran oleh Hamzanwadi dengan teks, konteks, dan hubungan

teks-konteks dengan masyarakat beserta berbagai proposisi *inner values-collectivity values*-nya membuahkan hasil gemilang, dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tentu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil kerja kolektif seluruh anak bangsa di berbagai belahan bumi Indonesia (sejak 17 Agustus 1945) disebut Indonesia sebagai ganti Hindia Belanda. Karena itu, berita gembira tentang Indonesia Merdeka harus disebarkan kepada siapa saja yang mencita-citakannya. Pikiran penyadaran yang dilakukan Hamzanwadi dalam konteks lokal, yang akhirnya membuahkan hasil pertama: Indonesia Merdeka, merupakan pikiran dan penyadaran menyejarah, sebagaimana Gadamer (1972), "*Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein*" atau kesadaran menyejarah, yakni Hamzanwadi memenuhi tanggung jawab sejarah melalui bergiat mencipta masa depan.

Teks lain sejarah Kemerdekaan Indonesia mencatat, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan menyerahnya pasukan pendudukan tentara Jepang kepada Tentara Sekutu. Teks ini penting untuk konsolidasi berita tentang *de facto* Indonesia

Merdeka. Untuk kepentingan konsolidasi berita *de facto* Indonesia Merdeka, Hamzanwadi menginisiasi tiga agenda: *pertama*, konsolidasi kepada para santri dan pejuang lokal untuk tetap waspada, karena situasi semacam ini dapat menimbulkan berbagai kondisi transisi konteks lokal. *Kedua*, Hamzanwadi menginisiasi pengibaran Bendera Merah Putih sebagai simbol ke-Indonesiaan. Dalam nalar Hermeneutika Kritis, dapat dikatakan, inilah saat pertama kalinya Merah Putih berkibar di tanah Lombok di awal Indonesia Merdeka. *Ketiga*, Hamzanwadi menginisiasi rampasan senjata perang tentara Jepang, yang dikenal dengan Peristiwa Wanasaba dan Peristiwa Kopang, karena di dua tempat inilah tentara Jepang bermarkas. Inisiasi yang dilakukan Hamzanwadi sebagai bentuk konsolidasi *de facto* Indonesia Merdeka adalah tindakan heroik seorang pemimpin perjuangan di medan perang, (perhatikan Film-Film Perang Nasional produksi PPNI, seperti “*Janur Kuning*”, “*Naga Bonar*”, atau Film-Film Perang produksi *Hollywood*, seperti “*Pearl Harbour*”, “*Saving Private Ryan*”, “*Black Hawk Down*”, “*Green Zone*”, dan lain-lain), yang ketika berhasil menumpas musuh, lazim

membagi pasukan menjadi tiga kelompok: kelompok pasukan pertama bertanggung jawab menjaga situasi dan kondisi, serta kirim berita kemenangan kepada komando Pusat; kelompok pasukan kedua bertanggung jawab kibarkan bendera sepanjang wilayah teritori tertentu; dan kelompok pasukan ketiga bertanggungjawab merampas senjata musuh, atau melucuti senjata. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Merdeka, yang kita kenal dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pernyataan pembuka dalam Pembukaan UUD 1945 tentang *“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa...”*.terujud berkat perjuangan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk oleh Hamzanwadi. Barulah agenda-agenda lain sebagai bangsa bisa diwujudkan, seperti berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal, karena syarat pertama dan utama sudah diwujudkan, yakni Indonesia Merdeka.

Fase Proklamasi dan NICA di Lombok

Narasi Sejarah

**Aktor intelektual penyerangan NICA oleh
Laskar Mujahidin dan
Madrasah NWDI/NBDI sebagai tumbal
perjuangan.**

... Pasukan Australia yang ditugaskan Sekutu mendarat di Ampenan, 30 November 1945, mulai beroperasi di Lombok. Para pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berharap pasukan Sekutu akan banyak membantu. Namun, kedatangan tentara Australia yang tugas utamanya melucuti senjata Jepang tidak membawa perubahan lebih baik di Lombok. Justru kedatangan pasukan ini berperan memuluskan langkah Hindia Belanda kembali mencengkramkan kekuasaannya melalui kedok NICA. Pasca kedatangan NICA, kondisi mulai berubah, terutama pasukan Australia meninggalkan Lombok. Maret 1946, Brigade Y atau dikenal dengan Pasukan Gajah Merah NICA memasuki Sunda Kecil, di Bali maupun Lombok. Di Bali, Dewan Raja-raja dan Paruman Agung diakui sebagai kekuasaan yang sah di Bali dan bekerjasama dengan Belanda. Sekaligus menegaskan, kekuasaan militer Belanda di Bali adalah kekuasaan tertinggi dan peraturan-peraturan penguasaan militer harus dipatuhi. Tidak lama kemudian, NICA menguasai Provinsi

Sunda Kecil, Gubernur I Gusti Ketut Pudja ditahan bersama jajarannya, sehingga di bulan yang sama kekuasaan kembali seperti zaman penjajahan Belanda, sebelum Jepang. Bendera Belanda dikibarkan kembali, larangan-larangan kembali diberlakukan. Di sejumlah tempat NICA menarik simpati rakyat dengan cara membagi-bagikan sandang, pangan, permen, dan lain-lainnya kepada rakyat. Sikap NICA ini melahirkan reaksi penolakan. Para tokoh pejuang di Lombok Barat, Lombok Tengah, maupun di Lombok Timur, termasuk Kepala Daerah yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Ketut Pudja, ditangkap NICA. Posisi pejabat pemerintah digantikan dengan tokoh yang dianggap lebih kooperatif. Pasukan Hindia Belanda dalam waktu singkat menguasai daerah-daerah yang diduduki pasukan Australia dengan pasukan Australia dengan pasukan Belanda dan bekas pegawai pamong praja, seperti residen, asisten residen, kontrolir atau jabatan lainnya, bahkan mendirikan tangsi-tangsi militer. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Paska penyerangan ini, Madrasah NWDI dan NBDI dicap sebagai markas gelap pribumi. Sejumlah guru Madrasah ditangkap dan dijeboskan ke dalam penjara. Beberapa diantaranya diungsikan ke daerah lain. TGH. Ahmad Rifa'i Abdul Madjid (adik kandung TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) dijenjarkan di

Ambon, Maluku. TGKH. Muhammad Yusi Muhsin Aminullah dipenjarakan di Praya, Lombok Tengah dan beberapa orang lainnya dikirim ke penjara di Bali. Madrasah NWDI dan NBDI diputuskan untuk ditutup. Setelah situasi berangsur normal akhirnya diizinkan kembali beroperasi. Namun, ancaman dan intimidasi dari pihak NICA bersama kaki tangannya semakin gencar dan langsung ditujukan kepada pribadi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Namun ancamana demi ancaman tidak menyurutkan aktivitas dakwahnya. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

Tahapan-tahapan selanjutnya dalam tradisi sejarah dikenal sebagai *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran, sebagaimana disebutkan oleh Feith dan Castle (eds, 1970), dalam *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Kondisi Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 tidak serta merta dikui oleh pihak Hindia Belanda. Terbukti, Australia sebagai salah satu negara Sekutu dalam PD II, yang bertanggungjawab melucuti tentara Jepang, justru ditumpangi NICA untuk maksud menguasai kembali Indonesia. Jika dianalogikan dengan siklus narasi

sejarah: *Colligation*, *plot*, dan *struktur*, oleh W.H. Walsh (1967) dalam buku: *Philosophy of History: An Introduction*, melalui *Colligation*, *plot*, dan *struktur* memungkinkan kita memahami dua hal sekaligus: *pertama*, bahwa Hamzanwadi terlibat langsung dalam peristiwa heroik penyerbuan NICA 7 Juni 1946, termasuk sebagai aktor intelektual peristiwa tersebut. Peristiwa dan waktu terjadinya terutama koordinasi dan komunikasi penyerbuan di bawah pimpinan Pejuang Rakyat (TGH Faesal) dan Hamzanwadi sejajar dengan koordinasi dan komunikasi antara Letkol Soeharto dan Sri Sultan HB IX pada peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1948. Inisiator serangan tersebut adalah Sri Sultan HB IX dan komandan pasukannya adalah Letkol Soeharto. Dalam konteks ini, siapa yang meragukan keterlibatan Sri Sultan HB IX dalam peristiwa tersebut? Hanya sejarah yang kurang mencatat sebagai teks sejarah. *Kedua*, oleh Hamzanwadi, Madrasah NWDI dan NBDI diposisikan sebagai markas perlawanan, perisai dari serangan NICA, dan tumbal perjuangan. Sebagai markas, semua agenda penyerbuan dirancang dan diorganisir di lingkungan kedua madrasah ini. Sebagai

perisasi, posisi kedua Madrasah ini tidak begitu dicurigai karena agenda yang tampak kasat mata adalah agenda pendidikan Agama Islam. Sebagai tumbal, beberapa santri kedua Madrasah ini ditahan, bahkan saudara kandung Hamzanwadi (TGH Faesal) gugur, dan dimakamkan tidak jauh dari kompleks Madrasah NWDI dan NBDI, yang selanjutnya masyarakat Lombok, NTB mengenal pemakaman TGH Faesal sebagai Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong.

BAB III
KEBANGSAAN INDONESIA DAN PERAN
NAHDLATUL WATHAN

***De Facto* Indonesia Merdeka dan Peran Diplomasi**

Hamzanwadi

Narasi Sejarah

***De Facto* Indonesia, Cikal Bakal NKRI dan Misi Diplomasi Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.**

...Pulau Lombok termasuk satu dari 13 daerah yang tergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Bahkan sistem pemerintahan yang berlaku di daerah lainnya. Sejarah Lombok termasuk dengan para tokoh yang ada tidak lepas dari NIT. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di sela melaksanakan umroh dan haji, mengunjungi Syaikh Hasan al-Mahsyat al-Maliki, salah satu guru utamanya saat belajar di Madrasah ash-Shaulatiah. Selaku guru dan murid, banyak hal yang didiskusikan, termasuk situasi Makkah. Oleh gurunya tersebut TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid diperintahkan tidak berlama-lama di Makkah dan segera kembali ke Lombok, karena tugas lebih mulia membangun bangsa dan negara lebih penting dan mendesak. Kemudian TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melakukan kontak dengan para mukimin Indonesia di Makkah yang saat itu terus menerus menyuarkan protes terhadap Belanda. Jama'ah haji Misi Kehormatan yang diharapkan Hindia Belanda memberikan *political influence*, justru saling dukung dengan

propaganda kedaulatan Republik Indonesia. Saat pulang pimpinan dan jama'ah haji Misi Kehormatan asal Lombok, justru menjadi pembawa pesan dari Makkah ke tanah air. Hal ini juga bisa dilihat dari laporan situasi politik Bali di Lombok. Dilaporkan terjadi aksi propaganda politik di Lombok yang dilakukan eks jama'ah haji Misi Kehormatan yang bertolak ke Makkah September 1947. Propaganda yang dilakukan menyampaikan apa yang dirasakan dan dilakukan para mukimin Indonesia di Hijaz, sehingga menimbulkan gejolak politik di Lombok. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

***Instrumentasi* **Gerakan** **Mengisi**
Kemerdekaan
Wadah Aspirasi Warga Negara Dalam
Ketatanegaraan**

...Langkah awal yang dilakukan kedua tokoh (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan Saleh Sungkar) pasca kekuasaan NICA dan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) adalah mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL). Pada saat berikutnya kedua tokoh ini mendirikan Partai Masyumi cabang Lombok (1949). PUIL menjadi organisasi massa pertama yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebelum mendirikan Nahdlatul Wathan (NW). (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Pasca penyerahan kedaulatan penuh Republik Indonesia dari Pemerintah Hindia Belanda

dalam Konferensi Meja Bundar (1949) situasi politik berubah signifikan: NID dibubarkan dan kembali ke NKRI. Bersama Saleh Sungkar, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bergabung dalam Partai Masyumi. Komponen dan personal PUIL dilebur ke dalam Partai Masyumi. Melalui Masyumi kedua tokoh ini memperjuangkan kebijakan pembatasan pengiriman beras ke luar daerah sebagai bentuk operasi ketahanan pangan kala itu. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Sunda Kecil tidak lepas dari peran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang tercatat sebagai konsulat NU Provinsi Sunda Kecil tahun 1950, sekaligus sebagai pimpinan dewan syuriah NU yang juga tergabung dalam Partai Masyumi. Ketika NU keluar dari partai Masyumi tahun 1952 dan berubah menjadi Partai Nahdlatul Ulama, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memilih untuk tetap bergabung di Partai Masyumi, sementara murid-muridnya yang lain tetap diminta berkhidmat pada Nahdlatul Ulama. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

Hamzanwadi Merefresentasi Negara (Anggota

Delegasi Kehormatan Hajji NIT)

Kembali pada tahapan salah satu tahapan sejarah menurut Feith dan Castle; *internal dialectics*

dan kesinambungan pemikiran, bahwa merdeka menjadi syarat pertama dan utama berlangsungnya proses berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Pada fase ini, walaupun Indonesia sudah merdeka tapi masih mencari bentuk ideal sebagai suatu negara. Kondisi saat ini (1947) masih nuansa negara-negara boneka sebagai bentuk negara oleh Hindia Belanda melalui politik *divide et impera*. Pulau Lombok sebagai salah pulau dalam gugusan Sunda Kecil masuk dalam 13 daerah dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Salah satu agenda untuk menemukan bentuk Indonesia sebagai negara, tokoh-tokoh lokal daerah bagian Negara Indonesia Timur, termasuk Hamzanwadi menyetujui dibubarkan Negara Indonesia Timur (1949), dan menyatakan kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase sebelumnya (sebelum 1949) dimanfaatkan untuk mendeklarasikan NKRI kepada seluruh penjuru dunia, termasuk misi diplomasi pengakuan NKRI yang dilakukan oleh

Hamzanwadi selaku anggota kehormatan haji NIT tahun 1947.

Frasa kunci pada bagian ini adalah kelanjutan pikiran dan kesadaran merdeka sebagai *internal dialects* dan kesinambungan sejarah dalam bentuk mengisi agenda berbangsa Indonesia, yakni meninggalkan bentuk negara peninggalan Hindia Belanda dan menggalang dukungan *de facto* NKRI melalui proses diplomasi. Matra kebangsaan strategis yang dikandung dalam maksud NKRI adalah beberapa pasal dalam UUD 1945; Pasal 1 (1); Pasal 18 (1); Pasal 18 B (1); Pasal 18 B (2); Pasal 25A; dan Pasal 37 (5), (Sekretariat Jenderal MPRRI, 2016). Selain tersurat tentang pasal-pasal dalam UUD 1945, rumusan pasal-pasal tersebut menyiratkan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila, "*Persatuan Indonesia*". "*Persatuan Indonesia*" dalam makna ini dipahami sebagai *unity* dari berbagai perbedaan '*diveristy*' yang mewarnai unsur-unsur pembentuk keindonesiaan: perbedaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Karena itu, selain matra Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila, konteks ini kental dengan matra "*Bhineka Tunggal Ika*" (*unity in diversity*).

Menghimpun Sumber Daya Lokal (Hamzanwadi sebagai Dewan Syuriah PUIL, Masyumi, dan Konsulat NU)

Perjuangan Indonesia merdeka, diplomasi untuk pengakuan, dan mengisinya dengan berbagai agenda pembangunan membutuhkan wadah untuk menghimpun sumber daya lokal yang memiliki cita-cita dan tujuan bersama setelah Indonesia merdeka. PUIL, Masyumi, dan Konstituante adalah wadah pergerakan mengisi kemerdekaan Indonesia untuk berbagai agenda: politik, ideologi, agama, sosial-ekonomi, dan kebudayaan, yang unsur-unsurnya berasal dari tokoh-tokoh pergerakan-perjuangan lokal/daerah. Dapat dipahami keberadaan wadah-wadah tersebut sebagai instrumen gerakan mengisi kemerdekaan Indonesia. Melalui wadah-wadah tersebut, para tokoh pejuang pergerakan daerah/lokal menyampaikan aspirasinya untuk berbagai agenda mengisi kemerdekaan Indonesia dalam satu sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fakta sejarah ini, matra kebangsaan strategis yang ditawarkan Hamzanwadi sebagai representasi NW, NWDI, NBDI

dan salah seorang tokoh perjuangan pergerakan dari daerah adalah “Persatuan Indonesia”. “*Persatuan Indonesia*” dalam maksud ini adalah satu cita-cita, yakni mengisi Indonesia merdeka dengan agenda-agenda kebangsaan, karena hal yang sama juga sedang digerakkan oleh putra-putra Indonesia dari daerah lain di Indonesia. Sebagai wadah instrumen ide dan gagasan mengisi kemerdekaan Indonesia, agenda Hamzanwadi menyiratkan matra “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, yang tidak memungkinkan seluruh rakyat untuk menyampaikan ide dan gagasan mengisi kemerdekaan hadir bersama dalam satu proses pengambilan keputusan. Karena itu dibutuhkan sistem perwakilan. Selanjutnya, perwakilan-perwakilan masing-masing daerah memiliki berbagai perbedaan, tetapi perbedaan itu diikat oleh satu agenda, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, matra kebangsaan strategis dalam konteks sejarah ini adalah “*Bhineka Tunggal Ika*” dengan makna “berbeda-beda, satu tujuan”.

Posisi NW sebagai Aset Bangsa dan Wadah

Perjuangan Mengisi Kemerdekaan

Narasi Sejarah

Wadah Perjuangan Dan Pergerakan Masyarakat Menurut Legalitas Negara.

...Organisasi nahdlatul wathan yang selanjutnya disingkat nw, merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah islamiyah. didirikan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1327 H., bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 M, dideklarasikan di Pancor, dihadiri pejabat pemerintah daerah Lombok, pimpinan partai Masyumi daerah Lombok, pengurus-pengurus cabang madrasah NWDI dan NBDI se Pulau Lombok, dan para alumni dan santri madrasah NWDI dan NBDI. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Pendirian NW sebagai fase lanjutan bagi perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sebagai sebuah pembentukan identitas dan ideologi kolektif. Secara ideologi dan filosofis, nama ini sama dengan nama madrasah yang didirikan, yakni Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Melalui organisasi ini, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menunjukkan bentuk dan upaya penyatuan (unity) terhadap common sense masyarakat Islam Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga

sebagai visi futuristik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam meletakkan konteks perjuangan pada level nasional, dari Lombok untuk Indonesia. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Organisasi NW mendapatkan legalitas yuridis berdasarkan akte Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan Notaris Pembantu, Hendrix Alexander Malada di Mataram. Wilayah yuridiksinya hanya di pulau Lombok, sehingga pada tahap berikutnya, 25 Juli 1960 dibuat akte Nomor 50, di hadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta. Termasuk memproses pengakuan dan penetapan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960, dan dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Paska proses legalitas yang disempurnakan ini, Nahdlatul Wathan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengembangkan organisasinya ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejak itu, mulai terbentuk Pengurus Wilayah NW sejumlah Provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan lainnya. Proses penyesuaian legalitas kembali dilakukan dengan terbitnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan. (Sumber: Dinsos NTB, 2017).

...Latar belakang berdirinya NW adalah karena melihat pertumbuhan dan perkembangan cabang-cabang madrasah NWDI dan NBDI begitu pesat, di samping perkembangan aktivitas sosial lainnya, seperti majlis dakwah, majlis ta'lim, dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu wadah atau organisasi yang mewadahi dan mengorganisir segala macam bentuk kebutuhan dan keperluan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut secara profesional. Organisasi NW menganut faham aqidah Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah 'ala Madzahib al-Imam al-Syafi'i dan berasaskan Pancasila sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985. Sejak awal berdirinya, organisasi berasaskan Islam dan kekeluargaan. Asasnya berlaku hingga Muktamar ke-3, dan kemudian diganti dengan Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah ala madzahib al-Imam al-Syafi'i. Perubahan ini terjadi mengingat khittah perjuangan kedua madrasah induk, NWDI dan NBDI. Organisasi NW merupakan organisasi kader, yang memiliki badan-badan otonom sebagai wahana pengkaderan bagi kader-kader organisasi di masa depan. Badan-badan otonom tersebut terdiri dari:

1. Muslimat Nahdlatul Wathan (Muslimat NW).
2. Pemuda Nahdlatul Wathan (Pemuda NW).
3. Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW).
4. Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW).
5. Persatuan Guru Nahdlatul Wathan (PGNW)

6. Jami'atul Qura' wal Huffazh Nahdlatul Wathan.
7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan (ISNW).
8. Ikatan Puteri Nahdlatul Wathan (Nahdliyat NW), dan
9. Badan Pengkajian, Peneragan, dan Pengembangan Masyarakat Nahdlatul Wathan (BP3M). (Khirjan, 2013).

...Kiprah NW berada pada 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Pendidikan, Sosial, dan Dakwah. Hal ini sesuai dengan perumusan hasil Mukhtamar Nahdlatul Wathan ke-4, pada tanggal 12 Agustus 1963, dan tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada BAB I ayat 3.

a. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan basis pertama dari gerakan Nahdlatul Wathan. Hal ini dapat dilihat dari upaya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam membentuk kader-kader NW yang mempunyai basis keilmuan yang seimbang antara ilmu agama dan pengetahuan umum.

- b. Pada bidang sosial, NW berupaya untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat dengan kerja-kerja sosial. Kerja-kerja tersebut merupakan respon terhadap problem-problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengimplementasikan konsep aktivitas

- sosial yang berbasis community development (Pengembangan Masyarakat).
- c. Di bidang dakwah islamiyah, NW memiliki komitmen yang kuat untuk mengajak masyarakat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Program dakwah ini diimplementasikan dengan adanya majelis dakwah yang langsung dipimpin oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan majelis ta'lim yang dipimpin oleh para Tuan Guru, ustadz-ustadzah NW (Khirjan, 2013).

Dokumentasi Ide/Pikiran dalam karya sebagai medium konstruksi nilai kebangsaan:

- a. *Script* Majelis Pengajian
Rekaman Pengajian Tahun 1970-an

Terjemahan bebas (Bahasa Indonesia) versi peneliti:

“Kedudukan Undang-Undang Dasar itu berada pada posisi paling tinggi, seakan-akan al-Quran. Supaya kita paham, sebab sebagian orang sengaja membiarkan kita tidak paham, tidak mau menjelaskan hal-hal seperti ini. Setelah Undang-Undang Dasar, dikenal Undang-Undang yang dirancang dan buat oleh DPR Pusat bersama Pemerintah. Undang-Undang ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun rakyat Indonesia, baik beragama Islam atau yang lainnya. Selain

Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat oleh Presiden bersama para menteri. Keberadaan PP ini laksana hukum fiqih. Selanjutnya, siapa berani melanggar ajaran al-Quran? Siapa berani melanggar ketentuan hadist? Siapa berani melanggar Fiqih dan ijma' ulama? Quran, hadist, fiqih, dan ijma' ulama tidak boleh dilanggar, demikian pula seluruh warga negara tidak boleh melanggar UUD, UU, dan PP. Termasuk asas pelaksanaan pemilihan umum sudah tertera dalam Undang-Undang, yang dikenal sebagai LUBER: langsung, umum, bebas, rahasia. Maka itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak, dan hasil paksaan itu tidak sah. "tidak ada paksaan dalam agama", sebagaimana dikatakan Pak Adam Malik, "terserah pilihan Anda". Tegak memegang UUD, UU, PP oleh Bapak Presiden, sebagaimana diajarkan kepada kita semua. Maka itu, kita tidak boleh melanggar semuanya, seperti halnya kita tidak boleh melanggar ajaran Quran, Hadist, Fiqih, dan Ijma' para ulama. Selanjutnya, tadi UUD iitu seakan-akan Quran, lalu ada yang bertanya, apa yang jadi fatihahnya. Pancasila itulah diibaratkan sebagai bacaan fatihah. UUD itu dibuka oleh Pancasila, karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 yang pertama kali diterakan adalah rumusan Pancasila. Keseluruhannya (UUD, UU, PP) menjadi satu kesatuan yang saling mendukung,

mengacu, dan melengkapi, satu sama lain tidak boleh berlawanan. Demikian pula, warga negara tidak boleh melanggarnya. Melanggarnya berarti melawan pemerintah. Bedakan antara partai dan pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah. Kalau partai, ya pertikelir, seperti Golkar, PDI, Parmusi, Perti, dan lain-lainnya. Jadi, kita tidak boleh melawan pemerintah, tapi kita bebas memilih partai. Jadi, saya kira Anda semua sudah paham. Sebagaimana pelaksanaan pemilu, tidak ada yang boleh memaksa, termasuk aparat pemerintah.

.....Selanjutnya, siapa pemimpin itu? pemimpin itu adalah Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Apakah semua yang beriman? Tidak! Pemimpin adalah orang beriman yang husyuk dalam ibadahnya. Dan seterusnya....

b. Doa dan hizib

“...berilah hidayah kepada bangsa kami melalui putera putri kami/ ulama’ Nahdlatul Wathan yang laksana bintang menjadi petunjuk (bagi penduduk bumi), dan subur makmurkan Negara kami dengan ilmu pengetahuan putra putri Nahdlatul Wathan, bagikan air (menyuburkan permukaan bumi)....”

“...sayangi dan rahmatilah kami, tutupi (dosa dan aib) kami, tolonglah kami, berikanlah hidayah kepada kami, jadikanlah (tubuh) kami sehat dan afiat, ampunilah kami, anugerahkan rizki kepada kami, dan

(limpahkanlah) bekah kepada kami, angkatlah derajat Negara kami melalui Nahdlatul Wathan ke tingkat kemajuan, kesejahteraan, dan hidayah setinggi langit dengan penuh keamanan, perhatian dan perlindungan-Mu....”

“...terangilah (berilah hidayah kepada para penduduk) Negara kami dengan (putra-putri/ulama) Nahdlatul Wathan yang laksana bintang-kemintang memancarkan sinar....”

c. Shalawat Nahdlatul Wathan.

“...ya Allah, dengan kebenaran, (firman-Mu) limpahkan shalawat (rahmat) dan salam serta bekah-Mu kepada pemimpin kami nabi Muhammad yang ummi dan terpercaya, kepada para nabi dan rasul, serta keluarga dan sahabat mereka. Juga kepada kami, para anggota (pengikut) organisasi Nahdlatul Wathan dan kaum muslimin akan selalu bersama mereka berkat kerajaan (kekuasaan)-Mu yang abadi, ya Allah Tuhan Pemilik, dan pemelihara semesta alam. (Ya Allah). Kibarkan dan jagalah panji-panji (organisasi) Nahdlatul Wathan sepanjang zaman diseluruh penjuru alam, dan jadikanlah aku, keturunanku, dan para pencinta menjadi mujahidin (orang-orang berjuang dijalan allah melalui peperangan membela agama dan Negar, termauk pendidikan sebagai jihad akbar) yang mukhlisin (setia), mahfuzin (tepelihara), khawash, arifin, dan muqarrabin....”

d. Karya sastra/wasiat

“...Negara kita berpancasila
Berketuhanan Yang Maha Esa
Ummat Islam paling setia
Tegakkan sila paling utama

Yang Maha Esa adalah satu
Mustahil berbilang mustahil berpadu
Dengan dalil Quran yang satu
Surat Al-Ihlahash tempatnya jitu

Sasak yang tulen Nasionalisnya
Selalu dituduh sukuisme-nya
Sungguh penuduhlah sukuisme buta
Penuh buktinya di sini di sana

NTB mengharap pemerataan
Keadilan sejati dan kebenaran
Agar mertalah kemakmuran
Di tanah-air ciptaan Tuhan

Nahdlatul Wathan modal utama
Bagi NTB dan sasak semua
Karena lahirnya di zaman Belanda
Sebagai madrasah sumber agama

Perlu dijaga bersama-sama
Selaku andil utama kita
Tegakkan iman tegakkan taqwa
Di negara mereka berpancasila

NTB mengharap pemerataan
Keadilan sejati dan kebenaran

Agar meratalah kemakmuran
Di tanah-air ciptaan Tuhan

Aduh sayang!
Pelita NTB bertambah terangnya
Karena NW lahir padanya
Berpartisipai dengan megahnya
Membela Agama Nusa dan Bangsa

Aduh sayang!
Siarkan hizib ampai merata
Agar banyaklah pendo'a kita
Mendo'a Negara, Nusa dan Bangsa
Mendo'a Islam se Nusantara

Aduh sayang!
Kaum wanita tetap wanita
Sekalipun S.H. dan DOKTORANDA
Wajib berjuang dengan pelita
Membela Agama, Nusa dan Bangsa....”

e. Nasyid
“...Wahai pancor, Engkaulah negeriku
Engkau-lah lambang ksempurnaan
Setiap orang bekunjung padamu
Berziarah untuk memperoleh barakah
!wahai bagsaku, bagkitlah ! jangan terlena
! dan berjagalalah sepanjang malam
Oh negeriku, jiwaku adalah tebusan bagimu
Dari setiap kesesatan
Wahai umat islam, syukurilah segala nikmat
Allah

Sesungguhnya kalian adalah ahli-ahli
kebajikan
Tetapkanlah keperkasaan itu
Untuk mencapai cita dan kemenangan
Inilah Madrasah nan jaya, lambang
kesempurnaan
Tiap orang yang memenuhi panggilanya....”

“...marilah nyanyikan nasyid kita
Hai pemuda Sasak Indonesia
Sampaikanlah siang dan malam
Bahwa kita adalah saudara yang sejati
Semua kita taat kepada panji
Maka minta perlindungan dan pertolongan
Dengan menghidupkan HIZIB kita
Janganlah janganlah janganlah janganlah
kita bosan
Siapa saja yang bercita-cita mencapai
ketinggian
Ia tidak akan pernah takut terhadap musuh-
musuh
Indonesia...
Engkau-lah simbol persatuan
Hai jiwa dan ragati
Sasak adalah bagian dari Indonesia
Majulah kedepan jangan kau perdulikan
Jiwa dan ragaku adalah tebusan bagimu
(Wahai Indonesia)
Jiwa dan ragaku adalah tebusan bagimu
(Wahai Indoneia)....”

“...bersinarlah perayaan (HULTAH) kami

Maka nampaklah teranglah ia seperti sinar matahari
Dengan sinar orang-orang
Yang mempunyai keutamaan dan ahli dalam berdakwah
Kami memanggil mereka
Maka mereka menjawab panggilan kami
Kebiasaan orang yang mulia, (yaitu)
Apabila dipanggil untuk suatu kemuliaan,
Maka mereka gembira selamanya
Maka kami ucapkan selamat datang
Dengan kehadiran kalian
Marilah kita menuju matahari petunjuk
Sehingga hati kami selalu teringat pada kalian
Maka bejalanlah kalian dengan penuh rasa hormat
Maka lisan kami tidak mampu untuk menggambarkan apa yang membahagiakan kami
Akan tetapi kalianlah yang membuat kami bahagia dan kebahagiaan itu tidak akan ada Kecuali dengan kehadiran kalian
Kalian semua menyinari kebun kami dengan air
Seingga semua dahan nampak hijau
Pergerakan kita dalam Nahdlatul Wathan (Pegerakan Tanah Air)
Bertujuan untuk menyebarkan ilmu sepanjang masa
Dengan mendirikan madrasah dan pondok
Yang menyinari Negara tanpa lelah
Qur'an selalu menjadi pegangan kami
Begitu juga Hadits Nabi yang mulia

Marilah bergabung dengan kami
Wahai warga NTB untuk memperoleh
ketinggian
Wahai anak-anak bagsaku....”

“...kami benihan Nahdlatul Wathan yang
setia
Mengorbankan jiwa membela Nusa dan
bangsa
Agar umat seluruh bersatu raga
Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan
durhaka
Teguhkan hati janganlah mundur walau
setapak kaki
Serta tulus ihlas kepada Tuhan
Jangan tinggi karena puji
Marikita lenyapkan
Agar Nahdlatul Wathan yang perwira
Hidup makmur serta jaya
Dalam aman sentosa....”

f. Bai’at (komitmen berorganisasi)

“...saya berjanji akan tetap bertaqwa kepada
Allah dan Rasul-nya, serta memegang erat
“Pokonya NW Pokok NW Iman dan
Taqwa”.

Saya berjanji akan tetap berbakti kepada ibu
bapak dan guru.

Saya berjanji akan tetap berpegang teguh
dan mengamalkan ajaran agama islam
Ahlussunah wal Jama’ah ‘Ala Mazhabil
Imamis Syafi’I melalui Nahdlatul Wathan
dimana saja berada.

Saya berjanji akan tetap mengembangkan Organisasi Nahdlatul Wathan Melalui Pendidikan dan sosial Dakwahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dalam Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berjanji akan memesankan anak cucu dan keluarga saya utuk terus mewarisi Nahdlatul Wathan dimana saja mereka berada.
Demikian Iqrar dan Bai'at. Semoga Allah Mengabulkannya....”

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

NW sebagai Aset Negara-Bangsa

Bulan Mei 2016, pada acara sarasehan penyiapan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Hamzanwadi, mengacu narasi sejarah *Colligation, plot, dan struktur*, oleh W.H. Walsh, penulis/peneliti sebagai pemandu acara tersebut menyampaikan pengantar, “berdiskusi tentang Nahdlatul Wathan, tentu berdiskusi tentang Hamzanwadi sebagai tokoh sentral pada fase sejarah awal, perubahan, dan pengembangannya, sesungguhnya kita sedang berdiskusi tentang kebangsaan Indonesia”. Pernyataan pengantar di atas cukup beralasan mengingat cita-cita NW pada fase

awal sejalan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia merdeka, lalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berikut mengisinya dengan agenda-agenda pembangunan pada fase perubahan dan pengembangan. Terjadi semacam linieritas dalam cita-cita dan agenda antara Indonesia sebagai bangsa dan NW sebagai organisasi pergerakan kebangsaan. Acuan dokumentatif yang dapat memperkuat argumentasi tersebut bahwa NW, berikutnya NWDI, dan NBDI lahir sebagai organisasi/wadah perjuangan masyarakat Lombok NTB untuk bangsa, negara, dan agama mengakomodasi konteks lokal sejalan dengan konteks negara dan berada dalam lingkup Negara Kesatuan republik Indonesia. Matra strategis dalam fase sejarah ini adalah mengakomodasi berbagai perbedaan dengan satu tujuan, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*”, dan dalam satu wadah negara Kesatuan Indonesia, “*Persatuan Indonesia*”. Proses penyatuan pikiran yang berbeda-beda tersebut memerlukan proses permusyawaratan melalui organisasi NW, “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”. Mengingat wadah NW adalah wadah menghimpun

agenda-agenda perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia, sangatlah tepat jika NW menjadi bagian aset penting negara dan bangsa Indonesia. Diresmikannya NW sebagai organisasi massa tahun 1953 berdasarkan ketentuan legalitas di tingkat negara berarti negara memenuhi tanggung jawab melegalkan aset negara untuk kepentingan kebangsaan.

Peran NW dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Narasi Sejarah

Memperkuat strategi pengkhidmatan terhadap agama dan negara (islam dan kebangsaan).

Peran katalis warga negara dalam pembangunan nasional.

“...dalam kedudukanya sebagai dewan pertimbangan MUI, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara ummat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan Nasional dan meningkatkan hubungan serta kerjasama antar orgnisasi, lembaga islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya ummat

Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik....”

“...salah satu kontribusi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ketika menjadi anggota Dewan Pertimbangan MUI adalah ikut memberikan pandangan saat MUI mengeluarkan fatwa tahun 1979, mengenai keharaman praktek vasektomi dan tubektomi, sebab keduanya dianggap sebagai hal yang menentang anugrah Allah SWT. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tercatat sebagai penasehat pengurus MUI pusat, jabatan ini diemban selama dua periode, yakni sejak tahun 1971-1982....”

“...pada tahun 1955 TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante, bersama TGKH. Hafidz Sulaiman, Kediri Lombok Barat. Keduanya mewakili Partazi Masyumi dari Provinsi sundaz kecil. Selama menjadi anggota Konstituante, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di bandung, Jawa Barat....”

“...sebelum era TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sistem pendidikan Islam di Lombok masih bersifat tradisional, yakni dengan gelaran pengajian-pengajian di langgar-langgar dan

masjid-masjid. Padahal, dalam kelompok pembelajar yang umumnya disebut sistem halaqah ini terjadi dari kelompo-kelompok murid yang mempunyai perbedaan umur, pengetahuan, dan aspek lain yang mencolok. Semua murid mengelilingi guru dengan pelajaran yang sama untuk semua umur, tiada kurikulum, tiada batasan umur, lama belajar atau tingkat pengetahuan....”

“...materi yang dipelajari juga berkisar pada belajar membaca al-Qur’an dan tidak menekankan membaca al-Qur’an secara hukum-hukum bacaan (tajwid), sehingga teknik melantunkan ayat-ayat al-Qur’an berbeda-beda antara tempat belajar yang satu dengan yang lainnya. Halaqah tradisional juga mempelajari hadis, serta pemahaman fikih dengan refrensi kitab-kitab berbahasa Melayu maupun bahasa Arab. Pendidikan keagamaan di Lombok mengalami sedikit kemajuan akhir abad XIX dengan adanya pusat seperti di Batu Bangka Sakra Lombok Timur dibawah pimpinan Guru Bangkol, di Sesela Lombok Barat di bawah pimpinan Tuan Haji Amin, di Sekarbela Lombok Barat di Bawah pimpinan Tuan Guru Haji Mustafa....”

“...TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan salah satu pioner integrassi ilmu umum dan agama. Pemikiran untuk mengembangkan

kemampuan dibidang ilmu umum sejak awal dijadikan sebagai kebijakan dalam lembaga pendidikan yang dikelola. Ada dua respon NW terhadap modernisasi pendidikan, yaitu: pertama merevisi kurikulumnya dengan memperbanyak mata pelajaran umum atau keterampilan umum; kedua membuka lembaga-lembaga berikut failitas-fasilitas pendidikanya untuk kepentinga umum....”

“...adanya kebijakan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ini juga dilatarbelakangi krisis ekonomi di Indonesia, termasuk di NTB era 1960-an. Kemudian madrasah-madrasah NW memberikan kursus-kursus keterampilan dalam bidang pertanian, menjahit, perkoperasian, perbengkelan dan sebagainya. Tujuanya agar santri memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu....”

“...pembaruan ini direspon mayarakat dengan kian banyaknya jumlah santri yang bersekolah di madrasah NW. Tidak cukup hanya dengan eksperimen di madrasah yang sudah ada, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional. Dalam merespon kebutuhan dan perkembangan zaman, berbagai perubahan dilakukan, salah satunya dalam kurikulum yang ditetapkan di madrasah....”

“...ajaran islam sering distreotipkan negatif dalam hal diskursus gender. Namun, bagi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, hal ini sudah selesai sejak awal. Dalam berbagai hal, laki-laki dan perempuan boleh saja berbeda peran, termasuk dalam rumah tangga. Tetapi dalam soal akses pendidikan tidak harus demikian. Justru harus ada kesetaraan dalam soal akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Pandangan ini juga menjadi dasar TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah yang dikhususkan sebagai lembaga pendidikan kaum perempuan...”

“...Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah (NBDI) sebagai lembaga pendidikan formal khusus perempuan, didirikan 15 Rabi’ul Awwal 1362 H/ 21 April 1943 M. Saat masih bebentuk halaqah di Pesantren Al-Mujahidin, kaum perempuan juga mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Inisiatif berdirinya NBDI bermula dari keinginan salah seorang dari isteri TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bernama Hajjah Rahmah yang berkeinginan untuk ikut belajar. Sebagaimana ungkapan Hamzanwadi dalam kuliahnya didepan santri-santrinya, belio mengungkapkan penyebab saya mendirikan NBDI, yaitu dulu Ummi kalian Hajjah Rahmah berkeinginan untuk diajar sebagaimana

Ummi kalian yang lain. Terus saya inginkan dan saya ajar sedikit demi sedikit. Dari sanalah saya berinisiatif untuk mendirikan sekolah bagi wanita (NBDI)....”

“...untuk melengkapi pendidikan dilingkungan NWDI dan NBDI didirikan Perguruan Tingkat Tinggi, yaitu Akademi paedagogik yang resmi didirikan pada tahun 1964, dan pada tahun 1965 dibuka perguruan tinggi non formal yang khusus mengkaji kitab-kitab klasik ataupun modern, yaitu Ma’had Darul Qur’an wal Hadits al-Majidiyah asy-Syafi’iyah yang diperuntukkan untuk laki-laki, menyusul 9 tahun kemudian berdirilah Ma’ad Darul Qur’an wal Hadits untuk perempuan. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan Universitas Hamzanwadi dan menjadi rektor pada lembaga yang didirikannya tersebut pada tahun 1977....”

“...Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang terpapar Program Keluarga Berencana (KB) pada repelita II. Saat pertama kali menjalankan program di Lombok, pemerintah cenderung berjalan sendiri sehingga tidak membuahkan hasil yang signifikan. Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 103.683, hanya 12.906 yang mengikuti program KB atau dengan prevalensi/1000 PUS hanya 124,47. Masyarakat Lombok masih menganggap

tabu Program KB, belum lagi adanya pandangan tokoh agama yang menganggap program ini tidak sesuai dengan ajaran agama. bahkan, prinsip yang selama ini diajarkan dianuti masyarakat, yakni banyak anak banyak rejeki seperti yang juga dipercaya umat Islam pada umumnya, dan para tokoh agama. Kondisi ini akhirnya mendapat perhatian dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, barulah diawal era 1980-an ikut juga mengkampanyekan KB....”

“...Bersama para muridnya yang sudah banyak menjadi tuan guru mengelola pondok pesanteren, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bahu membahu ikut dalam kampanye KB ini. Sejak itu Program KB mulai menunjukkan hasil yang signifikan sehingga terus menjadi program yang dilembagakan dalam rencana pembangunan daerah setempat....”

“...keberhasilan program KB TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ini turun tangan, berdasarkan hasil laporan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB tahun 1986. Program peningkatan safari ke ponpes untuk pelayanan massal bersama para tuan guru terus diintensifkan, termasuk pelibatan guru dan promosi ke generasi muda. Dari upaya ini, target 300 ribu akseptor bisa mencapai 84 persen atau 223.065 PUS yang ada di Pulau Lombok....”

“...kesaksian bagaimana kiprah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam mendukung kesuksesan Program KB juga diakui Haryono Suyono. Dalam artikel khusus membahas peran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mengenai program KB, Suyono mengemukakan bahwa TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan tipikal ulama yang berpikiran maju, dan menyakini bahwa agama Islam menjamin hak-hak wanita dengan memberikan kedudukan mulia terhadap wanita, maka Program KB sangat menaruh perhatian terhadap dukungan tuan guru yang kharismatik tersebut....”

“...maka ketika Program KB diterapkan di NTB, pemimpin dan para petugas KB diinstruksikan untuk meminta bantuan Tuan Guru agar program ini mendapat respon positif. Di bagian akhir kesaksiannya, Suyono mengatakan bahwa TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan pelopor yang berani dan percaya. Ketika Program KB mencari basis dukungannya, beliau secara pribadi menyiapkan diri menjadi ploprior yang terpercaya dan berdiri paling depan dalam membangun keluarga yang sejahtera. Tidak hanya Haryono Suryono, Kevin W. Fogg menilai, peran dan sikap TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam program KB ini merupakan hal yang berbeda dari sikap ulama maupun organisasi

Islam di luar Jawa dan Madura. Bahkan, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan NW, menjadi satu-satunya ulama dan organisasi islam di pulau jawa (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) yang berperan aktif dalam mensukseskan KB yang berdampak pada peningkatan indeks Pembangunan Manusia...”

“...imunisasi bagi balita merupakan salah satu upaya mengurangi angka kematian balita dan anak yang cukup tinggi di Pulau Lombok. Namun, saat implementasinya dimulai, masyarakat khawatir dampak imunisasi yang dianggap negatif, disamping isu-isu lain yang berkembang seperti soal status halal-haram dari vaksin yang diberikan ke bayi. Pandangan ini juga diperparah oleh adanya pandangan agama yang keliru. Sebab, setiap orang tua yang memiliki balita kemudian meninggal dunia, maka balita dan orang tuanya dipastikan masuk surga...”

“...dalam konteks inilah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ikut berjiwaku, bahkan dalam banyak kesempatan turun tangan memberikan vaksin imunisasi kepada anak-anak diberbagai tempat penyelenggaraan pengajian. Atas anjuran dan dukungan ini, masyarakat mulai menerima imunisasi kepada balita di Lombok dan semakin terbuka dan diterima. Pehatian TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam bidang kesehatan

cukup tinggi. Tidak hanya terlibat dalam program KB, tetapi juga ikut mengkampanyekan penggunaan garam beryodium....”

“...soal kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok jadi soal utama. Di Pulau Jawa yang hanya 7% dari wilayah Indonesia ditempati 60% penduduk, sedangkan Sumatera hanya ditempati 80 jiwa per Km, bahkan Papua hanya dihuni 6 jiwa per Km. Padahal daerah-daerah ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang sangat besar. Dari konsep inilah kemudian dilaksanakan program transmigrasi....”

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

Hamzanwadi: Dialektika Ulama-Umara

Kembali mengacu pada rangkaian sejarah sebagai teks naratif menurut Walsh, pada *colligation* yang membangun *inner connection* antara ilmu keagamaan (Islam) yang dipelajari Hamzanwadi di Madrasah *ash-Shaulatiah* yang menjadikannya sebagai ulama dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin (umara). Terdapat hubungan antara dua kompetensi berbeda, namun keduanya berkaitan dalam

bentuk saling mereferensi dalam membangun dua kapasitas pada satu personalitas Hamzanwadi. Lalu terdapat juga *inner connection* antara jaringan ilmu di Madrasah *ash-Shaulatiyah* dengan kondisi di Indonesia pada saat bersamaan. Dua *inner connection* ini membantu kita memahami lebih jauh penjelasan Azyumardi Azra (1994) “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII”, yang generasinya sampai pada sosok Hamzanwadi di Lombok. Piranti sejarah yang penting dipahami adalah latar belakang para ulama Timur Tengah masa itu dan kondisi Indonesia yang menuntut para ulama juga terjun dalam agenda-agenda kebangsaan. Inner connection itulah yang mengharuskan Hamzanwadi mengambil peran sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kurun waktu 1971-1982. Pada saat bersamaan, Hamzanwadi juga sebagai Anggota Konstituante MPR RI. Jelas tergambar bahwa ada tanggung jawab ganda yang diperankan Hamzanwadi, sebagai ulama sekaligus umara. Tentu kedua peran tersebut tidak semata untuk simbol sosial, namun substansi tanggung jawab sejarah yang melingkupinya. Dipahami bahwa peran ganda

sebagai ulama dan umara oleh Hamzanwadi dalam rangka memperkuat pengkhidmatan terhadap bangsa, negara, dan agama. Melalui peran ganda tersebut, Hamzanwadi dapat memainkan fungsi-fungsi katalis masyarakat yang diwakilinya dalam konteks pembangunan nasional.

Satu pembuktian atas peran ganda ulama dan umara oleh Hamzanwadi, bahwa dalam majelis-majelis taklim yang difasilitasinya, selain menyampaikan substansi ajaran dan praktek keislaman, Hamzanwadi juga menyampaikan substansi ketatanegaraan. Hamzanwadi melakukan *content knowledge transmission* tentang relasi hirarkis beberapa dokumen legal negara sebagai bagian tidak terpisahkan dari matra UUD 1945. Sebagai contoh, pidato Hamzanwadi pada satu majelis ta'lim tahun 1970-an, yang intinya adalah “tanggung jawab seorang pemimpin (pemimpin negara) dengan berbagai persyaratan, proses pemilihan, dan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhinya. Pada data kajian ini tergambar dengan jelas relasi hirarkis antara UUD 1945 sebagai hukum dasar, Undang- Undang-Undang (UU) sebagai turunannya, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah (PP)

sebagai petunjuk tekninya. Sebagai ulama, tentu kiprah Hamzanwadi sudah sangat jelas sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content*, sedangkan kiprah sebagai umara dapat ditelusuri pada agenda-agenda pembangunan di era pemerintahan ketika Hamzanwadi mengemban peran ganda tersebut.

NW, NWDI, NBDI dan Kontekstualisasi Dinamika Sejarah Bangsa

Sejarah adalah teks, konteks, dan hubungannya dengan masyarakat dalam proses menyejarah. Menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, penyadaran, dan melaksanakan agena kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Untuk memenuhi dinamika dan kontinuitas tersebut, Hamzanwadi melakukan dinamisasi struktural dan kultural. Secara struktural, organisasi NW dikonstruksi mengikuti kebutuhan kontekstual pembangunan, sesuai misi pendidikan, sosial, dakwah Islam, dan pengembangan ekonomi ummat. Unit-unit

kerja yang berada di bawah koordinasi NW dibentuk untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian misi pendidikan melalui sekolah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga kursus vokasi. Untuk pencapaian misi dakwah, dibentuk lembaga dakwah dan lembaga kajian keislaman. Untuk mendukung pencapaian misi sosial, dibentuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bersifat *carity* kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk pengembangan misi ekonomi, dibentuk beberapa lembaga keuangan mikro, dan biro-biro layanan ekonomi lain. Secara kultural, Hamzanwadi menginisiasi penyesuaian pada semua capaian misi, bidang kerja, dan uni kerja. Unit kerja pendidikan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Unit kerja bidang sosial disesuaikan dengan substansi kerja-kerja bidang sosial kemasyarakatan. Unit kerja bidang pengembangan ekonomi juga disesuaikan dengan substansi agenda pembangunan bidang ekonomi.

Jika boleh menamabah atribut pada personalitas Hamzanwadi, selain sebagai “bapak Madrasah dan “tokoh masjid” karena Hamzanwadi mendorong

pendirian dan membina banyak madrasah, menginisiasi pendirian masjid dan mengisinya dengan majelis-majelis pengajian, beliau layak digelari beberapa atribut lain. Hamzanwadi layak disebut sebagai bapak “modernisasi pendidikan”, karena melakukan perubahan dan penyesuaian mendasar terhadap bentuk dan sistem pendidikan di tingkat lokal sesuai kebutuhan nasional. Hamzanwadi layak disebut sebagai “pelopor kesejahteraan keluarga dan kesehatan anak”, karena Hamzanwadi satu-satunya ulama yang memberikan fatwa *syar’i* untuk program Keluarga Berencana dan imunisasi, dan NW menjadi salah satu penggerak penting di NTB. Hamzanwadi juga sangat layak digelari “Tokoh Transmigrasi, Intensifikasi-Ekstensifikasi Pertanian”, karena Hamzanwadi melalui majelis-majelis pengajian terus mendorong pemerataan kesejahteraan melalui program transmigrasi, serta menggiatkan pola pertanian dengan sistem gogorancan. Agenda-agenda penyesuaian struktural dan kultural yang dilakukan Hamzanwadi tidak lain hanya untuk memenuhi hajat dalam Pembukaan UUD 1945, “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, cerdas spiritual, cerdas akademis, cerdas sosial, cerdas

ekonomi, dan cerdas budaya. Jika seluruh aspek kecerdasan terpenuhi, barulah kita sebagai bangsa menjadi bangsa berkebangsaan yang memenuhi matra *“kemanusiaan yang adil dan beradab”* dalam rangka *“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*, karena matra-matra kebangsaan yang dipenuhi mencakup seluruh elemen bangsa; anak-anak, remaja, dewasa, pranata keluarga, pria-wanita, tidak terlupakan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus.

BAB IV
KEBANGSAAN INDONESIA DAN NAHDLATUL
WATHAN
MENJAWAB SEJARAH

**NW Menjawab dan Melanjutkan Sejarah
Kebangsaan**

Narasi Sejarah

**Politik dan Kiyai, Dari NW untuk
Indonesia**

Politik dan kyai dalam konteks kajian ini mengacu pada kiprah dua sentral figur NW pada generasi sejarah berbeda.

Maulanasyaikh pada sejarah sebelumnya dan TGB pada sejarah berikutnya. Data sejarah kajian ini dibatasi pada kiprah politik TBG mengingat konteksnya berbeda dengan konteks yang melingkupi proses politik Maulanasyaikh. Ada dua kondisi psikologis yang menghinggapi pikiran masyarakat, termasuk jamaah NW ketika pertama kali TGB mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik, dengan bergabung menjadi salah satu anggota partai politik dan dicalonkan menjadi salah satu calon anggota DPR RI ketika itu (2004). Muncul keraguan sekaligus kekhawatiran. Ragu karena basis ilmu TGB adalah Tafsir dan Ilmu al-Quran, sedangkan ranah yang dimasuki adalah politik dengan berbagai dimensi dan dinamikanya. Bahasa sederhananya, “tidak nyambung”. Khawatir karena TGB baru muncul sebagai idola dan harapan baru pasca Maulasyaikh wafat. Kalau TGB menjadi politisi, khawatir waktu dan pikirannya tidak lagi tercurah untuk berdakawah, mengajar, dan penyebaran nilai-nilai Islam. Beberapa sikap TGB ketika itu (2004), melalui pernyataan berikut (kurang lebihnya):

- a. “Politik itu ruang netral, tergantung kita yang mengisinya. Jika yang mengisinya baik, dengan sesuatu yang baik maka politik akan baik, dan sebaliknya”.
- b. “Dunia politik adalah dunia dakwah. Berdakwah adalah menyampaikan pesan kebaikan. Melalui politik, pesan kebaikan

itu diagendakan dan dipercepat perujudannya. Karena, kita tidak mungkin menyuarkan maksud baik melalui luar kancan, tanpa berinisiatif masuk dalam kancan kebaikan itu”.

Tahun 2004-2008, TGB membuktikan dua propisi penting atas keraguan dan kekhawatiran tersebut, dengan sukses menjadi anggota DPR RI pada periode tersebut. “TGB sangat sukses memberikan warna baru perpolitikan tanah air melalui tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif” (Fasli Djalal, Pejabat Eselen I Kemendiknas RI, 2006; Ahmad Fathoni, Staf Ahli DPR RI, 2006, Hendarman Anwar, Pejabat Eseleon II Kemendiknas, 2008).

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

NW Menjawab Sejarah

Frasa ini penting diulang: menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, penyadaran, dan melaksanakan agenda kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Mengakomodasi pikiran frasa di atas, Hamzanwadi adalah peletak sejarah, generasi berikut melanjutkan estafet sejarah. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja pikiran dan tindakan Hamzanwadi

sebagai peletak sejarah, dan generasi berikut sebagai pelanjut estafet sejarah senada dengan konsep Ernest Renan (1823-1892, dalam Prisma, 13/2/3/2013), bahwa “bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu azas-aka”¹ yang terjadi dari dua hal: rakyat yang dulunya menjalani satu riwayat; dan sekarang mempunyai kemauan hidup menjadi satu (menyatu). Demikian juga Bung Karno menguti Renan (dalam Prisma, 13/2/3/2013), bangsa adalah *le desir d’etre ensemble* (kehendak akan bersatu), satu jiwa dan memiliki rasa kesetiakawanan. Sebagai peletak sejarah, Hamzanwadi menginisiasi gerakan kebangsaan bersamaan dengan lahirnya NW/NWDI (fase *the genuine* sejarah NW), lalu mengisi dan mengembangkan kebangsaan pada fase berikutnya (fase *the change* dalam sejarah NW), berikutnya dilanjutkan pada fase sekarang (fase *the development* dalam sejarah NW) oleh generasi penerus Hamzanwadi. Peran ulama-umara yang diemban oleh Hamzanwadi, berlanjut pada peran ganda Tuan Guru Bajang KH. Muhammad Zainul Majdi (disebut TGB) sebagai salah satu penerus strategis pada fase ini.

Sebagai ulama diemban oleh TGB dengan mengambil peran sebagai pengasuh Yayasan

Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW Pancor) dan agenda safari dakwah sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content* ke seluruh penjuru tanah air Indonesia dan mancanegara. Sebagai umara, TGB berkiprah dalam kancah politik nasional sebagai Anggota DPR RI (2004-2008). Kiprah itu diperluas lagi dalam agenda-agenda eksekusi pembangunan mengisi pembangunan dengan menjadi Gubernur NTB (2008-2013 dan 2013-2018), dan peran-peran lain yang tidak kalah strategis dalam mengisi pembangunan kebangsaan di era reformasi ini. Sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan peran-peran strategis lainnya, TGB menganut prinsip “kecintaan terhadap daerah adalah kecintaan terhadap Bangsa Indonesia”. Karena itu, visi personal-individual harus ditransformasikan menjadi visi kolektif-institusional di tingkat daerah dan negara. Perwujudan rasa cinta dan visi tersebut menurut TGB bertransformasi dalam bentuk tanggung jawab menegakkan nilai-nilai ketuhanan dan memaksimalkan sumber daya yang dikaruniakan Tuhan di bumi Indonesia. Cinta-visi dan tanggung jawab ini tidak lain untuk maksud

“mencerdaskan kehidupan bangsa”, untuk sampai pada terpenuhinya rasa keadilan bagi semua, sebagaimana “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Narasi Sejarah NW adalah Sejarah Bangsa

Sejarah NW dan sejarah kebangsaan Indonesia sebagai narasi sejarah memiliki rangkaian paralel dalam hal tujuan, yang dibentuk melalui *colligation*, *plot*, dan struktur. Melalui *colligation*, nilai kebangsaan Indonesia juga tampak dalam pikiran-penyadaran, dan agenda kebangsaan oleh Hamzanwadi melalui NW. Keduanya menjadi satu *inner connection*, yakni kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, yang bersumber dari empat matra kebangsaan Indonesia: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Karena dibentuk oleh berbagai perbedaan dalam Bhineka Tunggal Ika, ketika proses *colligation* yang membentuk *inner connection* tersebut terjadi melalui NW di Lombok-NTB maka kebangsaan yang dimaksud adalah kebangsaan Indonesia. Melalui *plot* dipahami bahwa

terjadi relasi atraktif antara peristiwa sejarah kebangsaan Indonesia dan sejarah NW sebagai teks, lalu teks dari konteks, dan konteks berpengaruh kepada masyarakat ketika teks sejarah terbentuk. Dua peristiwa sejarah berbeda dengan tujuan sama ini membentuk suatu ranagkaian peristiwa yang kita pahami sebagai peristiwa sejarah kebangsaan. Melalui struktur dipahami bahwa setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, juga terjadi pada sejarah NW, yang keduanya memunculkan warna matra kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. perbedaan dalam hal struktur hanya tampak pada bentuk strukturnya, tetapi nilai struktur tetap paralel dan memiliki *inner connection*, yakni kebangsaan Indonesia. Memahami maksud analisis ini, mengakomodasi Gadamer (1972), narasi tentang sejarah NW sejajar dengan narasi kebangsaan Indonesia.

Refresentasi NW dan Pengakuan Negara

Narasi Sejarah

Kepemimpinan Berbasis Islam (Tegak Agama Dan Memaksimalkan Kekayaan Sumber Daya)

TGB, pada: IMSA dan MISG Conference, Denver Colorado US, “transformasi jamaah menuju jam’iyah adalah soal kepemimpinan dalam rangka membangun peradaban”. Sebagai kader dan refresentasi NW, TGB menyampaikan kepemimpinan sebagaimana tokoh *The Most Influencial Person* di kalangan Islam (Syaikhul Azhar), tentang tiga hal: a) munculnya ide destruktif terhadap kokohnya peradaban Islam sebagai warisan Rasulullah SAW; b) Islamofobia, sikap berlebihan tentang Islam dan membela Islam, padahal terdapat kekuarangan tentang sejarah sesungguhnya, c) berkembangnya wacana Islam di tengah perbedaan tidak dianggap sebagai kekayaan untuk membangun persatuan dan kekompakan, tapi dianggap sebagai ancaman”.

Grand Syaikhul Azhar menyebutkan, “yang perlu dilakukan adalah membangun kekompakan dan persatuan. Islamofobia harus konsisten dengan apa yang diyakini dalam ajaran Islam”. TGB menyebutkan, “sejelek-jelek orang, kita jangan ikuti jelek”. Dalam situasi apa pun, jangan pernah hilang optimisme dan harapan baik. Semua teori-teori dalam kehidupan teruji dalam sejarah. 1400 lebih sejak Rasulullah SAW, ajaran kemanusiaan telah merespon berbagai fenomena

peradaban (ringan, sedang, dan berat), dan semuanya bisa ditangani dengan baik oleh Islam. Semua tantangan yang terjadi, selalu dapat diatasi oleh Islam. Termasuk negara bangsa di Indonesia (nasionalisme), justru fondasi paling kuat untuk nasionalisme di Indonesia adalah Islam dan ummat Islam. Itulah, maka kita harus menjadikan Islam sebagai landasan optimisme masa depan. TGB menyitir Kuntowijoyo, “Islam hadir di Indonesia, tidak saja hadir sebagai ajaran atau panduan beragama semata, tapi Islam menghadirkan *civic culture* (kultur bernegara) Kehadiran kerajaan kerajaan Islam telah menunjukkan eksperimen bernegara, melalui perlawanan terhadap para penjajah.

Pada kesempatan yang sama di lain tempat di Denver, TGB menyebutkan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, “ Mc Heart menyebutkan, kepemimpinan bicara soal SDM, Geografis, Demografis, Peradaban”. Ilustrasinya: bangsa Arab hanya terobsesi menggantungkan syair di Ka’bah. Beda dengan sejarah Persia, bangsa Rum dan Mesopotamia, yang memiliki peradaban sejarah kebangsaan dan peradaban yang cukup tinggi. Rasulullah SAW lahir di tengah masyarakat yang tidak memiliki obsesi. Ketika Rasulullah SAW lahir dalam konteks dengan berbagai keterbatasan, tapi mampu melahirkan peradaban dan kebudayaan positif yang sangat besar. Inilah contoh kepemimpinan

yang sukses. Karakteristik a) kepemimpinan Rasulullah SAW: memimpin dengan ruhul mahabbah, “memimpin dengan cinta kepada Allah dan ummat manusia” (cinta dengan penuh energi, bukan romantisme). Apa yang bisa dipahami, bahwa memimpin, termasuk Islam dan Bangsa Indonesia adalah memimpin dengan mencintai bangsa dan negara, dengan segala khazanah yang dimilikinya (SDM, geografi, demografi dan peradabannya). Jadi, butuh keikhlasan dan cinta. Jadi, nasionalisme yang mendorong pembelaan terhadap negara bangsa atas dasar cinta Demikian juga, memimpin daerah adalah mencintai daerah dengan berbagai khazanahnya. b) kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kepemimpinan yang tahu apa yang harus dikerjakan, paham prioritas utama: keamanan dan kedamaian sebagai konteks berkembangnya akal sehat melalui keislaman. Maka tidaklah berlebihan, jika TGB berulang-ulang menyebutkan bahwa modal yang paling besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa besar adalah persatuan, kesatuan yang menuju kedamaian. Bahkan pernyataan TGB ini menjadi *key discourse* oleh beberapa pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan, bahwa modal utama pembangunan kita adalah persatuan, kesatuan yang menuju kedamaian....Kelanjutan dari wacana

kepemimpinan Rasulullah SAW oleh TGB tersebut, sebagaimana dikutip Nahdi (2018) “Menyitir KH. M Zainul Majdi (TGB) untuk maksud totalitas kepemimpinan dan manajerial ini, “tanggung jawab kepemimpinan berkaitan dengan dua hal: menjaga tegaknya agama Allah di muka bumi; dan memaksimalkan segala karunia Allah untuk kesejahteraan ummat manusia (TGB: Bandung, Februari 2018). Memimpin adalah menyatukan visi personal (*personal interest*) dengan visi kolektif (*institutional interest*), dan membutuhkan pembuktian dalam konteks nyata yang menyejarah, sehingga menjadi pemimpin bukan suatu yang datang tiba-tiba.

Pahlawan Nasional Pertama dari NTB sebagai Simbol Kebangsaan

Bentuk formal pengakuan Negara RI melalui Pemerintah RI atas perjuangan pendiri NW dalam perjuangan menegakkan Iman dan Taqwa melalui Afama Islam, pelopor pergerakan kebangsaan, dan mengukuhkan nasionalisme Indonesia adalah anugrah Gelar Pahlawan Nasional. Maulanasyaikh, sebagai pribadi tidak menghendaki gelar apa pun. “...sekalipun tentu gelar ini (gelar Pahlawan Nasional) bukan yang terpenting karena jasa beliau yang demikian besarnya sehingga para muridnya menganggap penting membuat beliau diteladani...(JK, Wapres Indonesia, 2017). ...“TGKHM Zainuddin Abdul

Madjid memiliki peran dalam masa revolusi di NTB umumnya, dan Lombok pada khususnya. Oleh karena itu, Kemensos mengapresiasi peranan beliau semasa hidupnya, sehingga beliau layak diusulkan menjadi Pahlawan Nasional...(Khofifah Indar Parawansa, Mensos RI, 2017)....”Soal Keislaman dan Keindonesiaan bagi TGKHM Zainuddin Abdul Madjid itu sudah selesai, dan menjadi dua hal yang tak perpisahkan,...”(TGB, Gubernur NTB, 2017). Gelar, termasuk gelar Pahlawan Nasional adalah pembuktian, contoh, tauladan bagi generasi bangsa di masa depan tentang pikiran dan tindakan nyata membangun peradaban melalui memperjuangkan tegaknya Islam dan kebangsaan Indonesia melalui konteks lokal Lombok, NTB. Tidaklah berlebihan, jika para kader NW menyebut fenomena ini sebagai “dari NTB untuk Indonesia” untuk menyebut perjuangan Maulanasyaikh pada zamannya, dan penguatan kiprah TGB di masa kini dalam pembangunan di NTB dan Indonesia.

Colligation, Plot, dan Struktur Sejarah

Tokoh NW dan Pengakuan Negara

Kajian ini merupakan kajian Sejarah dengan Hermeneutika sebagai alat analisis, sehingga bukan biografi atau otobiografi, yang bertanggungjawab

melakukan proses evidensi teori, yakni menemukan fakta dan relasi fakta dengan fakta lain dalam proses sejarah, yang tidak saja memperkuat posisi teori tapi menjadikan suatu teori menjadi sangat dialektis memandu proses kajian. Melalui proses evidensi teori dan fakta sejarah dalam kajian ini, tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan tokoh strategis dalam proses dan peristiwa sejarah. Berdasarkan bantuan Hermeneutika, proses kajian ini memandang dan memahami (*understand and verstehen*) Hamzanwadi dari luar dirinya secara subjektif dengan melihat hubungan kausal antara dirinya dengan peristiwa sejarah yang dilaluinya (Dilthey, 1962). Dipahami bahwa Hamzanwadi, pikiran, tindakan, dan makna serta akibat pikiran dan tindakannya memiliki sumbangan besar terhadap terbentuknya Indonesia merdeka dan Indonesia yang berkebangsaan, melalui wadah kultural-struktural NW. Hamzanwadi bagi dirinya adalah pribadi yang sudah selesai; sudah melahirkan pikiran, sudah melakukan penyadaran, sudah mengagendakan pikirannya dalam tindakan nyata, Indonesia sudah merdeka, dan sudah menjadi bangsa yang berkebangsaan. Generasi hari ini dan

masa depan membutuhkan panutan dan teladan dalam mengisi tantangan masa depan. Tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional sebagai Pahlawan Nasional kepada Hamzanwadi dengan sebutan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Pahlawan Nasional.

BAB V

HAMZANWADI: HABITUS, LOKALITAS, DAN KEBANGSAAN

Habitus individu dan Realitas Lokal

Dua proposisi metodologis sebagai instrumen ilmiah tulisan ini: *pertama*, tiga cakupan penjelasan sejarah, yakni: 1) *hermeneutics* dan *verstehen* (menafsir dan memahami); 2) penjelasan tentang waktu yang memanjang; dan 3) penjelasan peristiwa tunggal (Suryo, 2008). Ketiganya merupakan kesatuan atraktif sirkular dalam proses menemukan, menafsirkan, dan memahami fakta dan nilai sejarah. Berdasarkan tiga cakupan tersebut, fakta dan nilai

sejarah dari persona, peristiwa, dan artefak, termasuk narasi (*colligation*, *plot*, dan struktur sejarah) sebagaimana disebutkan W.H. Walsh (1967) terkait tokoh TGH M Zainuddin Abdul Madjid dideskripsikan sebagai *unity* sejarah menyangkut pikiran, tindakan, dan realitas fisik (artefak) dalam kurun waktu panjang dengan peristiwa mandiri yang berproses berdasarkan relasi kontekstualnya. **Kedua**, *cultural studies* (Raymon William, melalui Kutha Ratna, 2004), berkenaan dengan seluruh kehidupan manusia dalam konteks manusia menyejarah. *Cultural studies* dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena dinamika kebangsaan yang digagas, digerakkan, dan dipandu oleh tokoh TGH M Zainuddin Abdul Madjid mengingat proses ini terjadi sebagai suatu realitas kultural termasuk perubahan dan perbaikan aspek-aspek kultural yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Sebagai proposisi metodologis, *cultural studies* membantu deskripsi realitas sejarah sebelumnya untuk fungsi-fungsi *verstehen* masa kini dan masa depan melalui realitas bentuk (artefak), fungsi, dan makna. Proses metodologis keduanya terjadi secara eklektis tanpa menampakkan dominasi masing-masing.

Ontologi kedua proposisi metodologis ini dibatasi pada: 1) proses pendidikan TGH M Zainuddin Abdul Madjid sebagai proses habituasi individual; 2) institusionalisme ide dan aksi gerakan kebangsaan; dan 3) aksi kebangsaan di era kemerdekaan. Dalam tulisan ini selanjutnya, masing-masing aspek ontologi tampak melalui aspek mandiri (tunggal) untuk memudahkan deskripsi sebagaimana tradisi penjelasan sejarah, sebagai *unity* penggambaran gerakan (pemikiran dan aksi) kebangsaan oleh TGH M Zainuddin Abdul Madjid.

Pendidikan formal yang diikuti oleh TGH M Zainuddin Abdul Madjid adalah Sekolah Rakyat Negara (lulus tahun 1919 M) (TP2GD NTB. (2017). Dari sudut psikologi perkembangan, usia lulusan Sekolah Dasar/MI berada pada usia 11-12 tahun. Dapat dipastikan bahwa Sekolah Rakyat Negara ketika itu (1919 M) masih di bawah kontrol Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui Politik Etik. Kondisi peradaban berdasarkan indikator pendidikan memperoleh dampak kurang menguntungkan akibat kebijakan politik etik Hindia Belanda. Kondisi ini menjadi sebuah tesis bahwa pada awalnya, orang-

orang Belanda datang ke Nusantara untuk mencari barang dagangan. Setelah berhasil, mereka berupaya menguasai dan menjajah daerah-daerah yang didatangi tersebut. Mengakomodasi pikiran D. Amico (1989), secara Hermeneutik dapat dipahami bahwa kondisi lokal dengan konteks kontrol kolonial sudah mulai disadari sebagai kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses modernisasi peradaban, termasuk melalui pendidikan keagamaan. Karenanya, benarlah apa yang TGH M Zainuddin Abdul Madjid sampaikan bahwa “tidaklah mungkin kita dapat menjalankan proses pendidikan dan tindakan keberagamaan dalam kondisi tertekan, tidak nyaman, dan penuh dengan intimidasi atau tidak merdeka (Nahdi, 2012). Jika konsep kebangsaan dipahami sebagai suatu kesadaran individu dan kolektif tentang bangsa (sebut Indonesia) menyangkut kemerdekaan, ideologi, kesejahteraan, persatuan, kebudayaan, dan aspek kecerdasan lainnya (Muladi, 2006), jelas bahwa TGH M Zainuddin Abdul Madjid sudah menyadari kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi proses-proses modernisasi peradaban dalam bentuk dan tindakan apa pun. Konteks lokal yang melingkupinya telah melahirkan

kesadaran bahwa bangsa ini dalam kondisi terjajah, terintimidasi, tertindas, dan itulah penyebab dari semua keterbelakangan peradaban. Langsung atau tidak langsung, kesadaran ini akan melahirkan kesadaran lain, yakni kesadaran tentang pentingnya merdeka sebagai suatu bangsa. Namun demikian, merdeka adalah suatu konteks membebaskan semua atribut kemanusiaan yang tidak seimbang. Merdeka harus dimaknai sebagai suatu kesadaran tentang semuanya adalah sama. Merdeka adalah milik kolektif, sehingga harus lahir dari kesadaran kolektif sebagai bangsa. Merdeka membutuhkan instrumen lain sebagai instrumen penyadaran. Yang tergambar dalam diri TGH M Zainuddin Abdul Madjid bahwa instrumen penyadaran akan pentingnya merdeka adalah pendidikan. Mengapa Pendidikan? Variabel rendahnya pendidikan karena dibatasi akses pendidikan mengakibatkan individu dan kolektif tidak memiliki kapasitas untuk memikirkan alternatif perbaikan nasibnya. Karena itu, harus disadarkan melalui proses pendidikan, sehingga kesadaran akan kondisi keterjajahan itulah sebagai hasil dari proses pendidikannya.

Pendidikan dalam konteks (ruang dan waktu sejarah ini) menjadi instrumen penyadaran. Sebagai proses, pendidikan adalah relasi antarmanusia dengan pola saling memberi (pemberi-penerima-pemberi). Konsep memberi oleh pemberi harus memiliki entitas yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih komprehensif dibanding penerima. Dalam hal kapasitas individual, TGH M Zainuddin Abdul Madjid tidak mungkin bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya bangsa yang merdeka dengan usia yang relatif masih anak-anak (11-12 tahun) dan lulusan sekolah dasar. Kesadaran inilah yang melahirkan pentingnya pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penyadaran akan kondisi keterjajahan, dan berikutnya melahirkan kesadaran untuk merdeka. Inilah konteks yang menuntutnya untuk belajar lebih banyak pada institusi yang lebih tinggi.

Madrasah *ash-Shaulatiyah* dan Konteks Habitiasi

Pendidikan selanjutnya yang ditempuh TGH M Zainuddin Abdul Madjid adalah di Madrasah *ash-Shaulatiyah* di Makkah. Kita coba memahami gerakan

kebangsaan TGH M Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan sistem pendidikan, idealisme, pendiri dan pendirian, kurun waktu pendidikan, dan asal santri/murid di Madrasah *ash-Shaulatiah* berdasarkan perspektif hermeneutik. Dalam sistem pendidikan, salah satu sub-sistem yang penting adalah kurikulum atau isi pembelajaran yang lazim tampil melalui mata pelajaran-mata pelajaran (Kneller, 1984). Jelas bahwa mayoritas substansi kurikulum Madrasah *ash-Shaulatiah* adalah berkaitan dengan agama (Islam). Islam sebagai agama dan keyakinan memiliki beberapa pandangan mendasar tentang manusia. Salah satunya tersebut dalam QS. *adz-Dzaariyaat*, 56: “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribada kepadaku”. Secara etnografis ayat ini menunjuk pada realitas bahwa semua manusia (tanpa menyebut Jin) adalah sama, yakni bertanggungjawab untuk beribadah kepada-Nya melalui praktek-praktek ketakwaan. Kesamaan tanggung jawab ini menunjuk pada kesamaan status di mata sesama (*hablumminannaas*). Intinya, kurikulum pendidikan di Madrasah *ash-Shaulatiah* secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan substansi kesetaraan, kesejajaran, dan

kesamaan hak dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Pada saat yang sama, semua manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama atas apa yang ditakdirkan-Nya, termasuk terhadap tanah air dan bangsa di mana tanggung jawab kepada Tuhan itu ditunaikan (mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan ibadah kepada-Nya). Tidak boleh suatu bangsa, suatu kelompok, atau individu merasa paling berhak dalam hal memanfaatkan bumi dan tanah air dengan dalih dan cara apa pun, apalagi perampasan, penindasan, dan penjajahan. Dalam konteks ini, tergambar bahwa TGH M Zainuddin Abdul Madjid sudah meletakkan fondasi pemikiran bahwa keberagamaan (Islam) dan kebangsaan menjadi dua hal yang sejajar. Agama (Islam) dengan ajaran kesejajaran ummat manusia menjadi acuan dalam membentuk suatu bangsa. Suatu bangsa akan terbentuk bila setiap entitas kebangsaan berada sejajar dan merdeka, sehingga kemerdekaan menjadi keniscayaan dalam membentuk peradaban suatu bangsa.

Idealisme pendidikan di Madrasah *ash-Shaulatiyah* (dalam sistem pendidikan Indonesia dikenal sebagai visi pendidikan) tidak terlepas dari

kondisi sosial masyarakat Makkah, termasuk pendidikan ketika itu. Makkah adalah negara kerajaan, yang tentu “alergi” dengan pandangan-pandangan kesetaraan dan kesejajaran. Sebagai negara kerajaan, tentu Makkah memiliki pandangan yang berbeda tentang institusi agama (Islam) dan negara. Tidaklah mengherankan jika Madrasah *ash-Shaulatiyah* menjadi salah satu madrasah yang dianggap tidak *mainstream* dalam tradisi Makkah. Madrasah inilah satu-satunya institusi pendidikan yang mengajarkan konsep keberagaman yang strategis dalam memandu proses berbangsa dan bernegara. Bagus kiranya kita menambah wawasan kita bahwa semakin tinggi kapasitas keilmuan keberagaman lulusan Madrasah *ash-Shaulatiyah* sejajar dengan kesadaran kebangsaannya. Kesadaran ini memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan konteks yang melingkupinya saat itu. Jika suatu bangsa belum menjelma menjadi suatu bangsa merdeka maka kesadaran yang terbangun adalah kemerdekaan. Jika suatu bangsa sudah merdeka, kesadaran yang terbangun adalah agenda mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan menjadi aktivitas meletakkan posisi

manusia (makhluk) pada posisi yang sama dalam pandangan Tuhannya (Allah) sebagaimana maksud *QS. adz-Dzaariyaat 56*.

Madrasah *ash-Shaulatiyah* didirikan oleh *Syeikh Rahmat Allah*, seorang ulama imigran dari Delhi-India tahun 1919 M. India merdeka pada 15 Agustus 1947, artinya pada sebelum ini, India masih menjadi jajahan Kerajaan Inggris, sebagaimana halnya Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 menjadi jajahan Belanda. *Inner context* yang dapat dipahami dari *Geisteswissenschaften Syeikh Rahmat Allah* secara hermeneutik, bahwa *Syeikh Rahmat Allah* berasal dari negara terjajah, yang merasakan sulitnya mengembangkan pikiran-pikiran dan kegiatan keberagamaan. Pikiran *Inner context Geisteswissenschaften* inilah yang ingin ditularkan kepada murid-muridnya melalui madrasah ini. Tafsir ini bisa saja diperdebatkan, tapi inilah versetehen yang dapat ditawarkan berdasarkan kausalitas antara *inner context Syeikh Rahmat Allah, Geisteswissenschaften*, konteks waktu, dan peristiwa yang terjadi dalam konteks waktu tersebut. Maksudnya, ada kesamaan pikiran dan pengalaman sebagai anak bangsa yang

berasal dari dunia terjajah dengan berbagai dinamikanya, *Syeikh Rahmat Allah* (India) dan TGH M Zainuddin Abdul Madjid (Lombok-Indonesia). Dan, dinamika itulah yang melahirkan ide penyadaran melalui proses pendidikan. Jika habitus (proses habituasi) sebagaimana disebutkan Piere Bourdieu (1998) dipahami sebagai disposisi proses mental-kognitif dalam konteks objektif sejarah (personal dan kolektif) dipahami bahwa kesadaran akan nasib bangsa yang terjajah dan harus merdeka menjadi semakin subur dalam proses pengumpulan keilmuan di Madrasah *ash-Shaulatiyah* ketika itu. Pada kurun waktu tersebut, merdeka masih merupakan cita-cita, dan cita-cita tersebut membutuhkan instrumen pendidikan. Benarlah, pada akhirnya ketika TGH M Zainuddin Abdul Madjid kembali ke tanah air (1933), dan mendirikan instrumen penyadaran keterjajahan, dan pentingnya kemerdekaan dengan mendirikan Pesantren *al-Mujahidin* (1934) sebagai cikal bakal NWDI, NBD dan NW.

Rekan-rekan seperguruan TGH M Zainuddin Abdul Madjid di Madrasah *ash-Shaulatiyah* sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang (istilah

studi pembangunan) dan dalam kurun waktu tersebut beberapa di antaranya masih menjadi negara koloni kolonial. Pada generasi sebelumnya, santri Madrasah *ash-Shaulatiyah* adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh ini sangat populer sebagai tokoh pergerakan kebangsaan pada era sebelum kemerdekaan. Jika meletakkan relasi kedua tokoh ini dalam posisi sejajar (pikiran dan tindakan) sebagaimana kita memahami “aku dalam engkau” tidaklah berlebihan jika kedua tokoh ini mengalami proses *inner context* yang sama, merasakan nuansa kultural yang sejajar, sehingga melahirkan aksi dan gerakan yang sama, yakni gerakan kebangsaan yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Dan, kita dapat menyaksikan hasil dari proses tersebut melalui berbagai catatan sejarah pergerakan bangsa; sebelum merdeka, ketika merdeka, hingga saat ini dalam konteks ke-Indonesiaan kita sebagai bangsa.

Institusionalisme Ide dan Gerakan Kebangsaan

Shakespeare pernah berucap, “*what’s in a name*”? Agak sulit memahami maksud Shakespeare berucap demikian karena contohnya adalah bunga

mawar, jika diberi nama apa pun tetap harum. Bisa dipahami melalui realitas bahwa nama objek tidak selalu mencerminkan hakikat yang harus diemban oleh nama objek tersebut. Tidak selalu, berarti masih banyak objek yang juga menjadi cermin dari apa yang harus diembannya. Nama seringkali menjadi penanda sebuah cita-cita, awal kejadian, situasi/kontkes, atau identitas fisik dan moral yang direfresentasikannya. *al-Mujahidin* (Arab) berarti ‘pejuang’. Kata “pejuang”, sebagaimana “revolusi”, “ganyang”, “merdeka”, dan lainnya adalah kata-kata yang merefresentasikan konteks sosial kemasyarakatan ketika kata-kata tersebut mulai dipopulerkan. Demikian pula nama *al-Mujahidin* (pejuang) untuk pesantren pertama yang didirikan TGH M Zainuddin Abdul Madjid (1934, sebelum Indonesia merdeka) ada hubungannya dengan situasi/konteks saat itu dalam rangka memerdekakan Indonesia, dan para pelaku proses itu adalah para pejuang. Lagi-lagi kita menyandarkan simulasi pikiran kita pada proses reduksi kausalitas sejarah antara lahirnya *al-Mujahidin* (pejuang) dengan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) tahun 1937. Kita beralih dulu ke tahun 1953 pada saat

lahirnya Nahdlatul Wathan. Pertanyaannya, mengapa sebutan NW dipopulerkan pada tahun 1953? Kita ketahui bahwa NW merupakan organisasi massa untuk mewadahi gerakan kebangsaan mengisi kemerdekaan bidang sosial, dakwah, termasuk juga peluang berpolitik selain bidang pendidikan melalui NWDI dan NBDI. Jadi, NW dimaknai sebagai kelanjutan dari NWDI dan NBDI. Jika mereduksi sebutan nama, perjalanan waktu, dan peristiwa sejarah, nama NW sesungguhnya sudah muncul setelah tahun 1934 (kelahiran *al-Mujahidin*). Karena nama NW sangat kental dengan semangat para pejuang pergerakan kemerdekaan (NW=Kebangkitan Tanah Air), dan sangat mungkin dicurigai oleh Pemerintah Hindia Belanda, TGH M Zainuddin Abdul Madjid menyematkan NW dengan Diniyah Islamiyah sehingga menjadi NWDI. Tindakan ini sebagai upaya menyelamatkan keberlangsungan madrasah, selain upaya-upaya penyadaran atas kondisi keterjajahan, yang selanjutnya kesadaran akan pentingnya merdeka memang diinstrumentasikan melalui pendidikan agama (Islam). Untuk mengabadikan cita-cita, pikiran, gerakan pergerakan tanah air sebagai entitas

menyejarah (*the genuiene*, *the change*, dan *the developement*), sebutan NW diabadikan sebagai nama organisasi NW (1953), dan lembaga pendidikan dikenal sebagai NWDI dan NBDI.

Terkait nama *al-Mujahidin* (pejuang) dan NW (pergerakan tanah air), Popper menjelaskan bahwa sebutan-sebutan tersebut bukanlah tanpa makna dan maksud dalam relasinya dengan peristiwa, kurun waktu, dan cita-cita sejarah. Nama-nama tersebut adalah pengabdian atas kejelasan sikap, harapan, dan tindakan untuk merdeka (sebelum merdeka), dan tindakan mengisi kemerdekaan (setelah merdeka). Tampak jelas bagi kita bahwa semuanya hadir sebagai realitas yang menyejarah dalam proses pendidikan, sosial, dan dakwah (untuk mencerdaskan) anak bangsa sehingga menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Artefak sejarah lain sebagai penguat keyakinan dan pemahaman kita bahwa sikap, harapan, dan tindakan (untuk merdeka dan setelah merdeka) tampak pada karya-karya seni (syair Wasiat Renungan Masa-Pengalaman Baru dan Lagu), yang sebagian di antaranya mengandung substansi nasionalisme, tanggung jawab menjadi anak bangsa yang merdeka

dan berdaulat, kesetaraan dan kesejajaran dengan peradaban lain.

Aktor Intelektual Perlawanan Fisik

Narasi ini disajikan untuk memperjelas keterlibatan TGH M Zainuddin Abdul Madjid dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Narasi ini diharapkan sudah memenuhi standar *colligation*, *plot*, dan struktur sejarah sebagaimana W.H. Walsh.

....Setelah gagalnya penyerangan markas tentara NICA tanggal 2 Juni 1946 dan penangkapan para pemimpin pejuang di daerah, para pejuang yang masih bebas dari penangkapan NICA berkoordinasi untuk mengadakan perlawanan kembali. Hari Kamis, 6 Juni 1946 di rumah H. Muhammad, Desa Pringgesela, penyerbuan itu direncanakan. Bersama Sayyid Saleh, Djumhur Hakim dari Lendang Nangka, Muh. Syah dan Maidin dari Selong, Sayyid Salim dari Teaban, Amaq Arisah dari Anjani membahas taktik penyerangan. Hari itu juga Sayyid Saleh dengan Djumhur Hakim menuju ke Lenek dan Kalijaga untuk menghimpun laskar yang akan bergabung dengan Laskar Sayyid Saleh di Pringgesela nanti. Diputuskan penyerbuan harus dilakukan secepatnya sebelum pihak NICA mengadakan penangkapan-penangkapan kembali. Strategi penyerbuan diatur. Laskar-laskar pejuang dari Teaban, Dasan Borok, Suralaga, Anjani, di bawah pimpinan Sayyid Salim, Amaq Arisah, Muh. Syah dan Maidin akan mengadakan

penyerangan dari sektor utara. Laskar dari Pringgesela, Lendang Nangka, Kumbang, Danger, Kalijaga dan Lenek mengadakan konsentrasi di Danger untuk kemudian bergerak ke Selong. Pasukan ini akan memasuki Kota Selong dari Sektor Utara.

Pimpinan pejuang rakyat dari Pancor, TGH. Moh. Faisal, berkoordinasi dengan Sayyid Saleh di Pringgesela. Dicapai kesepakatan untuk konsentrasi pasukan di Bungbasari pada tengah malam sebelum penyerbuan. Selepas shalat Ashar, Laskar BASMI pimpinan Sayyid Saleh dari Pringgesela bergabung dengan Laskar Banteng Hitam pimpinan Djumhur Hakim. Kemudian berikutnya bergabung juga laskar-laskar dari Kumbang dan Danger. Menelusuri jalan-jalan kecil yang aman dari incaran kaki tangan NICA, pasukan bergerak secara sembunyi-sembunyi melalui Lendang Keseo, Rumeneng, Utara Padamara ke Timur Paok Pampang. Ditempat ini bergabung laskar dari Dasan Lekong pimpinan Lalu Muhdar menuju Pancormanis, ke pertigaan Denggen menuju Batu Belek, ke dusun Ketangga melalui utara Gunung Kembar sampai tempat konsentrasi pasukan di Bungbasari. Di Bungbasari strategi penyerbuan markas NICA di Kota Selong dimantapkan.

Hari Jum'at malam Sabtu tanggal 7 Juni 1946 dini hari dengan suara takbir yang bergemuruh "Alloohu Akbar" Laskar-laskar pejuang Lombok Timur dengan bersenjatakan keris, golok, kelewang, bambo runcing dan lain-lain mengempur Markas Gajah Merah milik tentara NICA. Mendahului pasukan lainnya Sayyid Saleh dan kawan-kawannya mengamuk dengan kelewangnya membabat tentara NICA yang panik karena serangan mendadak ini. Ketika Lasykar-laskar berikutnya mulai merangsek maju, baru tentara NICA ini mulai menyadari serbuan ini.

Pasukan Laskar Rakyat mundur teratur karena tidak dapat mengimbangi peralatan persenjataan musuh. Persenjataan memang senjata tradisional, diketahui waktu itu senjata api berupa pistol hanya sepucuk yang dipegang oleh H. Moh. Faisal.

Malam itu pada pertempuran 7 Juni 1946 di Kota Selong, Sayyid Saleh bersama TGH. Moh. Faisal, dan Abdullah gugur di markas tentara Gajah Merah, sementara di pihak NICA sejumlah 8 orang yang tewas. Malam itu secara rahasia semua tentara NICA yang tewas ini diangkat dan dikuburkan di Mataram. Pada esok harinya ketiga jenazah pejuang ini dimakamkan oleh para santri dari perguruan NW Pancor, atas petunjuk TGH M Zainuddin Abdul Madjid, jenazahnya dimakamkan sebagai syahid di perkuburan umum Selong.

Akhirnya sejak pertempuran ini, NICA menghasut rakyat untuk berdemonstrasi keliling kota Selong untuk memojokkan pejuang-pejuang. Banyak pejuang dari sekitar Pringgabaya, Masbagik, Lendang Nangka, Lenek, Teaban, Gapuk, Rumbuk, Lepak, Rarang, dan Dasan Lekong ditahan di penjara Selong dan sebagian dikirim ke penjara Denpasar dan Ambon. Keadaan seperti ini berlangsung sampai penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Bersamaan dengan itu pula masyarakat Lombok Timur menyambut hidup baru yaitu bebas dari penjajahan.

Konteks ini menunjukkan peran penting TGH M Zainuddin Abdul Madjid penyerangan NICA di Selong Lombok Timur di jelaskan. Menurut TGH. Zainuddin (83 tahun), dijelaskan bahwa: Kepergian TGH. Moh. Faesal (adik kandung TGH M Zainuddin Abdul Madjid) dan TGH. Ahmad ke Pringgasela atas sepengetahuannya dan pagi sekali ketika saya sedang mengaji saya

melihat sendiri TGH. Moh. Faesal masuk ke rumah, saya tidak tau apa yang dbicarakan tetapi yang saya lihat seperti orang perpisahan. Besoknya baru saya tau bahwa terjadi perang di Selong dan suasana saat itu menakutkan karena TGH. Moh. Faesal meninggal dunia. Persiapan penyerangan itu diatur di rumah TGH M Zainuddin Abdul Madjid.

Kesaksian di atas menunjukkan bahwa peran TGH M Zainuddin Abdul Madjid dalam perang 7 Juni di Selong melawan NICA sangat penting bahkan disimpulkan sebagai inisiator. Keputusan titik kumpul para pejuang di Pringgasela agar tidak diketahui pemerintah NICA atas inisiatifnya. Hubungan persahabatan TGH M Zainuddin Abdul Madjid dengan TGH. Thayib Pringgasela sudah lama terjalin, sehingga dimungkinkan kesepakatan kedua tokoh ini bahwa titik perjalanan penyerangan Markas NICA dilakuka dari Pringgasela. Hal ini dijelaskan oleh H. Ahmad Zainuddin (72 tahun) bahwa: “TGH. Thayib dan Maulanassyaikh (sebutan TGH M Zainuddin Abdul Madjid) itu bersahabat karib, saya dengar cerita ini dari orang tua saya. Bahkan penyerangan markas NICA di Selong berawal dari Pringgasela itu atas sepengetahuan TGH. Thayib dan Maulanassyaikh, malam saat kumpul sebelum berangkat ke Selong para pejuang termasuk adiknya Maulanassyaikh, rapat dulu minta doa restu pada TGH. Thayib”.

Peristiwa ini juga dipertegas oleh TGH. Nur Said (85 tahun):

“TGH M Zainuddin Abdul Madjid menganjurkan adiknya untuk melakukan penyerangan kepada NICA. Sehari sebelum penyerangan, TGH M Zainuddin Abdul Madjid ikut dalam pertemuan di rumah TGH. Faesal membahas rencana penyerangan, hadir pada waktu itu Said Saleh dan Abdullah. Pada pertemuan itu juga dibahas

tentang strategi perang dengan rencana arah datangnya penyerangan, sehingga disepakati penyerangan dilakukan dari beberapa sayap, yaitu sayap tengah, sayap kanan dan sayap kiri. Ada pesan khusus Hamzanwadi kepada TGH. Faesal tentang rencana penyerangan dan isi pesan ini yang masih rahasia.

Keterlibatan TGH M Zainuddin Abdul Madjid dalam penyerangan NICA di Selong Lombok Timur oleh pejuang kemerdekaan dipertegas oleh TGH. Athar (79 tahun) "Adiknya tidak mungkin berbuat kalau tidak diketahui kakaknya. TGH M Zainuddin Abdul Madjid selalu memberikan doktrin di setiap pengajian terutama lewat doa hizib....

Colligation, plot, dan struktur memungkinkan kita memahami makna di balik ketiganya, bahwa TGH M Zainuddin Abdul Madjid terlibat langsung dalam peristiwa heroik penyerbuan NICA 7 Juni 1946. Peristiwa dan waktu terjadinya terutama koordinasi dan komunikasi penyerbuan di bawah pimpinan Pejuang Rakyat (TGH Faesal) dan TGH M Zainuddin Abdul Madjid sejajar dengan koordinasi dan komunikasi antara Letkol Soeharto dan Sri Sultan HB IX pada peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1948. Inisiator serangan tersebut adalah Sri Sultan HB IX

dan komandan pasukannya adalah Letkol Soeharto. Dalam konteks ini, siapa yang meragukan keterlibatan Sri Sultan HB IX dalam peristiwa tersebut (narasi ini disebutkan pada bagian lain dalam buku ini).

Aksi Kebangsaan Era Kemerdekaan: Makna Pendidikan yang Dinamis

Sebagai pelaku sejarah Pergerakan Kebangsaan, TGH M Zainuddin Abdul Madjid adalah agen (*thinker and story teller*) (Ritzer, et al., 2003). Pemikiran yang menjadi ide dasar didirikannya NW tidak lain adalah kesadaran tugas dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana diajarkan agama Islam. Sebagai *thinker* dan *story teller*, TGH M Zainuddin Abdul Madjid memahami tidak semua orang tertindas menyadari ketertindasannya, bahkan kadang-kadang menganggapnya sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Melalui NW diharapkan masyarakat memiliki pandangan dunia dan sistem nilai baru, yang disebut Kneller sebagai *a world view and system values* dalam proses relasi dengan dunia eksternal (pendidikan), termasuk relasi dengan peradaban lain

yang dalam perspektif sejarah disebut sebagai kesadaran keterjajahan dan kemerdekaan. Kehadiran NW untuk maksud perubahan tidak dimaknai sebagai proses aksi dalam struktur dengan mengubah semua tatanan struktur dan kultur masyarakat lokal secara menyeluruh. Kehadiran bersifat akulturatif dengan melestarikan nilai lama yang bersifat positif (preservatif), dan memberikan sentuhan baru bagi nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dan tidak produktif bagi masyarakat (direktif). Fungsi ini dijalankan mengingat NW hadir di tengah masyarakat yang memiliki sejarah peradaban dan keberagaman yang panjang. Kedua fungsi ini dijalankan untuk menghindari konflik sosial di tingkat masyarakat dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya terdahulu, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan-perubahan pada masa yang akan datang. Terjadi sinergi antara pemikiran sejarah dan pemikiran futuristik bagi masyarakat dengan dinamika kulturalnya.

Tidak ada entitas kemanusiaan yang terjadi secara kebetulan, minimal entitas-entitas dimaksud menjadi ranah pemikiran masa tertentu berorientasi

masa depan (futuristik), sebagaimana dilakukan TGH M Zainuddin Abdul Madjid. Beberapa di antaranya: pendirian Madrasah Nahdlatul Banat (NBDI) tahun 1943; formulasi substansi kurikulum madrasah (70% agama: 30% umum tahun 1951); dan berdirinya pendidikan umum pada satuan pendidikan dasar-menengah, hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1970-an. Peristiwa sejarah era kemerdekaan ini menunjukkan adanya hubungan antara tanggung jawab penyediaan fasilitas pendidikan untuk kaum perempuan sebagai hak dasar kemanusiaannya sebagaimana ketentuan agama Islam). Juga menunjukkan sudah muncul pikiran futuristik bahwa kesetaraan antara peran gender antara laki-laki dan perempuan menjadi strategis dalam perjalanan sejarah peradaban kebangsaan di masa depan. Tidak ada pula yang menduga, pada tahun 1973 (pengakuan eksistensi madrasah) dan 1975 melalui SKB 3 Menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengakui madrasah sebagai bagian sistem Pendidikan Nasional,. Padahal, TGH M Zainuddin Abdul Madjid sudah memikirkan dan melakukannya sejak tahun 1943. Bukti sejarah ini

dimaknai sebagai habitualitas yang melahirkan aksi nyata dalam kurun tertentu yang memiliki kesinambungan dengan kecenderungan masa depan dalam tanggung jawab sebagai berkebangsaan.

Merdeka adalah Membangun

Terjajah, merdeka, dan perjuangan para pejuang adalah entitas tak bertepi, yang berbeda hanyalah zaman. Maknanya, perjuangan tak pernah berhenti dan semua kita adalah para pejuang. Filosofi ini tertuang dalam 50 tahun usia NW dalam slogan “50 tahun NW Berjuang”. Slogan itu lahir ketika NW berusia 50 tahun (tahun 1983). Tentu perjuangan itu tidak akan pernah berakhir, sejalan dengan berjalan dan berdinamikanya pikiran pendirinya, TGH M Zainuddin Abdul Madjid. Beberapa bukti sejarah di era kemerdekaan dalam rangka perjuangan kemanusiaan berbagai bidang yang bisa terekam. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui penemuan dan pengembangan varietas pertanian Gogorancah (penanaman padi daerah tadah hujan melalui biji, bukan semaian bibit). Program pembangunan bidang pertanian ini sangat strategis

mengingat daerah NTB memiliki dua tofografi (pengairan permanen dan tadah hujan). Program Keluarga Berencana sebagai program mengatur jarak kelahiran dalam rangka kesejahteraan hidup melalui kualitas hidup keluarga. Demikian pula afiliasi politik sebagai ruang mengatur dan mengelola masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Demikian beberapa agenda perjuangan di era kemerdekaan sebagai gambaran kontinuitas pikiran dan aksi kebangsaan oleh pelaku pencipta dan pelaku sejarah TGH M Zainuddin Abdul Madjid.

TGH M Zainuddin Abdul Madjid adalah sejarah objekif dalam konteks sejarah subjektif. Pikiran dan tindakannya dalam sejarah berkebangsaan Indonesia (kuantitas dan kualitasnya) tidak dapat disangkal dan nyata. Bandingkan dengan yang memperoleh gelar dan disebut pahlawan oleh subjektif negara. Kalau tidak lebih besar, paling tidak sama. Catatan dalam tulisan ini sebagai tambahan bahan untuk meyakinkan subjektivitas negara, sehingga Gelar Pahlawan Nasional segera disandangkan atas kiprahnya dalam pergerakan kebangsaan (*the genuine, the change, dan the development*).

BAB VI

PENUTUP

Diskusi: Nilai Kebangsaan Dalam Sejarah NW (Proses *Knowledge Content* dan Dialektika Tanggung Jawab Sejarah)

Sejarah dengan berbagai aspeknya adalah juga sekumpulan pengetahuan dan nilai yang perlu diwariskan kepada generasi masa depan melalui proses pendidikan. Dalam hal sejarah kebangsaan dalam sejarah NW, tujuan akhir proses pendidikan pengetahuan dan nilai adalah terbentuknya generasi yang sadar akan sejarah bangsanya, yang dengannya memiliki apresiasi yang sama dengan generasi pencipta sejarah sebelumnya dalam konteks bangsa yang menyejarah. Tahapan awal yang dilakukan oleh Hamzanwadi untuk maksud ini adalah *transfer* atau alih pengetahuan dan nilai melalui berbagai proses pendidikan dan pengajaran, formal maupun informal, kultural dan struktural. Melalui tahapan transfer, generasi selanjutnya diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi (*identification*) nilai-nilai luhur sejarah kebangsaannya, secara khusus yang dipikirkan dan diagendakan oleh Hamzanwadi melalui NW. Hasil

proses identification, para generasi diharapkan memiliki sikap; menerima atau menolak, mengikuti atau melawan, mengembangkan atau menghalangi sebagai suatu pilihan bagi dirinya sebagai individu atau kolektif. Dengan sikap melalui proses identification, generasi akan menjadi individu atau kelompok yang memiliki identitas sejarah yang *inner* dengan dirinya, dan dengannya akan memiliki tanggung jawab sejarah (*admission*), termasuk tanggung jawab terhadap sejarah bangsa.

Setelah *knowledge content*, sejarah dengan sejumlah pengetahuan dan nilai harus dipahami melalui proses dialektika sejarah. Dialektika sejarah yang dimaksud adalah pengetahuan dan nilai kebangsaan NW oleh Hamzanwadi pada masing-masing fase sejarah kebangsaan Indonesia menjadi acuan nilai, sumber pemikiran, dan referensi tindakan dalam rangka kebangsaan. Sebagai sebuah nilai, sumber pemikiran, dan referensi tindakan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang ditawarkan Hamzanwadi melalui NW memiliki relasi dipengaruhi dan mempengaruhi (*influence*). Hamzanwadi dan NW berada di tengah antara pengaruh sebelumnya:

pengaruh pengumpulan pendidikan dan konteks sejarah, dan pengaruh sesudah nilai, pemikiran dan tindakan dicetuskan. Pendidikan, kondisi daerah dan bangsa menjadikan Hamzanwadi sadar bahwa Indonesia harus merdeka, harus menjadi bangsa, dan harus menyejahterakan bangsanya. Kesadaran itu diwujudkan dengan mendirikan NW dan berkiprah melalui NW. Saat berikutnya, ujud dalam bentuk ide dan tindakan itu mampu menggugah kalangan lain di sekitarnya yang memiliki kesadaran yang sama, lalu berjuang bersama-sama. Karena tidaklah heran pada masa-masa awal, semua agenda perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dilakukan kolektif bersama masyarakat dan para murid-muridnya. Nilai kebangsaan yang ditawarkan Hamzanwadi melalui NW mampu mempengaruhi personalitas maupun kolektivitas lain dalam memperjuangkan dan mengisi Indonesia merdeka sebagai bangsa. Bentuk pengaruh itu melalui agenda-agenda bersama mengimplementasikan (*implementation*) secara produktif nilai-nilai kebangsaan dalam mengisi Indonesia merdeka pada masing-masing fase kebangsaan. Munculnya pengaruh dari pikiran dan

agenda-agenda kebangsaan melalui NW bukan satu hal yang sekali jadi. Semuanya membutuhkan perjuangan keras tanpa batas. Majelis-majelis pengajian yang difasilitasi Hamzanwadi selaku ulama yang menguatkannya sebagai tokoh masjid dalam rangka *transmission of islamic knowledge content* merupakan ruang-ruang untuk proses diseminasi (*dissemination*) atau penyebarluasan pikiran dan agenda kebangsaan secara natural. Maka tidak berlebihan, setiap memulai majelis, selalu diingatkan *inner values*: yakin, ikhlas, dan istiqamah, serta *collectivity values*: kompak, utuh, bersatu. Termasuk juga menyampaikan pesan pembangunan untuk kesejahteraan sebagai bangsa, sehingga tidak jarang pengajian disertai informasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga dan balita, kerukunan rumah tangga, kependudukan, pertanian, ketaatan pada hukum agama dan negara, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Media-media strategis untuk maksud ini adalah kumpulan doa (*hizib*), syair (wasiat), lagu (*nasyid*), dan dokumen penguatan komitmen (*bai'at*). Tidak sampai di situ saja, Hamzanwadi juga menguatkan ide dan agenda kebangsaan secara

terstruktur (*socialization*) melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah) dengan memberikannya label NW. Demikian juga, kelompok-kelompok lain yang bertanggungjawab sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan pergerakan kebangsaan melalui NW dilabeli dengan NW: Muslimat NW, Pelajar NW, Pemuda NW, Mahasiswa NW, Sarjana NW, Satuan Tugas NW, dan Majelis-Majelis Ta'lim NW. Jadi, jangan terlalu cepat curiga kalau semua dilabeli NW, tidak untuk sekadar berbeda dengan label-label lain, tetapi label NW adalah simbol, substansi, dan spirit perjuangan-pergerakan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia melalui NW. Jadi, dialektika sejarah NW sebagai tanggung jawab sejarah dalam sejarah kebangsaan Indonesia mengikuti tahapan mempengaruhi (*influence*), diterapkan atau diwujudkan (*implementation*), disampaikan secara alamiah (*dissemination*), dan disampaikan secara terstruktur (*socialization*).

Melalui tahapan dan proses relasi teks, konteks, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dalam narasi sejarah NW berikut matra kebangsaan yang mewarnainya, hal menarik didiskusikan antara lain:

1. Konstruksi nilai kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW muncul pada setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, yakni fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Lama (1947-1965); fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998); dan fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang). Mengingat teks sejarah kebangsaan Indonesia dan sejarah NW lahir dari konteks yang berkesinambungan, berbeda-beda, dan memiliki pengaruh berbeda terhadap kehidupan masyarakat, sehingga nilai kebangsaan yang mewarnai dinamikanya berbeda-beda untuk masing-masing fase sejarah kebangsaan. Fase merebut dan mempertahankan kemerdekaan (1934-1946) bersamaan dengan lahirnya NW (Gerakan/perjuangan/Pergerakan Tanah Air) dengan berbagai *inner values* dan *collectivity values*-nya didominasi oleh matra kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945, “*Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu....*” matra ini sangat beralasan mengingat fase dan masa ini, Indonesia belum merdeka. Fase mengisi kemerdekaan Masa

Orde Lama (1947-1965) bersamaan kiprah Hamzanwadi sebagai representasi NW di tingkat negara didominasi oleh matra kebangsaan sila-sila dalam Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Matra ini penting, sebagai negara yang baru merdeka memerlukan kekuatan bersama sebagai satu bangsa. Fase mengisi kemerdekaan Masa Orde Baru (1966-1998) bersamaan dengan kiprah NW dan Hamzanwadi dalam pembangunan berbagai bidang, didominasi oleh matra kebangsaan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Matra ini penting pada fase dan masa ini mengingat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika cukup terjaga, sehingga negara dan bangsa fokus untuk membangun untuk kesejahteraan. Fase mengisi kemerdekaan Era Reformasi (1999-sekarang), bersamaan dengan kiprah NW melalui generasi baru ulama dan umara didominasi oleh matra kebangsaan penguatan kembali nilai kebangsaan NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Kondisi ini sangat wajar mengingat dunia termasuk Indonesia berada pada puncak revolusi industri fase keempat dengan teknologi komunikasi dan informasi sebagai *core-*

nya. Akibatnya, dunia menjadi kampung kecil tanpa batas, sehingga percaturan global menjadi sangat terbuka. Transisi di era terbuka sangat riskan terhadap keutuhan sebagai bangsa dan negara, kebhinekaan tidak lagi menjadi perekat kohesivitas sosiokultural, bahkan menjadikan semakin menguatnya identitas yang divergen. Sebentar lagi Indonesia akan memperoleh bonus demografi, sedangkan daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Dengan alasan demokrasi modern, Indonesia menganut sistem multipartai, dan banyak persoalan lain yang membutuhkan penguatan nilai kebangsaan menyangkut NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi merupakan kontinuitas sejarah. Hamzanwadi bertanggungjawab meletakkan tonggak, menransmisikannya sebagai warisan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan *knowledge content* yang harus diwariskan melalui tahapan alih pengetahuan dan nilai (*transfer*), hasil transfer akan melahirkan kemampuan memilih

sebagai dasar agenda selanjutnya (*identification*), dan hasil *identification* akan menjadikan generasi masa depan yang memiliki identitas sejara, yakni sejarah bangsanya.

3. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW oleh Hamzanwadi adalah sekumpulan nilai dasar yang menjadi acuan yang implementatif dan aplikatif dalam hidup berkebangsaan sehingga nilai tersebut menjadi dialektis. Untuk maksud ini, Hamzanwadi mengagendakan tindakan sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo (2003) melalui proses *influence*: Hamzanwadi dan NW berada di tengah antara pendidikan sebelumnya dan konteks saat itu yang menginspirasi dan mempengaruhi pikiran dan tindakannya, lalu pikiran dan tindakannya itu mempengaruhi konteksnya pada saat berikutnya. Selanjutnya pikiran dan tindakan itu diimplementasikan untuk agenda-agenda kebangsaan. Sebagai ide, pikiran dan tindakan kebangsaan perlu disampaikan, ditransmisikan secara natural melalui proses diseminasi. Majelis-majelis pengajian memiliki peran strategis untuk maksud diseminasi ini. Tidak cukup melalui

diseminasi, perlu dilembagakan (sosialisasi), maka pikiran dan agenda perjuangan kebangsaan disosialisasi melalui pelembagaan: sekolah-madrasah, dan lembaga-lembaga pengembangan kebangsaan dengan label NW.

Simpulan

Melalui narasi sejarah kebangsaan dalam sejarah NW pada masing-masing fase dan colligation, plot dan strukturnya disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kebangsaan dalam sejarah NW merupakan khazanah lokal yang memiliki matra nasional. Data sejarah menunjukkan matra kebangsaan yang dilahirkan Hamzanwadi melalui NW memiliki sejajar dengan matra kebangsaan Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tungga Ika.

2. Setiap nilai kebangsaan Indonesia memiliki paralelisme waktu sejarah dengan sejarah NW, mengingat proses pergerakan kebangsaan sejak tahun 1900-an, diawali dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan paralel dengan konteks lahirnya NW dengan *inner values* dan *collective values*-nya. Demikian pula pada fase-fase selanjutnya, NW menjadi bagian strategis dalam mengisi kemerdekaan dalam rangka kebangsaan Indonesia.
3. Sejarah kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW merupakan sekumpulan pengetahuan dan nilai yang penting diwariskan pada generasi selanjutnya. Fakta sejarah mencatat, pewarisan oleh Hamzanwadi dilakukan melalui tahap *transfer*, *identification*, dan *admission*. Pengetahuan dan nilai sejarah kebangsaan Indonesia dalam sejarah NW berdialektika melalui tahap *influence*, *implementation*, *dissemination*, dan *socialization*.

Daftar Pustaka

- Ankersmit, F.R. (1991). *Refleksi tentang sejarah: pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah*. (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta. Gramedia. (Buku asli terbit tahun 1990).
- Azra, Azzyumardi. (1994). *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad xvii dan xviii: melacak akar-akar pembaruan pemikiran islam di indonesia*. Bandung. Mizan.
- Brinton, Crane. (1963). *The shaping of modern thought*. Englewood NJ. Prentice Hall.
- Camus, Albert. 1955). *The myth of sisyphus and other essays*. New York. Random House.
- Dillon, H.S. dan Idham s Bey. (2013). *Soekarno dan bangsa* (Prisma, 13/2/3/2013). Jakarta. LP3ES.
- Dilthey, Wilhelm. (1962). *Pattern and meaning in history: thought on history and society*. New York. Harper Torchbook.
- Fattah, Abdul, dkk.. (2017). *Dari nahdlatul wathan untuk indonesia: perjuangan TGKH. muhammad zainuddin abdul madjid (1908-1997)*. Mataram. Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Feith, Herbert and Lance Castle, eds. (1970). *Indonesian political thinking 1945-1965*. (terjemahan LP3ES Jakarta, 1988). Ithaca. Cornell University Pres.
- Gadamer, Hans Georg. (1972). *Truth and historicity*. Heidelberg. The Hague.
- (1987). *Hermeneutics, tradition and reason*. Cambrigde. Polity Press.

- Jordan, S. (2017). When Nationalism Rears its Ugly Head A Review of Architecture as Peacework by Rudolf Steiner. *Lilipoh Spring* (Society and Community).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Lewis, Bernard. (2009). *Sejarah: diingat, ditemukan kembali, ditemu-ciptakan* (terjemahan oleh Bambang A. Widiyanto dari judul asli: History: Remembered, Recovered, Invented). Yogyakarta. Ombak.
- Muladi. (2006). *Wawasan kebangsaan. konsep, nilai, dan makna*. Jakarta. Lemhanas.
- Myers, J. (1983). Saluting the flag is not enough. *Educational leadership*, 40(6), 37-37.
- Nahdi, Khirjan. (2012). *Paradigma transformatif wacana wasiat renungan masa pengalaman baru karya Kyai Hamzanwadi: relasi filsafat praktis dan hermeneutika dalam dinamika sejarah*. Prosiding Seminar Internasional: Meniman Bahasa, membangun Bangsa FKIP Universitas Mataram. Mataram.
- . (2012). *Nahdlatul wathan dan peran modal : studi etnografi-historis modla spiritual dan sosiokultural*. Yogyakarta. Insyira.
- . (2013). *Modal spiritual dan sosiokultural Nahdlatul Wathan*. *Jurnal Islamic Studies Islamica UIN Sunan Ampel Surabaya* Volume VII/2/2013. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- . (2014). *Wasiat renungan masa-pengalaman baru karya Hamzanwadi: Pragmatisme puisi lama pada era Modern menurut cultural studies*. Artikel terbit

- dalam Jurnal *SeBaSa* FKIP Universitas Hamzanwadi, Volume II/1/2014. FKIP Universitas Hamzanwadi. Selong.
- (2016). *Peran modal sosial dalam pengarusutamaan gender pada kalangan muslimat Nahdlatul Wathan*. Jurnal Review Politik. UIN Sunan Ampel Surabaya Volume 06. No. 01. Jun 2016, Surabaya UIN Sunan Ampel.
- Pei, M. (2003). The paradoxes of American nationalism. *Foreign Policy*, 31-37.
- Ricklefs, M.C. (1998) . *Sejarah indonesia modern* (terjemahan dari buku asli: A history of modern indonesia, oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Salim, Agus. (2002). *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Sekretariat Jenderal MPRRI. (2016). *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta. Smith, A. D. (2009). Cosmopolitanism and Nationalism. *The Hedgehog Review, Fall*, 66-75.
- Stromberg, Roland N. (1968). *European intellectual history since 1789*. New York. Meredith-Century-Croft.
- Suhandjati, Sri. (2003). *Ajaran tatakrama yasadipuroII: perpaduan syariat islam dengan budaya jawa*. Yogyakarta. UIN SUKA.
- Suryo, Djoko. (2008). “Pengantar Buku Penjelasan Sejarah Kuntowijoyo”, *Penjelasan sejarah (Historical Explanation)*. Jogyakarta. Tiara Wacana.

- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto pendidikan Nasional: tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi kultural*. Jakarta. Kompas.
- Walsh, W.H. (1967). *Philosophy of history: an introduction*. New York. Harper Book.
- Wang, Z. (2008). National humiliation, history education, and the politics of historical memory: Patriotic education campaign in China. *International Studies Quarterly*, 52(4), 783-806.

LAMPIRAN 2

DRAF KEBIJAKAN NILAI KEBANGSAAN DALAM SEJARAH NAHDLATUL WATHAN

KATA PENGANTAR

Laporan akhir penelitian ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban kinerja penelitian tahun pertama (2018) untuk masuk ke proses tahun kedua. Sesuai dengan usulan sebelumnya, capaian tahun ke-1 (2018) disampaikan dalam bentuk: 1) *Prototype* dokumen kebijakan Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan, yang *feasible* diimplementasikan tahun ke-2 (2019). Hingga saat ini, *prototype* kebijakan terkait kelayakan akademik sedang disiapkan Bersama mitra; 2) Draft buku monograf dari hasil kajian ini, saat ini sedang diusulkan ISBN kepada Perpustakaan Nasional RI (bukti terlampir); 3) Artikel laporan akhir ini sudah di presentasikan pada *The 4th Hamzanwadi International Conference on Education* tanggal 3-4 November 2018. Selain itu, artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sudah di *submitted* ke *Journal of Indonesian Islam (JIIS)* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; dan 4) Monitoring dan evaluasi eksternal sudah dilaksanakan tanggal 12 November 2018 di Universitas Hamzanwadi

Capaian kinerja penelitian hingga saat ini dirasakan memberi pengalaman berharga kepada tim peneliti sesuai tujuan dan manfaat program ini sebagaimana dalam Pedoman Penelitian dan PkM (XI). Atas capaian ini, tim peneliti patut bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang tiada terhingga sehingga dapat melaksanakan penelitian ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Peneliti dan tim mewakili Universitas Hamzanwadi menyampaikan terima kasih atas fasilitas penelitian yang disiapkan oleh Kementerian Ristek-Dikti melalui DRPM. Terimakasih juga disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih kepada tim peneliti dan pembantu lapangan yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan kajian ini. Terima kasih juga kepada para sumber data yang bersedia meluangkan waktu berdiskusi untuk kebutuhan penelitian ini. Tidak lupa terima kasih kepada P3MP Universitas Hamzanwadi yang menyediakan informasi dan layanan kebutuhan kajian ini sejak proposal hingga laporan akhir ini. Terima kasih.

Pancor, Nopember, 2018

Ketua Tim Peneliti

ACKNOWLEDGMENT

Dengan selesainya penelitian tahun pertama (2018) ini. Tim peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur sebagai mitra dalam penelitian ini.
3. Para pengurus cabang NW se-Pulau Lombok yang telah membentuk dalam penyediaan data dan triangulasi data lapangan penelitian ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
<i>ACKNOWLEDGMENT</i>	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Rasionalitas Kebijakan Nilai Kebangsaan dalam Sejarah NW	5
1.2 Tujuan Kebijakan	10
1.3 Ruang Lingkup Kebijakan (area dan materi)	10
BAB II NILAI KEBANGSAAN DALAM SEJARAH NW	
2.1 Fase Merebut, Mempertahankan Kemerdekaan, dan Peran NW	
a. Lahirnya NW dan NWDI	11
b. Lahirnya NBDI	14
c. Masa Proklamasi Kemerdekaan	16
d. Gerilya dan Penyerangan NICA	17
2.2 Fase Mengisi Kemerdekaan, Orde Lama dan NW dalam Diplomasi Kemerdekaan	
a. Hamzanwadi Merepresentasi Negara (Anggota Delegasi Kehormatan Hajji NIT)	18
b. Menghimpun Sumber Daya Lokal (Hamzanwadi sebagai Dewan Syuriah PUIL, Masyumi, dan Konsulat NU)	19
c. NW sebagai Aset Negara-Bangsa	20
2.3 Fase Mengisi Kemerdekaan, Orde Baru dan NW dalam Pembangunan	
a. Hamzanwadi: Dialektika Ulama-Umara	21
b. NW, NWDI, NBDI dan Kontekstualisasi Dinamika Sejarah Bangsa	22
2.4 Fase Mengisi Kemerdekaan Era Reformasi dan NW Menjawab Sejarah Bangsa	
a. NW Menjawab Sejarah	23
b. Narasi Sejarah NW adalah Sejarah Bangsa	24
c. Tokoh NW dan Pengakuan Negara	25

BAB III	PROSES , SASARAN DAN ARUS UTAMA KEBIJAKAN	26
BAB IV	PENGGORGANISASIAN PROSES KEBIJAKAN	27
	DAN TINDAK LANJUT	
BAB V	PENUTUP	28
	DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Rasionalitas Kebijakan Nilai Kebangsaan dalam Sejarah NW

Konsep kebangsaan dipahami sebagai kesadaran individu dan kolektif tentang bangsa menyangkut kemerdekaan, ideologi, kesejahteraan, persatuan, kebudayaan, dan aspek kecerdasan lainnya (Muladi, 2006). Dewasa ini, pemahaman konsep yang mendasari tindakan berkebangsaan dalam konteks keindonesiaan mengalami berbagai tantangan. Tanpa bermaksud mereduksi konteks yang terjadi dapat dikemukakan beberapa fakta: pengingkaran atas hak dasar berketuhanan dan berkemanusiaan; menguatnya identitas individual dan menafikan kebhinekaan; kecenderungan menguasai sumber daya secara individual dengan mengabaikan kepentingan massal, lambat laun akan mengganggu cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Friedman dalam buku *The World is Flat*, yang mengatakan bahwa abad ke-21 telah mengubah wajah dunia bukan lagi dunia yang bulat melainkan dunia yang rata (Tilaar, 2005), tampak tidak berlebihan dengan realitas terbuka dan luasnya berbagai akses yang menjelma menjadi budaya global. Instrumen bahasa dan arus modal global, secara perlahan namun pasti telah mengaburkan identitas asli dalam konteks Indonesia sebagai suatu bangsa. Sebagai elemen bangsa yang sadar akan kondisi ini, tidaklah mungkin akan larut dalam kondisi kontekstual tersebut dengan hanya meratapinya tanpa proaktif dalam mengembalikan kesadaran dan tindakan kolektif dalam memulihkan keadaan dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu hal strategis dilakukan adalah menemukan konstruksi nilai kebangsaan dalam sejarah *Nahdlatul Wathan* (disingkat NW) sebagai khazanah lokal yang memiliki matra nasional dan memenuhi kebutuhan universal masyarakat Indonesia dalam memahami konsep dan tindakan kebangsaannya, karena kelahiran organisasi sebagai gerakan, dinamika organisasi dan gerakan, hingga survivalitas dewasa ini penuh dengan tidak lepas dari entitas berkebangsaan melalui ber-Pancasila, ber-Bhineka Tunggal Ika, ber-NKRI, yang berdasarkan UUD 1945.

NW sebagai satu organisasi massa Islam, lahir di Lombok Nusa Tenggara Barat, Tahun 1934, lahir dalam kondisi bangsa belum mengenal indentitas Indonesia, sehingga ide kelahirannya tidak lepas dari kesadaran dan keinginan untuk merdeka. Pada fase awal berdirinya, NW sangat kental dengan jiwa dan perjuangan kemerdekaan. Fase selanjutnya di era kemerdekaan, melalui instrumen pendidikan (pengetahuan Islam dan umum), dakwah, sosial, dan pengembangan ekonomi, NW tetap konsisten membangun kesadaran

dan praktek kebangsaan Indonesia, hingga era globalisasi dewasa ini. Upaya-upaya tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk konstruksi nilai kebangsaan yang komprehensif dalam perjalanan sejarah menyangkut filosofi nilai dan strategi pemassalan sehingga menjadi milik kolektif yang disadari dan terimplementasi. Konstruksi nilai kebangsaan komprehensif dalam perjalanan sejarah dalam kajian ini dipahami sebagai perumusan yang memanjang dan khusus sebagai tradisi sejarah serta pemilahan berdasarkan aspek-aspek kebangsaan: kemerdekaan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem pertahanan-keamanan melalui *hermeneutics* dan *verstehen* (menafsir dan memahami) gagasan dan tindakan yang tertuang dalam berbagai artefak sejarah NW hingga saat ini (Djoko Suryo, 2008).

Wacana kebangsaan dalam perspektif sejarah suatu bangsa menjadi relasi kausalitas yang beragam. Sejarah Indonesia mencatat kemunculan ide-ide kebangsaan dimulai sejak tiga dasawarsa pertama abad XX. Ricklefs (1998) menyebutnya sebagai “Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional”, yang ditandai dengan berbagai perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama. Kesadaran yang pertama muncul adalah tentang suasana keterjajahan, dan pada saat yang sama munculnya gerakan-gerakan anti penjajahan. Beberapa catatan sejarah sebagai kelanjutan perubahan besar dalam persoalan politik, budaya, dan agama dengan munculnya ide-ide baru mengenai organisasi yang berpengaruh pada ide tentang kepemimpinan baru, definisi-definisi baru identitas yang melahirkan analisis baru tentang lingkungan keberagamaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Perspektif komparatif sejarah kebangsaan, Lewis (2009) mencatat kesadaran kebangsaan suatu bangsa memiliki relasi kausal yang berbeda. Dalam hal fungsi dan tujuan, Lewis membagi catatan sejarah dalam tiga klasifikasi: *remembred history*, *recovered history*, dan *invented history*. Merujuk Bhaskar (Salim, 2002), sejarah Indonesia mengalami tiga fase penting: *the genuine* (awal) (pra dan awal kemerdekaan); *the change* (perubahan) (akhir orde lama hingga akhir orde baru); dan *the development* (pengembangan) (fase kedua) (akhir orde baru, orde reformasi hingga saat ini). Berdasarkan pandangan Lewis dan Bhaskar, kebangsaan dalam sejarah Indonesia dipahami sebagai proses pembentukan pada fase awal (pra kemerdekaan) yang melahirkan ide dan gagasan merdeka, keberagamaan, politik, sosial, dan budaya. Secara performatif, implementasi nilai-nilai kebangsaan dikenal dengan wawasan kebangsaan mengalami masa kegemilangan pada fase perubahan, walaupun dirasakan penuh dengan kesemuan dan

tendensi pelanggaran kekuasaan rezim orde baru. Pada fase pengembangan, dengan berubahnya sistem demokrasi dan ketatanegaraan, dan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi dirasakan kesadaran dan implementasi nilai kebangsaan mengalami krisis. Karena itu, proses pengungkapan kembali nilai kebangsaan Indonesia dan mereformulasi implementasinya merupakan agenda *recovered history* dan *invented history* sebagaimana dikemukakan Lewis. Dalam sebuah forum Internasional tentang pendidikan karakter, Nahdi (2014) menyebutnya sebagai praktek “melupakan dan tidak mengapresiasi sejarah bangsa”. Proses yang akan dilakukan adalah mengingat kembali peta konstruksi nilai kebangsaan yang bersumber dari khazanah lokal dan bermatra nasional, dipetakan kembali dan mereformulasi implementasinya.

Berbagai perbedaan kausal yang melahirkan ide dan implementasi nilai kebangsaan menggambarkan dinamika relasionalnya secara unik sesuai pengalaman berkebangsaan masing-masing peradaban bangsa. Bangsa China, sebagaimana dideskripsikan Zheng Wang (2008) tentang China di era 80-an sebagai bangsa yang korup, anti demokrasi, dan pemimpin yang dikator. Puncak dari semua kondisi berbangsa tersebut adalah tragedi Tiananment. Melalui kajiannya, Zheng Wang merumuskan suatu model pendidikan sejarah tentang ideologi kebangsaan China dengan mengenalkan kembali situs-situs sejarah bangsa China, seperti keunggulan dalam perang, mitologi, dan sikap heroik bangsanya dalam membela kebenaran yang diyakini. Dengan mengutip Pennebaker (1997), Zheng Wang meyakini bahwa memori kolektif tentang nasionalisme, tidak saling mencurigai, dan menghargai perbedaan menjadi akar kuat atmosfer kecintaan pada bangsa dan kebangsaan. Dengan pernyataan yang bersifat manasuka, Zheng Wang menyimpulkan, jika hendak membentuk jiwa nasionalisme dan kebangsaan secara alamiah harus dilakukan dengan mempengaruhi pikiran dan emosi kolektif setiap waktu dan tempat dalam konteks pendidikan. Media komunikasi yang berbasis teknologi, seperti film, radio, dan televisi dapat mengakselerasi proses tersebut.

Lain China, beda pula Amerika dalam memahami kebutuhan nilai kebangsaan bagi rakyat dan bangsanya. Jika China memandang nilai dan implementasi nilai kebangsaan berdasarkan kebutuhan demokrasi, keadilan, dan transparansi yang diinspirasi dari pengalaman buruk bangsanya secara internal, bangsa Amerika memandang kebangsaan berdasarkan nilai-nilai universal demokrasi, penegakan hukum, pasar bebas, dan institusi atau pembagian kekuasaan. Minxin Pei (1998) dalam *The Paradoxes of American Nationalism* menggambarkan kondisi internal Amerika sebagai negara tujuan urbanisasi

para imigran dari berbagai belahan bumi. Untuk menyatukan pandangan tentang bangsa Amerika, nilai kebangsaan tidak mungkin direduksi melalui keunikan masing-masing nilai milik para imigran, melainkan harus melebur semuanya menjadi nilai bangsa Amerika dalam kebijakan *melting pot*. Presiden George Walker Bush pernah mengatakan bahwa nilai kebangsaan bagi Amerika bukanlah suatu jalan: bukan jalan demokrasi, bukan jalan hukum, bukan jalan birokrasi, dan bukan jalan pasar bebas, tetapi semuanya merupakan suatu keyakinan individu yang menjelma menjadi keyakinan kolektif. Untuk terciptanya kondisi tersebut, semua bangsa Amerika harus memperjuangkannya sebagai pandangan masa depan, walaupun dengan perang sekalipun. Kondisinya menjadi sangat berbeda dengan realitas kebangsaan di Indonesia yang sejak sebelum bernama Indonesia sudah berbeda satu sama lain dalam berbagai hal: agama, budaya, etnik, adat istiadat, dan bahasa. Ketika menjadikan suatu identitas kebangsaan Indonesia, diperlukan proses sublimasi nilai dasar yang bersumber dari berbagai entitas berbeda untuk ditransformasikan dalam entitas kebangsaan yang dimiliki bersama. Proses ini bermakna bahwa secara substantif pertimbangan lokalitas, geografi, etnisitas, dan agama yang berbeda menjadi acuan dalam membentuk nilai dan implementasi nilai kebangsaan yang meng-Indonesia. Proses institusionalisasi dan strukturisasi nilai dan implementasi nilai kebangsaan menjadi ranah kebijakan dan birokrasi.

Perbandingan antara peta konstruksi nilai dan implementasi nilai kebangsaan bangsa China, Amerika, dan Indonesia menunjukkan bahwa kondisi Indonesia jauh lebih kompleks dibanding keduanya. Sebagai negara yang tidak pernah mengalami kolonialisme, China relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaannya. Amerika, walaupun pernah dijajah dan sebagai negara kumpulan para imigran, relatif lebih mudah menentukan arah dan kebijakan kebangsaan, serta melakukan penekanan jika terjadi persoalan dalam implementasinya. Indonesia, selain pernah menjadi negara jajahan, juga menjadi bangsa yang penuh dengan berbagai perbedaan. Pengalaman menjadi bangsa terjajah melahirkan nilai kebangsaan yang merdeka, dan nilai kebangsaan yang meng-Indonesia harus mengakomodasi setiap perbedaan yang menjadi keunikannya. Kondisi kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah dan bangsa yang unik dengan berbagai perbedaan memiliki dua agenda strategis, sebagaimana digambarkan John W Myers (1983); kebangsaan mendahulukan kepentingan bangsa, sedangkan patriotisme menempatkan cita-cita bangsa. Konteks keindonesiaan saat ini membutuhkan keduanya. Sikap kebangsaan yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa dewasa ini dan masa depan

haruslah memiliki sikap patriotik dengan menyadari dan memahami cita-cita bangsa di masa lalu sebagai bangsa terjajah, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sikap patriotisme, setiap anak bangsa memiliki penghargaan atas masa lalu bangsanya dan meneladaninya terus menerus.

Harus disadari bahwa sikap kebangsaan akan mengalami persoalan dalam dinamika masyarakat suatu bangsa. Dinamika masyarakat tradisional menuju kosmopolitan berdampak pada konstruksi nilai kebangsaan, sebagaimana gambaran masyarakat tardisional Eropa menjadi kosmopolitan pasca Perang Dunia dan Revolusi Perancis di gambarkan Anthony D. Smith (2009) dalam *Cosmopolitanism and Nationalism*. Smith menggambarkan tiga kelompok kosmopolitan Eropa: individualis, multikultural, dan statis. *Pertama*, kelompok individualis mengutamakan hal-hal mendasar tentang hak asasi, seperti pengakuan atas rasionalitas, kehormatan, nilai moral, kebebasan, dan rasa aman. Kelima hal dimaksud tidak terikat oleh kewarganegaraan seseorang, kelas sosial, jender, ras, dan suku/etnik. *Kedua*, kelompok multikultural meyakini bahwa persoalan ras dan suku/etnik tidak bisa disederhanakan atau direduksi atas nama apa pun dan dengan alasan apa pun dalam konteks berkebangsaan. Keyakinan ini lahir dari realitas bahwa ras dan etnik berbeda sejak pertama keberadaannya. Dalam konteks ini, konsep kebangsaan lahir menawarkan katalis baru sebagai identitas bersama yang tidak menafikan identitas asli masing-masing ras dan etnik. *Ketiga*, kelompok statis yakni kelompok yang relatif tidak terpengaruh dengan dinamika yang berkembang, mereka cukup bertahan dan membatasi diri pada nilai-nilai kebangsaan lama mereka dengan dipandu oleh sistem hukum yang ketat. Melalui ketiga kelompok kosmopolit yang digambarkan Smith, khusus pada multikultural sebagaimana kasus Indonesia, terlebih pada dinamika global dewasa ini, penting menempatkan budaya-budaya lokal sebagai khazanah ras dan etnik yang berbeda-beda sebagai suatu kekuatan, sebagai basis nilai, sebagai pemandu gerak peradaban, dan harus memiliki perekat kokoh satu sama lain melalui penciptaan entitas universal. Seth Jordan (2017) dalam review terhadap *Architecture as Peacwork* (Rudolph Steiner), ditulis dalam *When Nationalism Rears Its Ugly Head* menjelaskan pentingnya pandangan konsep kemanusiaan yang satu sama lain saling membutuhkan, tidak ada yang berdiri sendiri, dan budaya universal harus dijadikan perekat dan fondasi nilai bersama dalam konteks kebangsaan. Tidak disangkal bahwa Nahdlatul Wathan sebagai lembaga yang lahir dari khazanah lokal bermatra nasional menawarkan dan mengembangkan nilai universal dalam berkebangsaan terkait kemerdekaan, keberagamaan, instrumen organisasi, ide-ide

modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Pendiri Nahdlatul Wathan paham bahwa kebutuhan akan kemerdekaan, agama, organisasi, modernitas, sosial-budaya, politik, dan ekonomi tidak terikat karena beraneka suku bangsa di Indonesia.

1.2 Tujuan Kebijakan

Secara umum dokumen kebijakan ini ditujukan sebagai *blue print* rekayasa sosial dalam bentuk penyadaran, pemahaman, dan tindakan kebangsaan oleh seluruh komponen bangsa, yang bersumber dari dinamika sejarah bangsa sejalan dengan keberadaan NW dalam sejarah tersebut. Secara khusus, bertujuan untuk: 1) dipahaminya matra kebangsaan yang lahir dan muncul dari sejarah NW pada setiap fase kebangsaan; 2) dijadikannya acuan nilai kebangsaan sejarah NW sebagai bagian inner dalam diri setiap komponen bangsa; dan 3) diimplementasikannya nilai kebangsaan dalam sejarah NW dalam menjalankan tanggung jawab sebagai bangsa oleh setiap komponen bangsa.

1.3 Ruang Lingkup Kebijakan (area dan materi)

Ruang Lingkup Kebijakan dibagi dalam domain area geografis dan materi, sebagaimana dalam matriks di bawah ini.

Geografis/Wilayah	Materi
5 Kabupaten/Kota se Pulau Lombok (Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara)	Sejarah Kebangsaan: 1. Fase Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan 2. Fase Mengisi Kemerdekaan Orde Lama 3. Fase Mengisi Kemerdekaan, Orde Baru 4. Fase Mengisi Kemerdekaan Era Reformasi

BAB II NILAI KEBANGSAAN DALAM SEJARAH NW

2.1 Fase Merebut, Mempertahankan Kemerdekaan, dan Peran NW

a. Lahirnya NW dan NWDI

Fase ini ditandai dengan lahirnya NW, dari bahasa Arab *nahdlah* berarti perjuangan, kebangkitan, atau pergerakan, dan *wathaniah*, berarti bangsa, tanah air, atau negara. Sebagai teks, kata NW merupakan diksi dengan nuansa makna yang komprehensif. Kebangkitan, perjuangan, pergerakan berkaitan dengan integrasi, simultansi, dan konsistensi tindakan berdasarkan pemikiran tentang *wathaniah* 'bangsa, tanah air, negara, yang ketika teks ini dimunculkan, konteks Indonesia belum lahir sebagai bangsa berdaulat, masih sebagai tanah air terjajah, dan belum berbentuk negara. Agenda kebangsaan menyangkut kemerdekaan, berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal sama sekali belum terwujud, karena konteks awal, yakni merdeka yang mempersyaratkan semua agenda itu belum terwujud. Karena konteks sebagai Indonesia belum merdeka, dan semua agenda kebangsaan Indonesia belum dapat diwujudkan, pemikiran Hamzanwadi melalui NW pertama dan utama adalah membangun kesadaran tentang Indonesia merdeka. Setelah teks NW dalam konteks masyarakat ketika itu, tanggapan masyarakat dengan munculnya pemikiran membangun kesadaran Indonesia merdeka tidak serta merta berterima. Penolakan muncul dari tiga kelompok yang berbeda dengan argumentasi masing-masing. Kelompok pertama, adalah kalangan kolonial Hindia Belanda, yang selalu curiga dengan agenda-agenda kelompok pribumi karena mereka ingin melanggengkan kekuasaannya sebagai bangsa kolonial. Untuk menyasati ini, Hamzanwadi meyakinkan Pemerintah Kolonial Belanda bahwa agenda melalui NW adalah pendidikan agama Islam, bukan agenda-agenda untuk Indonesia Merdeka. Karena itu, setelah kata NW, dilekatkan kata Diniyah Islamiyah, disingkat NWDI, walaupun sesungguhnya, selain agenda pendidikan agama Islam, agenda penyadaran tentang Indonesia merdeka tetap disisipkan oleh Hamzanwadi kepada murid-muridnya. Kelompok kedua yang menolak kehadiran NW-NWDI dan Hamzanwadi adalah elit lokal yang selama ini memiliki pengaruh secara sosial dan kultural di masyarakat. Kelompok ini terbelah dua, satu kelompok berafiliasi dengan kolonial Belanda, sehingga penolakannya karena memperoleh fasilitas dari kolonial Belanda. Fakta sejarah ini terbukti melalui beberapa kali terbongkarnya agenda-agenda penyadaran Indonesia Merdeka oleh Hamzanwadi bocor dan diketahui oleh kolonial Belanda, lalu digagalkan. Satu lagi

kelompok yang memang memiliki pengaruh karena status sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat. Alasan penolakan kelompok kedua ini adalah takut kehilangan pengaruh di masyarakat, sehingga mereka terganggu dalam proses reproduksi sosial, ekonomi, dan budaya. Kelompok ketiga yang menolak adalah beberapa di antaranya menjadi tokoh agama Islam dan melakukan pembelajaran agama Islam secara tradisional. Penolakan mereka karena menganggap pola dan substansi pendidikan agama Islam yang ditawarkan Hamzanwadi melenceng dari ajaran Islam yang dipahami sebelumnya. Namun demikian, Hamzanwadi tetap pada pemikiran dan agendanya melakukan penyadaran tentang keberagaman Islam dan kebangsaan.

Sebagai pemikiran dan penyadaran tentang kebangsaan Indonesia dengan berbagai entitas dengan kemerdekaan sebagai entitas pertama dan utama, sebagaimana dikatakan Brinton (1963) bahwa pemikiran dan penyadaran sejarah bertanggung jawab memberi pengaruh pada peradaban banyak orang di masa sejarah itu dan masa-masa selanjutnya. Memahami Brinton, Hamzanwadi dengan pemikiran dan penyadaran Indonesia merdeka menjadi sejajar dengan idealisme objektif Indonesia setelah merdeka menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat, berideologi, berkonstitusi, berkesatuan, dan berbhineka (Sekr. MPRRI, 2016). Ketika Hamzanwadi menyebut merdeka menjadi syarat utama ber-Indonesia melalui *Nahdlat Wathaniah*, fase sejarah berikutnya (18 Agustus 1945) dirumuskan:

“...kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”.... (Pembukaan UUD 1945).

Fenomena sejarah dengan kata “MERDEKA” selanjutnya terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, Kuntowijoyo (2003) menyebutnya sebagai genesis pemikiran, bahwa tidak ada yang baru di kolong langit. Pemikiran dan tindakan penyadaran oleh Hamzanwadi tentang Indonesia merdeka sehingga memenuhi persyaratan dikatakan sebagai bangsa merupakan habitualitas individual yang kompleks dan futuristik melalui proses intelektual yang dilaluinya. Proses intelektualitas dimaksud berupa sublimasi pengalaman sosiokultural sebagai bagian dari bangsa yang terjajah, dan analisis kritis terhadap teks-teks dalam Islam (sebut Qur’an, Hadist, dan petunjuk ulama). Sebagai hasil futurisasi Hamzanwadi pada sebelum Indonesia merdeka memiliki kontinuitas sejarah di masa kini dan masa depan dengan salah satu matra kebangsaan Indonesia, yakni dokumen UUD 1945, yang di dalamnya tertera rumusan “MERDEKA” sebagai milik semua bangsa.

Bangsa dalam pemahaman ini menjadi sangat luas melintasi semua batasan peradaban kemanusiaan. Masih mengacu Kuntowijoyo (2003) bahwa pemikiran untuk menyadarkan sebagai genesis, teks NW yang muncul ketika konteks sebelum Indonesia merdeka, yang berpengaruh terhadap proses implementasi keyakinan ketuhanan melalui instrumen agama, termasuk agama Islam, Hamzanwadi menempatkan kemerdekaan menjadi jaminan berlangsungnya ajaran-ajaran ketuhanan. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia melalui Pancasila, khususnya "*Ketuhanan yang Mahaesa*" menjadi sejalan dengan pikiran penyadaran Hamzanwadi dengan *Nahdlat Wathaniah*-nya. Sebagai satu kesatuan integral dengan tanggung jawab berketuhanan, hak individu dan kolektif berikutnya adalah penegakan-pemenuhan hak-hak kemanusiaan dalam arti menyeluruh: diakui sebagai manusia individu dan sosial, diakui sebagai entitas berpikir, dan berbudaya dalam membentuk ada kemanusiaan maka pikiran penyadaran kemerdekaan melalui NW mengakomodasi matra kebangsaan Pancasila, "*kemanusiaan yang adil dan beradab*". Demikian selanjutnya, karena MERDEKA adalah milik semua anak bangsa dengan berbagai atribut: suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadatnya, dan semuanya harus dipersatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia, tidak memerlukan syarat lain kecuali merdeka. Karena itu, matra kebangsaan Indonesia, "*Persatuan Indonesia*" memiliki kesejajaran dengan pemikiran-penyadaran MERDEKA oleh Hamzanwadi melalui NW. Adakah konteks sejarah yang memungkinkan proses demokrasi, seperti musyawarah-mufakat, dan proses-proses transformasi nilai kebersamaan sebagaimana pepatah lama "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" dapat berlangsung tanpa konteks MERDEKA? Rasanya tidak mungkin! Semuanya membutuhkan kemerdekaan sebagai bangsa. Karenanya, matra Pancasila "*Keryaktyan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*" menjadi sejalan dengan penyadaran tentang MERDEKA sebagai bangsa, bangsa Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW. Jika sila-sila dalam matra kebangsaan Pancasila, keseluruhannya mempersyaratkan kemerdekaan, dan keempatnya mengantarkan terciptanya "*keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* (rakyat dan bangsanya), maka tidaklah mungkin keadilan dapat tercipta tanpa konteks bangsa MERDEKA. Karena itu, Hamzanwadi dengan NW memiliki futuristik yang efektif dalam menawarkan pikiran-penyadaran kemerdekaan sebagai syarat utama dan pertama sebagai bangsa, bangsa Indonesia.

Pikiran dan penyadaran tentang kemerdekaan sebagai syarat kebangsaan Indonesia oleh Hamzanwadi melalui NW dan NWDI berlanjut pada tahap konsistensi dalam bentuk

proposisi sebagai pilar strategis perjuangan melahirkan kebangsaan dan keagamaan. Proposisi dimaksud adalah Yakin, ikhlas, dan istiqamah sebagai tiga entitas hirarkis, bersiklus, dan integral membentuk keteguhan hati dan pikiran atas kebenaran tentang pentingnya berkebangsaan dan beragama, serta bersungguh-sungguh menujukannya dalam keseharian secara konsisten. Ketiga proposisi pilar strategis ini, dalam tradisi manajemen modern dewasa ini setara dengan acuan nilai yang dimiliki oleh setiap komunitas dalam bekerja bersama untuk tujuan bersama. Dalam relasi antarmanusia dengan satu cita-cita dan tujuan bersama, yakni kemerdekaan sebagai bangsa, harus memiliki *inner values*, yang meyakinkan diri masing-masing berdasarkan analisis nalarnya bahwa apa yang akan dilakukan dan diperjuangkan dalam bentuk kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia akan tercapai. Keyakinan itulah yang mendorong semangat mereka ketika itu untuk secara konsisten melakukan agenda-agenda perjuangan untuk tercapainya Indonesia merdeka dan menjadi suatu bangsa. Keyakinan, keikhlasan, dan keistiqamahan merupakan internalisasi spiritualitas kepada yang menganugerahkan segala cita-cita dan tujuan. Matra Pancasila tentang “*Ketuhanan Yang Mahaesa*” menjadi strategis dikaitkan dengan maksud Indonesia sebagai bangsa dan bangsa Indonesia yang beragama, atau meyakini adanya Tuhan dengan berbagai ketentuannya. Selain *inner values* yakin, ikhlas, dan istiqamah, terdapat tiga proposisi lain yang ditawarkan Hamzanwadi dalam pemikiran dan kesadaran kemerdekaan untuk menjadi Indonesia berkebangsaan dalam posisi sebagai *collectivity values*, yakni kompak, utuh, dan bersatu. Posisi *collectivity values* ini sebagai *supporting spirit* bagi keseluruhan yang berjuang bersama dalam pencapaian Indonesia merdeka sebagai bangsa, bangsa Indonesia. Rasionalisasinya, setiap yang diyakini, diikhlasakan, dan diistiqamahkan untuk diperjuangkan, tidak mungkin bisa terujud tanpa adanya kekompakan, keutuhan, dan persatuan. Karena itu, matra “*Persatuan Indonesia*” dalam sila ke-3 Pancasila menjadi penting, strategis, dan sejajar dengan maksud Hamzanwadi dengan proposisi kompak, utuh, dan bersatu dalam memperjuangkan Indonesia merdeka menjadi suatu bangsa, bangsa Indonesia.

b. Lahirnya NBDI

Senada dengan Kuntowijoyo, Louis O. Mink yang membahas *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood*, sebagaimana dikutip Sri Suhandjati (2003), tahapan berikut dari proses pemikiran untuk kesadaran adalah tahapan evolusi pemikiran. Evolusi pemikiran untuk kesadaran berkaitan dengan penambahan, perluasan dan kedalaman *scope* pemikiran menyangkut aspek-aspek kemanusiaan. Pada fase lahirnya

NW dan NWDI kental dengan nuansa pemikiran dan kesadaran pentingnya merdeka sebagai syarat pertama dan utama berbangsa, diikuti dengan *inner values* yakin, ikhlas, istiqamah, berikut kompak, utuh, bersatu sebagai *collectivity values*, dan tersirat maupun tersurat sejajar dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Evolusi berikutnya terjadi ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Dalam hal pemikiran dan kesadaran kemerdekaan sebagai syarat berbangsa dan beragama masih tetap mewarisi evolusi ini, diperluas pada sasaran dan *benefecieries*-nya, yakni kaum wanita. Kondisi evolusi ini wajar karena instrumen transmisi pemikiran untuk kesadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagamaan itu adalah institusi pendidikan, berbentuk madrasah. Secara universal dan mendasar, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Untuk memenuhi Hamzanwadi keterpenuhan hak dasar dalam hal pendidikan, Hamzanwadi mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita, yang diberi nama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI).

Dua kondisi yang disikapi dengan lahirnya NBDI sebagai habitualitas kontekstual Hamzanwadi; *pertama*, agenda dan akibat politik etik kolonial Belanda, tidak semua kalangan pribumi termasuk wanita memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. *Kedua*, budaya patriarkhi masyarakat Sasak ketika itu menempatkan wanita pada lapis kedua di masyarakat. Habitualitas kontekstual Hamzanwadi, selanjutnya melahirkan pikiran futuristik bahwa wanita juga harus diberikan kesempatan yang sama sebagaimana pria untuk mengenyam pendidikan. Dalam pandangan demokrasi pendidikan, pikiran futuristik ini memenuhi maksud dalam agenda pendidikan untuk semua (*education for all*). Tiga frasa kunci dalam narasi besar pemikiran dan kesadaran merdeka untuk kebangsaan dan keberagamaan oleh Hamzanwadi melalui NBDI. *Pertama*, frasa tujuan pendidikan untuk mencerdaskan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tentang tanggung jawab negara sebagai bangsa, yakni...’mencerdaskan kehidupan bangsa’,....kata “mencerdaskan” dalam konteks ini, dalam tradisi Hermeneutika Kritis bermakna kecerdasan intelektual. Dengan kecerdasan intelektual itulah diharapkan ada kesadaran tentang pentingnya merdeka sebagai suatu bangsa, sehingga dengan kesadaran itu, wanita memiliki kepentingan, cicta-cita, dan tujuan sama dengan pria, yakni terwujudnya Indonesia merdeka, sebagai bangsa Indonesia. *Kedua*, frasa pendidikan sebagai hak dasar manusia, pria dan wanita (*education for all*). Frasa ini menyiratkan pada bagian utuh Pembukaan UUD 1945, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, selanjutnya dikenal sebagai sila ke-2 Pancasila. Pendidikan dihayatkan untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk pada tahap awal

kesadaran akan pentingnya merdeka sebagai bangsa, lalu perolehan pendidikan sudah memenuhi aspek hak dasar kemanusiaannya untuk menjadi lebih beradab. Ketiga, frasa terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi pria dan wanita menyiratkan aspek keadilan bagi seluruh anak bangsa (pria dan wanita). Bagian utuh Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, selanjutnya kita kenal sebagai sila ke-5 Pancasila.

c. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Kajian sejarah dengan pendekatan teks, teks lahir dari konteks, dan teks-konteks bergerak dalam ruang sosial masyarakat pemilik sejarah, dan produk dari ketiganya disebut sebagai kejadian atau fenomena sejarah. Teks NW, NWDI, NBDI yang lahir dari buah pikiran dan kesadaran merdeka sebagai syarat pertama dan utama sebagai bangsa oleh Hamzanwadi, selanjutnya kita sebut sebagai pergerakan, perjuangan, sebagaimana pergerakan dan perjuangan anak bangsa lainnya demi Indonesia merdeka bukanlah sebuah absurditas sebagaimana digambarkan dalam tokoh mitis *Sisyphus* oleh Albert Camus dalam *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (Albert Camus, 1955), atau pemikiran Perang Dunia II (PD II) yang melahirkan kesia-siaan, tetapi pikiran dan kesadaran oleh Hamzanwadi dengan teks, konteks, dan hubungan teks-konteks dengan masyarakat beserta berbagai proposisi *inner values-collectivity values*-nya membuahkan hasil gemilang, dengan diproklamákannya Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tentu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil kerja kolektif seluruh anak bangsa di berbagai belahan bumi Indonesia (sejak 17 Agustus 1945) disebut Indonesia sebagai ganti Hindia Belanda. Karena itu, berita gembira tentang Indonesia Merdeka harus disebarkan kepada siapa saja yang mencita-citakannya. Pikiran kesadaran yang dilakukan Hamzanwadi dalam konteks lokal, yang akhirnya membuahkan hasil pertama: Indonesia Merdeka, merupakan pikiran dan kesadaran menyejarah, sebagaimana Gadamer (1972), “*Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein*” atau kesadaran menyejarah, yakni Hamzanwadi memenuhi tanggung jawab sejarah melalui bergiat mencipta masa depan.

Teks lain sejarah Kemerdekaan Indonesia mencatat, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan menyerahnya pasukan pendudukan tentara Jepang kepada Tentara Sekutu. Teks ini penting untuk konsolidasi berita tentang *de facto* Indonesia Merdeka. Untuk kepentingan konsolidasi berita *de facto* Indonesia Merdeka, Hamzanwadi menginisiasi tiga agenda: *pertama*, konsolidasi kepada para santri dan pejuang lokal untuk tetap waspada, karena situasi semacam ini dapat menimbulkan berbagai kondisi transisi

konteks lokal. *Kedua*, Hamzanwadi menginisiasi pengibaran Bendera Merah Putih sebagai simbol ke-Indonesiaan. Dalam nalar Hermeneutika Kritis, dapat dikatakan, inilah saat pertama kalinya Merah Putih berkibar di tanah Lombok di awal Indonesia Merdeka. *Ketiga*, Hamzanwadi menginisiasi rampasan senjata perang tentara Jepang, yang dikenal dengan Peristiwa Wanasaba dan Peristiwa Kopang, karena di dua tempat inilah tentara Jepang bermarkas. Inisiasi yang dilakukan Hamzanwadi sebagai bentuk konsolidasi de facto Indonesia Merdeka adalah tindakan heroik seorang pemimpin perjuangan di medan perang, (perhatikan Film-Film Perang Nasional produksi PPNI, seperti “*Janur Kuning*”, “*Naga Bonar*”, atau Film-Film Perang produksi *Hollywood*, seperti “*Pearl Harbour*”, “*Saving Private Ryan*”, “*Black Hawk Down*”, “*Green Zone*”, dan lain-lain), yang ketika berhasil menumpas musuh, lazim membagi pasukan menjadi tiga kelompok: kelompok pasukan pertama bertanggung jawab menjaga situasi dan kondisi, serta kirim berita kemenangan kepada komando Pusat; kelompok pasukan kedua bertanggung jawab kibarkan bendera sepanjang wilayah teritori tertentu; dan kelompok pasukan ketiga bertanggungjawab merampas senjata musuh, atau melucuti senjata. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Merdeka, yang kita kenal dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pernyataan pembuka dalam Pembukaan UUD 1945 tentang “*Kemerdekaan adalah hak segala bangsa...*”.terujud berkat perjuangan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk oleh Hamzanwadi. Barulah agenda-agenda lain sebagai bangsa bisa diwujudkan, seperti berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal, karena syarat pertama dan utama sudah diwujudkan, yakni Indonesia Merdeka.

d. Gerilya dan Penyerangan NICA

Tahapan-tahapan selanjutnya dalam tradisi sejarah dikenal sebagai *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran, sebagaimana disebutkan oleh Feith dan Castle (eds, 1970), dalam *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Kondisi Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 tidak serta merta dikui oleh pihak Hindia Belanda. Terbukti, Australia sebagai salah satu negara Sekutu dalam PD II, yang bertanggungjawab melucuti tentara Jepang, justru ditumpangi NICA untuk maksud menguasai kembali Indonesia. Jika dianalogikan dengan siklus narasi sejarah: *Colligation*, *plot*, dan *struktur*, oleh W.H. Walsh (1967) dalam buku: *Philosophy of History: An Introduction*, melalui *Colligation*, *plot*, dan

struktur memungkinkan kita memahami dua hal sekaligus: *pertama*, bahwa Hamzanwadi terlibat langsung dalam peristiwa heroik penyerbuan NICA 7 Juni 1946, termasuk sebagai aktor intelektual peristiwa tersebut. Peristiwa dan waktu terjadinya terutama koordinasi dan komunikasi penyerbuan di bawah pimpinan Pejuang Rakyat (TGH Faesal) dan Hamzanwadi sejajar dengan koordinasi dan komunikasi antara Letkol Soeharto dan Sri Sultan HB IX pada peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1948. Inisiator serangan tersebut adalah Sri Sultan HB IX dan komandan pasukannya adalah Letkol Soeharto. Dalam konteks ini, siapa yang meragukan keterlibatan Sri Sultan HB IX dalam peristiwa tersebut? Hanya sejarah yang kurang mencatat sebagai teks sejarah. *Kedua*, oleh Hamzanwadi, Madrasah NWDI dan NBDI diposisikan sebagai markas perlawanan, perisai dari serangan NICA, dan tumbal perjuangan. Sebagai markas, semua agenda penyerbuan dirancang dan diorganisir di lingkungan kedua madrasah ini. Sebagai perisai, posisi kedua Madrasah ini tidak begitu dicurigai karena agenda yang tampak kasat mata adalah agenda pendidikan Agama Islam. Sebagai tumbal, beberapa santri kedua Madrasah ini ditahan, bahkan saudara kandung Hamzanwadi (TGH Faesal) gugur, dan dimakamkan tidak jauh dari kompleks Madrasah NWDI dan NBDI, yang selanjutnya masyarakat Lombok, NTB mengenal pemakaman TGH Faesal sebagai Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong.

2.2 Fase Mengisi Kemerdekaan, Orde Lama dan NW dalam Diplomasi Kemerdekaan

a. Hamzanwadi Merepresentasi Negara (Anggota Delegasi Kehormatan Hajji NIT)

Kembali pada tahapan salah satu tahapan sejarah menurut Feith dan Castle; *internal dialectics* dan kesinambungan pemikiran, bahwa merdeka menjadi syarat pertama dan utama berlangsungnya proses berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosialisasi sebagai bangsa dan bagian dunia, berbudaya dalam konteks lokal yang beraneka tetapi menjadi kesatuan, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Pada fase ini, walaupun Indonesia sudah merdeka tapi masih mencari bentuk ideal sebagai suatu negara. Kondisi saat ini (1947) masih nuansa negara-negara boneka sebagai bentuk negara oleh Hindia Belanda melalui politik *divide et impera*. Pulau Lombok sebagai salah pulau dalam gugusan Sunda Kecil masuk dalam 13 daerah dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Salah satu agenda untuk menemukan bentuk Indonesia sebagai negara, tokoh-tokoh lokal daerah bagian Negara Indonesia Timur, termasuk Hamzanwadi menyetujui dibubarkan Negara Indonesia Timur (1949), dan menyatakan kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase sebelumnya (sebelum 1949) dimanfaatkan untuk mendeklarasikan NKRI kepada seluruh

penjuru dunia, termasuk misi diplomasi pengakuan NKRI yang dilakukan oleh Hamzanwadi selaku anggota kehormatan haji NIT tahun 1947.

Frasa kunci pada bagian ini adalah kelanjutan pikiran dan kesadaran merdeka sebagai *internal dialects* dan kesinambungan sejarah dalam bentuk mengisi agenda berbangsa Indonesia, yakni meninggalkan bentuk negara peninggalan Hindia Belanda dan menggalang dukungan *de facto* NKRI melalui proses diplomasi. Matra kebangsaan strategis yang dikandung dalam maksud NKRI adalah beberapa pasal dalam UUD 1945; Pasal 1 (1); Pasal 18 (1); Pasal 18 B (1); Pasal 18 B (2); Pasal 25A; dan Pasal 37 (5), (Sekretariat Jenderal MPRRI, 2016). Selain tersurat tentang pasal-pasal dalam UUD 1945, rumusan pasal-pasal tersebut menyiratkan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila, “*Persatuan Indonesia*”. “*Persatuan Indonesia*” dalam makna ini dipahami sebagai *unity* dari berbagai perbedaan ‘*diveristy*’ yang mewarnai unsur-unsur pembentuk keindonesiaan: perbedaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Karena itu, selain matra Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila, konteks ini kental dengan matra “*Bhineka Tunggal Ika*” (*unity in diversity*).

b. Menghimpun Sumber Daya Lokal (Hamzanwadi sebagai Dewan Syuriah PUIL, Masyumi, dan Konsulat NU)

Perjuangan Indonesia merdeka, diplomasi untuk pengakuan, dan mengisinya dengan berbagai agenda pembangunan membutuhkan wadah untuk menghimpun sumber daya lokal yang memiliki cita-cita dan tujuan bersama setelah Indonesia merdeka. PUIL, Masyumi, dan Konstituante adalah wadah pergerakan mengisi kemerdekaan Indonesia untuk berbagai agenda: politik, ideologi, agama, sosial-ekonomi, dan kebudayaan, yang unsur-unsurnya berasal dari tokoh-tokoh pergerakan-perjuangan lokal/daerah. Dapat dipahami keberadaan wadah-wadah tersebut sebagai instrumen gerakan mengisi kemerdekaan Indonesia. Melalui wadah-wadah tersebut, para tokoh pejuang pergerakan daerah/lokal menyampaikan aspirasinya untuk berbagai agenda mengisi kemerdekaan Indonesia dalam satu sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fakta sejarah ini, matra kebangsaan strategis yang ditawarkan Hamzanwadi sebagai representasi NW, NWDI, NBDI dan salah seorang tokoh perjuangan pergerakan dari daerah adalah “*Persatuan Indonesia*”. “*Persatuan Indonesia*” dalam maksud ini adalah satu cita-cita, yakni mengisi Indonesia merdeka dengan agenda-agenda kebangsaan, karena hal yang sama juga sedang digerakkan oleh putra-putra Indonesia dari daerah lain di Indonesia. Sebagai wadah

instrumen ide dan gagasan mengisi kemerdekaan Indonesia, agenda Hamzanwadi menyiratkan matra “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, yang tidak memungkinkan seluruh rakyat untuk menyampaikan ide dan gagasan mengisi kemerdekaan hadir bersama dalam satu proses pengambilan keputusan. Karena itu dibutuhkan sistem perwakilan. Selanjutnya, perwakilan-perwakilan masing-masing daerah memiliki berbagai perbedaan, tetapi perbedaan itu diikat oleh satu agenda, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, matra kebangsaan strategis dalam konteks sejarah ini adalah “*Bhineka Tunggal Ika*” dengan makna “berbeda-beda, satu tujuan”.

c. NW sebagai Aset Negara-Bangsa

Bulan Mei 2016, pada acara sarasehan penyiapan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Hamzanwadi, mengacu narasi sejarah *Colligation, plot, dan struktur*, oleh W.H. Walsh, penulis/peneliti sebagai pemandu acara tersebut menyampaikan pengantar, “berdiskusi tentang Nahdlatul Wathan, tentu berdiskusi tentang Hamzanwadi sebagai tokoh sentral pada fase sejarah awal, perubahan, dan pengembangannya, sesungguhnya kita sedang berdiskusi tentang kebangsaan Indonesia”. Pernyataan pengantar di atas cukup beralasan mengingat cita-cita NW pada fase awal sejalan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia merdeka, lalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berikut mengisinya dengan agenda-agenda pembangunan pada fase perubahan dan pengembangan. Terjadi semacam linieritas dalam cita-cita dan agenda antara Indonesia sebagai bangsa dan NW sebagai organisasi pergerakan kebangsaan. Acuan dokumentatif yang dapat memperkuat argumentasi tersebut bahwa NW, berikutnya NWDI, dan NBDI lahir sebagai organisasi/wadah perjuangan masyarakat Lombok NTB untuk bangsa, negara, dan agama mengakomodasi konteks lokal sejalan dengan konteks negara dan berada dalam lingkup Negara Kesatuan republik Indonesia. Matra strategis dalam fase sejarah ini adalah mengakomodasi berbagai perbedaan dengan satu tujuan, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*”, dan dalam satu wadah negara Kesatuan Indonesia, “*Persatuan Indonesia*”. Proses penyatuan pikiran yang berbeda-beda tersebut memerlukan proses permusyawaratan melalui organisasi NW, “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan*”. Mengingat wadah NW adalah wadah menghimpun agenda-agenda perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia, sangatlah tepat jika NW menjadi bagian aset penting negara dan bangsa

Indonesia. Diresmikannya NW sebagai organisasi massa tahun 1953 berdasarkan ketentuan legalitas di tingkat negara berarti negara memenuhi tanggung jawab melegalkan aset negara untuk kepentingan kebangsaan.

2.3 Fase Mengisi Kemerdekaan, Orde Baru dan NW dalam Pembangunan

a. Hamzanwadi: Dialektika Ulama-Umara

Kembali mengacu pada rangkaian sejarah sebagai teks naratif menurut Walsh, pada *colligation* yang membangun *inner connection* antara ilmu keagamaan (Islam) yang dipelajari Hamzanwadi di Madrasah *ash-Shaulatiyah* yang menjadikannya sebagai ulama dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin (umara). Terdapat hubungan antara dua kompetensi berbeda, namun keduanya berkaitan dalam bentuk saling mereferensi dalam membangun dua kapasitas pada satu personalitas Hamzanwadi. Lalu terdapat juga *inner connection* antara jaringan ilmu di Madrasah *ash-Shaulatiyah* dengan kondisi di Indonesia pada saat bersamaan. Dua *inner connection* ini membantu kita memahami lebih jauh penjelasan Azzyumardi Azra (1994) “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII”, yang generasinya sampai pada sosok Hamzanwadi di Lombok. Piranti sejarah yang penting dipahami adalah latar belakang para ulama Timur Tengah masa itu dan kondisi Indonesia yang menuntut para ulama juga terjun dalam agenda-agenda kebangsaan. Inner connection itulah yang mengharuskan Hamzanwadi mengambil peran sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kurun waktu 1971-1982. Pada saat bersamaan, Hamzanwadi juga sebagai Anggota Konstituante MPR RI. Jelas tergambar bahwa ada tanggung jawab ganda yang diperankan Hamzanwadi, sebagai ulama sekaligus umara. Tentu kedua peran tersebut tidak semata untuk simbol sosial, namun substansi tanggung jawab sejarah yang melingkupinya. Dipahami bahwa peran ganda sebagai ulama dan umara oleh Hamzanwadi dalam rangka memperkuat pengkhidmatan terhadap bangsa, negara, dan agama. Melalui peran ganda tersebut, Hamzanwadi dapat memainkan fungsi-fungsi katalis masyarakat yang diwakilinya dalam konteks pembangunan nasional.

Satu pembuktian atas peran ganda ulama dan umara oleh Hamzanwadi, bahwa dalam majelis-majelis taklim yang difasilitasinya, selain menyampaikan substansi ajaran dan praktek keislaman, Hamzanwadi juga menyampaikan substansi ketatanegaraan. Hamzanwadi melakukan *content knowledge transmission* tentang relasi hirarkis beberapa dokumen legal negara sebagai bagian tidak terpisahkan dari matra UUD 1945. Sebagai

contoh, pidato Hamzanwadi pada satu majelis ta'lim tahun 1970-an, yang intinya adalah “tanggung jawab seorang pemimpin (pemimpin negara) dengan berbagai persyaratan, proses pemilihan, dan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhinya. Pada data kajian ini tergambar dengan jelas relasi hirarkis antara UUD 1945 sebagai hukum dasar, Undang-Undang (UU) sebagai turunannya, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk tekninya. Sebagai ulama, tentu kiprah Hamzanwadi sudah sangat jelas sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content*, sedangkan kiprah sebagai umara dapat ditelusuri pada agenda-agenda pembangunan di era pemerintahan ketika Hamzanwadi mengemban peran ganda tersebut.

b. NW, NWDI, NBDI dan Kontekstualisasi Dinamika Sejarah Bangsa

Sejarah adalah teks, konteks, dan hubungannya dengan masyarakat dalam proses menyejarah. Menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, penyadaran, dan melaksanakan agena kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Untuk memenuhi dinamika dan kontinuitas tersebut, Hamzanwadi melakukan dinamisasi struktural dan kultural. Secara struktural, organisasi NW dikonstruksi mengikuti kebutuhan kontekstual pembangunan, sesuai misi pendidikan, sosial, dakwah Islam, dan pengembangan ekonomi ummat. Unit-unit kerja yang berada di bawah koordinasi NW dibentuk untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian misi pendidikan melalui sekolah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga kursus vokasi. Untuk pencapaian misi dakwah, dibentuk lembaga dakwah dan lembaga kajian keislaman. Untuk mendukung pencapaian misi sosial, dibentuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bersifat *carity* kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk pengembangan misi ekonomi, dibentuk beberapa lembaga keuangan mikro, dan biro-biro layanan ekonomi lain. Secara kultural, Hamzanwadi menginisiasi penyesesuaian pada semua capaian misi, bidang kerja, dan uni kerja. Unit kerja pendidikan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Unit kerja bidang sosial disesuaikan dengan substansi kerja-kerja bidang sosial kemasyarakatan. Unit kerja bidang pengembangan ekonomi juga disesuaikan dengan substansi agenda pembangunan bidang ekonomi.

Jika boleh menamabah atribut pada personalitas Hamzanwadi, selain sebagai “bapak Madrasah dan “tokoh masjid” karena Hamzanwadi mendorong pendirian dan membina banyak madrasah, menginisiasi pendirian masjid dan mengisinya dengan majelis-majelis pengajian, beliau layak digelar beberapa atribut lain. Hamzanwadi layak disebut sebagai

bapak “modernisasi pendidikan”, karena melakukan perubahan dan penyesuaian mendasar terhadap bentuk dan sistem pendidikan di tingkat lokal sesuai kebutuhan nasional. Hamzanwadi layak disebut sebagai “pelopor kesejahteraan keluarga dan kesehatan anak”, karena Hamzanwadi satu-satunya ulama yang memberikan fatwa *syar’i* untuk program Keluarga Berencana dan imunisasi, dan NW menjadi salah satu penggerak penting di NTB. Hamzanwadi juga sangat layak digelar “Tokoh Transmigrasi, Intensifikasi-Ekstensifikasi Pertanian”, karena Hamzanwadi melalui majelis-majelis pengajian terus mendorong pemerataan kesejahteraan melalui program transmigrasi, serta menggiatkan pola pertanian dengan sistem gogo-rancah. Agenda-agenda penyesuaian struktural dan kultural yang dilakukan Hamzanwadi tidak lain hanya untuk memenuhi hajatan dalam Pembukaan UUD 1945, “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, cerdas spiritual, cerdas akademis, cerdas sosial, cerdas ekonomi, dan cerdas budaya. Jika seluruh aspek kecerdasan terpenuhi, barulah kita sebagai bangsa menjadi bangsa berkebangsaan yang memenuhi matra “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” dalam rangka “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, karena matra-matra kebangsaan yang dipenuhi mencakup seluruh elemen bangsa; anak-anak, remaja, dewasa, pranata keluarga, pria-wanita, tidak terlupakan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus.

2.4 Fase Mengisi Kemerdekaan Era Reformasi dan NW Menjawab Sejarah Bangsa

a. NW Menjawab Sejarah

Frasa ini penting diulang: menyejarah dipahami sebagai suatu kontinuitas dinamik sebagai kelanjutan pemikiran, kesadaran, dan melaksanakan agenda kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Mengakomodasi pikiran frasa di atas, Hamzanwadi adalah peletak sejarah, generasi berikut melanjutkan estafet sejarah. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja pikiran dan tindakan Hamzanwadi sebagai peletak sejarah, dan generasi berikut sebagai pelanjut estafet sejarah senada dengan konsep Ernest Renan (1823-1892, dalam Prisma, 13/2/3/2013), bahwa “bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu azas-aka”¹ yang terjadi dari dua hal: rakyat yang dulunya menjalani satu riwayat; dan sekarang mempunyai kemauan hidup menjadi satu (menyatu). Demikian juga Bung Karno menguti Renan (dalam Prisma, 13/2/3/2013), bangsa adalah *le desir d’etre ensemble* (kehendak akan bersatu), satu jiwa dan memiliki rasa kesetiakawanan. Sebagai peletak sejarah, Hamzanwadi menginisiasi gerakan kebangsaan bersamaan dengan lahirnya NW/NWDI (fase *the genuine* sejarah NW), lalu mengisi dan mengembangkan kebangsaan

pada fase berikutnya (fase *the change* dalam sejarah NW), berikutnya dilanjutkan pada fase sekarang (fase *the development* dalam sejarah NW) oleh generasi penerus Hamzanwadi. Peran ulama-umara yang diemban oleh Hamzanwadi, berlanjut pada peran ganda Tuan Guru Bajang KH. Muhammad Zainul Majdi (disebut TGB) sebagai salah satu penerus strategis pada fase ini.

Sebagai ulama diemban oleh TGB dengan mengambil peran sebagai pengasuh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW Pancor) dan agenda safari dakwah sebagai *transmission agent of Islamic Knowledge Content* ke seluruh penjuru tanah air Indonesia dan mancanegara. Sebagai umara, TGB berkiprah dalam kancah politik nasional sebagai Anggota DPR RI (2004-2008). Kiprah itu diperluas lagi dalam agenda-agenda eksekusi pembangunan mengisi pembangunan dengan menjadi Gubernur NTB (2008-2013 dan 2013-2018), dan peran-peran lain yang tidak kalah strategis dalam mengisi pembangunan kebangsaan di era reformasi ini. Sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan peran-peran strategis lainnya, TGB menganut prinsip “kecintaan terhadap daerah adalah kecintaan terhadap Bangsa Indonesia”. Karena itu, visi personal-individual harus ditransformasikan menjadi visi kolektif-institusional di tingkat daerah dan negara. Perujudan rasa cinta dan visi tersebut menurut TGB bertransformasi dalam bentuk tanggung jawab menegakkan nilai-nilai ketuhanan dan memaksimalkan sumber daya yang dikaruniakan Tuhan di bumi Indonesia. Cinta-visi dan tanggung jawab ini tidak lain untuk maksud “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, untuk sampai pada terpenuhinya rasa keadilan bagi semua, sebagaimana “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

b. Narasi Sejarah NW adalah Sejarah Bangsa

Sejarah NW dan sejarah kebangsaan Indonesia sebagai narasi sejarah memiliki rangkaian paralel dalam hal tujuan, yang dibentuk melalui *colligation*, *plot*, dan struktur. Melalui *colligation*, nilai kebangsaan Indonesia juga tampak dalam pikiran-penyadaran, dan agenda kebangsaan oleh Hamzanwadi melalui NW. Keduanya menjadi satu *inner connection*, yakni kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, yang bersumber dari empat matra kebangsaan Indonesia: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Karena dibentuk oleh berbagai perbedaan dalam Bhineka Tunggal Ika, ketika proses *colligation* yang membentuk *inner connection* tersebut terjadi melalui NW di Lombok-NTB maka kebangsaan yang dimaksud

adalah kebangsaan Indonesia. Melalui plot dipahami bahwa terjadi relasi atraktif antara peristiwa sejarah kebangsaan Indonesia dan sejarah NW sebagai teks, lalu teks dari konteks, dan konteks berpengaruh kepada masyarakat ketika teks sejarah terbentuk. Dua peristiwa sejarah berbeda dengan tujuan sama ini membentuk suatu rangkaian peristiwa yang kita pahami sebagai peristiwa sejarah kebangsaan. Melalui struktur dipahami bahwa setiap fase sejarah kebangsaan Indonesia, juga terjadi pada sejarah NW, yang keduanya memunculkan warna matra kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. perbedaan dalam hal struktur hanya tampak pada bentuk strukturnya, tetapi nilai struktur tetap paralel dan memiliki *inner connection*, yakni kebangsaan Indonesia. Memahami maksud analisis ini, mengakomodasi Gadamer (1972), narasi tentang sejarah NW sejajar dengan narasi kebangsaan Indonesia.

c. Tokoh NW dan Pengakuan Negara

Kajian ini merupakan kajian Sejarah dengan Hermeneutika sebagai alat analisis, sehingga bukan biografi atau otobiografi, yang bertanggungjawab melakukan proses evidensi teori, yakni menemukan fakta dan relasi fakta dengan fakta lain dalam proses sejarah, yang tidak saja memperkuat posisi teori tapi menjadikan suatu teori menjadi sangat dialektis memandu proses kajian. Melalui proses evidensi teori dan fakta sejarah dalam kajian ini, tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan tokoh strategis dalam proses dan peristiwa sejarah. Berdasarkan bantuan Hermeneutika, proses kajian ini memandang dan memahami (*understand and verstehen*) Hamzanwadi dari luar dirinya secara subjektif dengan melihat hubungan kausal antara dirinya dengan peristiwa sejarah yang dilaluinya (Dilthey, 1962). Dipahami bahwa Hamzanwadi, pikiran, tindakan, dan makna serta akibat pikiran dan tindakannya memiliki sumbangan besar terhadap terbentuknya Indonesia merdeka dan Indonesia yang berkebangsaan, melalui wadah kultural-struktural NW. Hamzanwadi bagi dirinya adalah pribadi yang sudah selesai; sudah melahirkan pikiran, sudah melakukan penyadaran, sudah mengagendakan pikirannya dalam tindakan nyata, Indonesia sudah merdeka, dan sudah menjadi bangsa yang berkebangsaan. Generasi hari ini dan masa depan membutuhkan panutan dan teladan dalam mengisi tantangan masa depan. Tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional sebagai Pahlawan Nasional kepada Hamzanwadi dengan sebutan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Pahlawan Nasional.

BAB III PROSES , SASARAN DAN ARUS UTAMA KEBIJAKAN

Proses kebijakan Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan dilakukan mengikuti proses perumusan dokumen rekayasa sosial dalam kajian sejarah dan kajian kebijakan secara struktural dan natural, sebagaimana tergambar pada matrik di bawah ini.

Proses	Agenda	Teknis	Produk	Ket
Struktural	Kajian untuk menemukan bahan kebutuhan (need assesment)	Kajian sejarah	Data kajian, analisis dan temuan	
	Penyusunan dokumen kebijakan	1. Analisis kebutuhan 2. Validasi draf kebijakan 3. Uji coba kebijakan (FGD 1 dan FGD 2)	Bahan draf dokumen kebijakan dan prosedur diseminasi/implementasi	
Natural	Inisiasi	Diseminasi/implementasi kebijakan	Konteks diseminasi	

Kelompok sasaran sebagai arus utama implementasi kebijakan Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan terdiri atas:

Unsur Sasaran/Arus Utama	Jumlah	Ket
Santri dan Alumni Lembaga Pendidikan NW	25 orang	
Pengurus Organisasi, Lembaga Pendidikan, dan Badan Otonom NW	5 orang	
Masyarakat Umum	5	
Aparatur Pemerintah	3	
Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Non Pemerintah	2	

BAB IV PENGORGANISASIAN PROSES KEBIJAKAN DAN TINDAK LANJUT

Proses kebijakan Nilai Kebangsaan dalam Sejarah Nahdlatul Wathan diorganisasikan pelaksanaannya secara kolaboratif, dengan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

Unsur	Tanggung jawab	Konteks	Ket	Tindak Lanjut
Universitas Hamzanwadi	1. Peneliti, penyedia dokumen <i>need assessment</i> , dan penyedia 2. Penanggung jawab sosialisasi dan diseminasi	Penelitian, FGD, dan sosialisasi-diseminasi	Kerja tim	Kajian lanjutan, monev dan perbaikan aspek kebijakan (dokumen dan implementasi)
Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur	Membantu sosialisasi dan diseminasi	Inisiasi setelah penelitian dan FGD	Bidang terkait	Dijadikan program kerja kedinasan dan memperluas sasaran
Santri dan Alumni Lembaga Pendidikan NW	Membantu sosialisasi dan diseminasi secara berkelanjutan	Lingkungan Sekolah-madrasah dan masyarakat	Struktural dan natural	Dijadikan nilai dan agenda yang terimplementasi dalam bentuk gerakan bersama dan melembaga (ada lomba dan kompetisi tentang Nilai Kebangsaan dalam sejarah NW)
Pengurus Organisasi, Lembaga Pendidikan, dan Badan Otonom NW	Idem	Lingkungan Sekolah-madrasah dan masyarakat	Struktural dan natural	Idem
Masyarakat Umum	Idem	Lingkungan masyarakat	Natural	Idem
Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Non Pemerintah	Idem	Lingkungan kerja dan masyarakat	Struktural dan natural	Idem

BAB V PENUTUP

Implementasi dokumen kebijakan ini akan efektif bila didukung oleh kebijakan lanjutan tahapan kajian ini pada tahun ke-2 mengingat semua produk luaran tahun ke-1 sudah dipenuhi dalam bentuk: jurnal internasional bereputasi, artikel seminar internasional, draft buku ber-ISBN dan draft dokumen kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankersmit, F.R. (1991). *Refleksi tentang sejarah: pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah*. (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta. Gramedia. (Buku asli terbit tahun 1990).
- Azra, Azzyumardi. (1994). *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad xvii dan xviii: melacak akar-akar pembaruan pemikiran islam di indonesia*. Bandung. Mizan.
- Brinton, Crane. (1963). *The shaping of modern thought*. Englewood NJ. Prentice Hall.
- Camus, Albert. (1955). *The myth of sisyphus and other essays*. New York. Random House.
- Dillon, H.S. dan Idham s Bey. (2013). *Soekarno dan bangsa* (Prisma, 13/2/3/2013). Jakarta. LP3ES.
- Dilthey, Wilhelm. (1962). *Pattern and meaning in history: thought on history and society*. New York. Harper Torchbook.
- Fattah, Abdul, dkk.. (2017). *Dari nahdlatul wathan untuk indonesia: perjuangan TGKH. muhammad zainuddin abdul madjid (1908-1997)*. Mataram. Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Feith, Herbert and Lance Castle, eds. (1970). *Indonesian political thinking 1945-1965*. (terjemahan LP3ES Jakarta, 1988). Ithaca. Cornell University Pres.
- Gadamer, Hans Georg. (1972). *Truth and historicity*. Heidelberg. The Hague.
- . (1987). *Hermeneutics, tradition and reason*. Cambrigde. Polity Press.
- Jordan, S. (2017). When Nationalism Rears its Ugly Head A Review of Architecture as Peacework by Rudolf Steiner. *Lilipoh Spring* (Society and Community).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Lewis, Bernard. (2009). *Sejarah: diingat, ditemukan kembali, ditemu-ciptakan* (terjemahan oleh Bambang A. Widiyanto dari judul asli: History: Remembered, Recovered, Invented). Yogyakarta. Ombak.
- Muladi. (2006). *Wawasan kebangsaan. konsep, nilai, dan makna*. Jakarta. Lemhanas.
- Myers, J. (1983). Saluting the flag is not enough. *Educational leadership*, 40(6), 37-37.
- Nahdi, Khirjan. (2012). *Paradigma transformatif wacana wasiat renungan masa pengalaman baru karya Kyai Hamzanwadi: relasi filsafat praktis dan hermeneutika dalam dinamika sejarah*. Prosiding Seminar Internasional: Meniman Bahasa, membangun Bangsa FKIP Universitas Mataram. Mataram.
- . (2012). *Nahdlatul wathan dan peran modal : studi etnografi-historis modla spiritual dan sosiokultural*. Yogjakarta. Insyira.
- . (2013). *Modal spiritual dan sosiokultural Nahdlatul Wathan*. *Jurnal Islamic Studies Islamica UIN Sunan Ampel Surabaya* Volume VII/2/2013. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- . (2014). *Wasiat renungan masa-pengalaman baru karya Hamzanwadi: Pragmatisme puisi lama pada era Modern menurut cultural studies*. Artikel terbit dalam *Jurnal SeBaSa FKIP Universitas Hamzanwadi*, Volume II/1/2014. FKIP Universitas Hamzanwadi. Selong.
- . (2016). *Peran modal sosial dalam pengarusutamaan gender pada kalangan muslimat Nahdlatul Wathan*. *Jurnal Review Politik*. UIN Sunan Ampel Surabaya Volume 06. No. 01. Jun 2016, Surabaya UIN Sunan Ampel.
- Pei, M. (2003). The paradoxes of American nationalism. *Foreign Policy*, 31-37.
- Ricklefs, M.C. (1998) . *Sejarah indonesia modern* (terjemahan dari buku asli: A history of modern indonesia, oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

- Salim, Agus. (2002). *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Sekretariat Jenderal MPRRI. (2016). *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta.
- Smith, A. D. (2009). Cosmopolitanism and Nationalism. *The Hedgehog Review*, Fall, 66-75.
- Stromberg, Roland N. (1968). *European intellectual history since 1789*. New York. Meredith-Century-Croft.
- Suhandjati, Sri. (2003). *Ajaran tatakrma yasadipuroII: perpaduan syariat islam dengan budaya jawa*. Yogyakarta. UIN SUKA.
- Suryo, Djoko. (2008). "Pengantar Buku Penjelasan Sejarah Kuntowijoyo", *Penjelasan sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto pendidikan Nasional: tinjauan dari perspektif postmodernisme dan stuudi kultural*. Jakarta. Kompas.
- Walsh, W.H. (1967). *Philosophy of history: an introduction*. New York. Harper Book.
- Wang, Z. (2008). National humiliation, history education, and the politics of historical memory: Patriotic education campaign in China. *International Studies Quarterly*, 52(4), 783-806.

LAMPIRAN 3



HOME	ABOUT	USER HOME	SEARCH	CURRENT	ARCHIVES
FOCUS AND SCOPE	EDITORIAL TEAM	AUTHOR GUIDELINES	PUBLICATION		
ETHICS	PRINTED VERSION	UINSA JOURNAL			

Home > User > Author > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
689	10-05	ART	Nahdi	VALUES OF NATIONAL CONSTRUCTION IN THE HISTORY OF...	IN REVIEW

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
---------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

There are currently no refbacks.

[Publish](#) [Ignore](#) [Delete](#) [Select All](#)

Indexed by:



JiIS by <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JiIS/index> is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

00236516 [View My Stats](#)

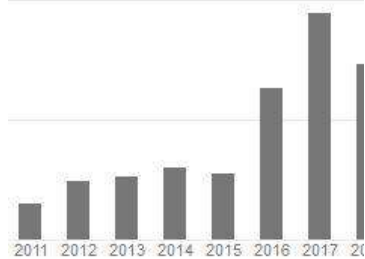
Scimagojr



Google Scholar

Cited by V

	All	Si
Citations	341	
h-index	8	
i10-index	5	



USER
You are logged in as...
nahdiw

- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)

[Journal Help](#)

NOTIFICATIONS

- [View](#)
- [Manage](#)

AUTHOR Submissions

- [Active \(1\)](#)
- [Archive \(0\)](#)
- [New Submission](#)

JOURNAL
CONTENT

Search

All ▾

Search

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)

FONT SIZE



VALUES OF NATIONAL CONSTRUCTION IN THE HISTORY OF NAHDLATUL WATHAN

Khirjan Nahdi
Hamzanwadi University
khirjan.nw@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to map the construction of national values in the history of NW as a local national treasury values and formulation of social engineering concepts of awareness and implementation of national values. Values of Nationality in line with thought and agenda of the nationality of NW, starting with the phase of struggling and maintaining independence, full with the desire of struggling to obtain independence and defend it as mandated by the 1945 constitution. The next phase is how to fill independence in the era of old Order by completing *Pancasila* (the national principle of Indonesia) maintaining the independence of Indonesian republic. The subsequent phase is how to fill the independence in the new order era with the values of nation “develop the nation’s intellectual life” and implementing every number of *Pancasila*. The phase of filling the independence in the Reformation era is so full with strengthening the nationality values, the Diversity and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Indonesian nationality values in history of NW is a historical value of intergenerational transfers (identification), identification, and admission. Historical values of NW are dialectic over beliefs that influence, minds which create acts (implementation), runs deliberately through socialization and dissemination.

Keywords: *Construction, nationality, nahdlatul wathan*

Introduction

The concept of nationality is currently being understood as individual awareness and collective awareness about nation regarding independence, ideology, welfare, unity, culture, and other aspects of intelligence (Muladi, 2006)¹, these now days have challenges. Without reducing the context that occurs it can be obtained the facts: denial of basic rights of God and humanity; strengthening individual identity and denial of diversity; the tendency of taking over natural resources individually by abandoning people’s interests, will gradually interfere the noble ideals the nation's life as mandated by 1945 Constitution. We must proactively restore collective awareness and action, fill and continue the noble ideals of the nation of Indonesia. As a national treasure the strategic thing to find the construction of nationality in the history of Nahdlatul Wathan (abbreviated NW), is meeting the universal needs of the Indonesian people in understanding their national concepts and acts. The birth of organizations movement and their dynamics cannot be separated from the national entities namely *Pancasila*, *Bhineka Tunggal Ika* (Unity in Diversity), the Republic of Indonesia which is based on the 1945 Constitution. NW, an Islamic organization, was established in Lombok, West Nusa Tenggara, in 1934 where the Indonesian identity at that time was not recognized. The idea of its establishment was inseparable from awareness and desire to obtain independence of Indonesian, until the subsequent phases of a strategic role to fill independence towards Indonesian nationality

¹ Muladi. *Wawasan Kebangsaan*. (Jakarta. LEMHANAS. 2005. p.2.

including several aspects of independence such as ideology, politics, economics, social, culture and defense-security systems.

Indonesian history records the appearance of national ideas. It is commenced in the first three decades of twentieth century. Ricklefs (1998) called it "The First Step Towards National Awakening", marked by variety of changes in politics, culture and religion. Awareness of colonialism that gave birth anti-colonial movement. History records also distinguished changes in politics, culture and religion with the establishment of new ideas about the prominent organizations which as well influence the ideas of new leadership, a new definition of identity, and also it is influence on the new analysis of the religious environment, social, politis and economy. Lewis (2009) notes that national awareness of a nation has different causal relation. Lewis divided history into three classifications: remembered history, recovered history, and invented history. Referring to Bhaskar (Salim, 2002)², there are three phases of Indonesian history such as: the genuine, at the beginning of independence; the change, at the end of the old order until the end of new order; and the development, at the end of the new order, the reform order until now day. According to Lewis and Bhaskar, in Indonesian history nationality is understood as process of forming the initial phase of independence, which established to the ideas of independence, diversity, politics, social, and culture. The implementation of national values which is known as national perception experience a glory of time in the phase of change, even though it is full of persevering New Order regime. Phase of development, the changing of the system democratic and state administration, openness of information - communication, awareness and implementation of nationalism undergo a crisis. Nahdi (2014)³ calls it as the practice of "forgetting and unappreciative history of the nation". According to Lewis, the re-disclosure and reformulation of implementation of the national values is an agenda for historical recovering and history invention. The process recalls construction map of the national values that source of local national treasury and reformulation of its implementation.

There several causal differences that initiate ideas and implementation of national values which describe their uniquely relational dynamics according to the national experience of each nation. Zheng Wang (2008) describes China in the '80s as a corrupt nation, anti-democratic, dictatorial leader, and the culminated tragedy is in the Tiananment tragedy. Through his study, Zheng Wang formulated a historical education model of Chinese ideology by reintroducing the Chinese historical sites, the excellence of people in war, the mythology, and the heroic of his people in defending the truth. By quoting Pennebaker (1997), Zheng Wang believed that the collective memory of nationalism, unsuspected, and respect each differences became a strong root of the love for the nation and nationality. Zheng Wang concluded, if you want to form the spirit of nationalism and nationality naturally it must be done by influencing collective thoughts and emotions every

² Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002), p.135. Buku ini tentang Dinamika Sosial yang memiliki kesejajaran dalam membagi fase perubahan sosial di Indonesia dengan dinamika sejarah Bangsa Indonesia.

³ Khirjan Nahdi, *Pendidikan Karakter dan Apresiasi Sejarah Bangsa: Dialektika Pendidikan yang Terabaikan* (*Proceeding Seminar Internasional Masalah Fundamental Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), p.5. Tema tulisan tentang Pendidikan Karakter yang tidak lagi mempedulikan ajaran-ajaran kebaikan dan kebaikan dari pengalaman sejarah bangsa. Penulis ingin menyadarkan, terlalu banyak diskusi tentang pendidikan karakter dengan basis yang beragam, tapi karakter dari sejarah bangsa dilupakan.

time and place in the context of education. Technology-based communication, such as film, radio and television, can accelerate those process.

If China views the values and implementation of national values based on the democracy needs, justice and transparency inspired by poor internal experience, America views nationality based on universal values of democracy, law enforcement, free markets and power sharing. Minxin Pei (1998) in *The Paradoxes of American Nationalism* describes the internal conditions of America as a destination country for immigrant from various parts of the world. Without sameness of views about the nation, the values of American national cannot be reduced through each immigrant's uniqueness, but all of them melt into the values of the American people under the policy of meltingpot. George Walker Bush said, the values American nationality is not a democracy path, a legal path, a bureaucratic path, and not a free market road, but throughout as individual beliefs that come become collective beliefs. Therefore, the American nation have to fight for it as a view in the come up time, even though it have be embodied with a war. Conditions in China and America are different from Indonesian, since its name is not Indonesia, Indonesian has been consist of variety of: religion, culture, ethnicity, customs, and language. Indonesian national identity requires a sublimation process as basic values which is derived from a variety of entities and it is transformed into joint national entities. This meaningful process, considerations of local genius, geography, ethnicity, and various religions are becoming a reference in establishing the values and the implementation of Indonesian national values, institutionalization and structuring of values and its implementation become part of policy and bureaucracy.

A comparison between the values of maps construction and the implementation of Chinese, American and Indonesian national values shows that Indonesia is more complex than those countries. As a country that has never been colonized, China is relatively easier to determine its direction and policy. America, although once was colonized and as a country which many immigrants there, is relatively easier as well to determine the direction and the policy of nationality. In addition, Indonesia as former of colonized country is a nation that full of diversity. The experience as colonized country is able to give independent and accommodate every difference that is thought as its uniqueness. As a former colony and a variety of uniqueness, Indonesia has two strategic agendas: nationality that prioritizes national interests and patriotism that sit the nation's ideals as John W Myers (1983). The attitude of generation today and in the future in term of appreciation is patriotic, which is means that understand the ideals of independence and imitate it continuously. The dynamics of traditional society towards cosmopolitan have impact on the construction of values of nation as traditional European society after the World War and the French Revolution. Anthony D. Smith (2009) in *Cosmopolitanism and Nationalism* describes three cosmopolitan European groups: individualism, multicultural, and static. The individualist group prioritizes basic human rights such as recognition of rationality, honor, moral values, freedom and security. These basic rights are not bound by nationality, social class, gender, race, and ethnicity. Multicultural group believe that racial and ethnic issues cannot be simplified in any name and for any reason in a national context. This belief was formed from reality that race and ethnicity are different since human being was born. In this context, the concept of nationality comes to offer a new catalyts as joint identities that not abandon the true identity of each race and ethnicity. Static groups, groups that are relatively unaffected by evolving dynamics, they can survive and limit themselves from ancient national values with a strict rule system. In today's global dynamics the reality of multicultural in Indonesia is important to priorities local cultures as strengths and values that guide the civilization, becomes glue which finally form

universal entities. Seth Jordan (2017) in a review of *Architecture as Peacwork* (Rudolph Steiner), in *When Nationalism Rears Its Ugly Head* explains how importance the concept of humanity which every human is need each other, no one can stand alone without others, with universal culture as an adhesive and a foundation of shared values . Hamzanwadi, founder of NW offers and develops national values that are not tied by ethnic groups in Indonesia. Based on the above view, Hermeneutics and *Verstehen* with the historical method (Djoko Suryo, 2008: xi-xiv)⁴, the academic problem of this study is: how is the construction of national values in NW history? The map of national construction becomes the raw material, blueprint for social engineering awareness and implementation of Indonesian national values for future generations.

Phase of reaching and Defending of Independence (1934-1946)

a. NW and NWDI are found

This phase is marked by the birth of NW, from Arabic language *nahdlah* means struggling, awakening, or movement, and *wathaniah*, means nation, homeland, or country. As a text, the word NW is a diction with a sense of meaning. Awakening, struggling and movement can be related to integration, simultancy, and consistency of acts based on thinking about ‘nation, homeland, state’. This text was biased when Indonesia was not yet born as a sovereign country and the national agenda at that time could not be embodied yet, so Hamzanwadi's thoughts namely NW were the first and foremost awareness of independent of Indonesia. It caused Rejection from three different groups with each argument. First, the Dutch East Indies colonial that suspect that the indigenous groups agendas might threat because colonialists were very desire to preserve their power as a colonial nation. Hamzanwadi assured the Dutch Colonial Government that NW was purely Islamic religious education, the agenda is not for independence of Indonesia. Therefore, after the word NW, the words Diniyah Islamiyah was added, therefore it can be abbreviated as NWDI. Second, local elites who have social and cultural influences in society. This group was divided into two, one group which affiliated with the Dutch colonial, so its refusal to NWDI was due to the Dutch colonial facilities. This historical fact proven that they leaked and thwarted the agenda of Indonesian Independence several times. Another group that is thought prominent because of social, economic and cultural status in society. The second rejection of this group because of fear of losing their influence to society, they felt that they were disturbed in term of social process, economic and cultural reproduction. Third, the refusal of Islamic leaders who carry out Islamic learning traditionally, they considers that the pattern of Islamic education which is taught by Hamzanwadi was different from previous Islamic teachings. However Hamzanwadi keeps on his thoughts and agenda to raise awareness about Islamic diversity and nationality.

As a thought and a way to raise awareness of nationality to be independence nation as the first and foremost entity, as Brinton (Kuntowijoyo, 2003) states that historical thinking and awareness has responsible to influence civilization in many people in historical times and come up periods. In Understanding what Brinton stated, Hamzanwadi with his thought about independence of Indonesian and awareness became aligned with Indonesia's objective idealism after reaching independence, it become a sovereign,

⁴Djoko Suryo (dalam Kuntowijoyo: *Penjelasan sejarah (Historical Explanation)*). Yogyakarta. Tiara Wacana, 2008), p. xi-xiv.

ideological, constitutional, unified and diverse nation (Secretary of the MPRRI, 2016)⁵. When Hamzanwadi called *merdeka* (freedom) as the main requirement through *Nahdlah Wathaniah* to be full freedom of Indonesia, the next phase of history (August 18, 1945) was formulated:

"... independence is the right of all nations. Therefore, the colonization on the world must be abolished, because it is not in accordance with humanity and justice. "... (Opening of the Indonesian 1945 Constitution).

The historical phenomenon of "MERDEKA" subsequently is formulated in the opening of the Indonesian 1945 Constitution, Kuntowijoyo (2003) calls as genesis of thought, because there is not new things on the ceiling. Hamzanwadi's thoughts and acts of awareness of *merdeka* so that meets the requirements as a nation is complex through the intellectual process. The process of intellectuality is in the form of sublimation of sociocultural experience as a colonized nation, and critical analysis of Islamic texts (Qur'an, Hadith, and clerical instructions). As a result of Hamzanwadi's futurization before independence of Indonesia, he had the historical continuity until nowday and in the future with a national dimension, namely the 1945 Constitution document, which contained word "MERDEKA" as the property of all nations. Referring to Kuntowijoyo, thinking and awareness as genesis, NW text in the context before independence, influenced the implementation of divinity through religion, including Islam, so Hamzanwadi placed independence becomes a guarantee of continuity of god teachings. The nationality of *Pancasila*, "the Supreme Godhead" is in line with the thoughts of Hamzanwadi's consciousness and his *Nahdlah Wathaniah*. As an integral entity of religious responsibilities, the next individual and collective rights are the fulfillment of human rights in the overall sense. The mind of independence awareness through NW accommodates the national dimension, "justice and civilized humanity". Furthermore, MERDEKA belongs to all the nations whose attributes such as ethnicity, nation, language, and customs, and all have be united in one nation namely Indonesian,. Therefore, the national dimension, "Indonesian Unity" has same line with MERDEKA's awareness of Hamzanwadi through his NW. Is there any historical context that allows the democratic process, such as consensus-building, and the processes of transforming values of togetherness as the old saying "standing tall, sitting at the same level" can progress without MERDEKA? It might be possible! Everything needs independence as a nation. Therefore, the dimension of the fifth *Pancasila* "people which is led by the wisdom in the representation of representatives" is in line with the awareness of MERDEKA as a nation, Indonesia. If the whole parts of *Pancasila* limit the freedom and the fourth *Pancasila* states "justice for the whole Indonesian people", therefore it is impossible to embody it without the word Merdeka. Thus, Hamzanwadi through organization of NW has a effective futuristic in offering raise awareness of independence as the first and the most important condition as a free nation.

Raising awareness of independence as an absolute condition as a nation by Hamzanwadi through NW and NWDI continues to establish consistency as a strategic pillar of the struggle to give birth to nationality and religion in form of propositions. There are three propositions such as Confident (*Yakin*), sincere (*ikhlas*), and *istiqamah* (consistency) as three hierarchical, cyclical, and integral entities forming a determination

⁵ Tim, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2016). p.17,p.18, p. 62, p. 67. Istilah Empat Pilar MPR RI menjadi perdebatan karena yang dimaksud adalah Empat Pilar Kebangsaan Indonesia.

and thoughts of the truth, the importance of nationality and diversity in order to run those consistently. In the modern tradition The three propositions currently are equivalent to the community's reference to cooperate for common goals. In the term of human relations, the goal of independence as a nation has inner values, which convinces that each analysis of reason that what will be done and fought by society is how to reach independence that they absolute believe will be achieved. This belief encourages the spirit of people to be consistent to struggle to achieve independent. Confident (*Yakin*), sincere (*ikhlas*), and *istiqamah* (consistency)⁶ are internalization of spirituality to those who bestow all ideals and goals. The Matra of *Pancasila* on "The Almighty of God" becomes strategically associated with Indonesia's intentions as a nation, a nation that believes in the existence of God. In addition of inner values of Confident (*Yakin*), sincere (*ikhlas*), and *istiqamah*(consistency), there are three other propositions offered by Hamzanwadi in his thought and awareness of independence, there are other terms of collectivity values, such as cohesive, intact and united⁷. The position of collectivity is a supportive spirit for all fighters in the achievement of independent Indonesia. The rationalization, every thing that is believed, elaborated, and endowed to be fought for, cannot be realized without cohesion, wholeness, and unity. Therefore, the dimension of " Unity of Indonesian " in the third principle of *Pancasila* became important, strategic, and parallel to Hamzanwadi's intentions in his terms compact, unified and united in struggling an independence of Indonesia into a nation.

b. Establishment of NBDI

In line with Kuntowijoyo, Louis O. Mink who discussed Mind, History & Dialectic: *The Philosophy of R.G. Collingwood*, as quoted by Sri Suhandjati (2003), the following stages of the thought process of awareness are the stages of thinking evolution. This stage relates to progression, expansion and in depth of concerning humanitarian aspects. In the phase, establishment of NW and NWDI is full of the nuances of thought and awareness of the independence as the first and foremost condition of nationhood. The next stage of evolution of the establishment of *Nahdlatul Banat Diniah Islamiyah* (NBDI) is beneficiaries of women in the development of a nation. This evolutionary condition is reasonable because of the instrument the transmission of thought to raise women's awareness is an educational, in the form of institutions which is called *madrasah* (school). Universally and fundamentally, education is the basic right of every nation. To fulfill basic rights in terms of education, Hamzanwadi established NBDI for developing women's education.

Two conditions are addressed by the birth of NBDI as Hamzanwadi's contextual habituality; firstly, the agenda and consequences of Dutch colonial ethics politics, that not all natives including women had the opportunity to receive education. Secondly, the Sasak society's patriarchal culture that men have higher level than women. Hamzanwadi's contextual and futuristic qualities is women have to be equal with men in term of their education. In other words, according to Educational democracy, it is called as education for all. Three key phrases in the great narrative of thought and awareness of independence

⁶ Lihat juga AD/ART PBNW Hasil Muktamar XIII, 2016 bahwa Yakin, Ikhlas, Istiqamah sebagai acuan nilai dasar perjuangan melalui Organisasi NW. Istilah ini penulis fahami sebagai *inner values*, karena ketiganya melahirkan keteguhan hati, ketajaman nalar, dan konsistensi tindakan dalam berjuang melalui NW.

⁷ Ibid, bahwa Kompak, Utuh, dan Bersatu dalam pemahaman penulis *supporting spirit* dalam menegakkan keimanan dan ketakwaan dalam bingkai NKRI di NW.

for nationality and diversity by Hamzanwadi through NBDI. The First is the phrase of educational goals to educate. The opening of the 1945 Constitution emphasizes the responsibility of the state as a nation, namely ... 'educating the life of the nation', ... the word "educating" in this context, in the tradition of Critical Hermeneutics or intellectual intelligence. It is expected that with intellectual intelligence there will be an awareness of the importance of independence as a nation, so that with this awareness, women have the same interests, goals as men, such as the realization of Indonesia independence. Second, educational phrases as basic human right, male and female (educationforall). This phrase implies an integral part of the Preamble of the 1945 Constitution, "justice and civilized humanity", is known as the second principle of *Pancasila*. Education is intended to educate all nation's children, including in the early stages of awareness of the importance of independence as a nation, then gaining of education has fulfilled the basic human rights aspect become more civilized. Third, the phrase fulfillment of the basic rights of education for men and women implies aspects of justice for all children of the nation (men and women). The full part of the Preamble of the 1945 Constitution states, "social justice for all Indonesian people", then it known as the fifth principle of *Pancasila*.

c. The Proclamation of Independence

The results of the study with historical approaches are called historical phenomena. Text NW, NWDI, NBDI, are called by Hamzanwadi as a movement and a struggle, as the movements and struggles of other peoples for the sake of Indonesian independence is not an absurdity as described in the mythical character Sisyphus by Albert Camus in *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (Albert Camus, 1955, in Kuntowijoyo, 2003) or the thought of World War II (World War II) which gave birth to futility. Hamzanwadi's thoughts and awareness along with his innocent-collectivity values propositions produced brilliant results, with the proclaimed Indonesian Independence. The Proclamation of Independence August 17, 1945 was the result of the collective work of all the nation's children in various parts of Indonesia. Good news about Freedom of Indonesia must be addressed to anyone who dreams it. Awareness of the thoughts carried out by Hamzanwadi in the local context that produced the first results: Indonesian's freedom was a historical mind and awareness, as Gadamer (1972, in Kuntowijoyo, 2003), "Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein" or awareness to make history such as historical responsibility to make future.

The Proclamation of Indonesian Independence coincided with the surrender of the Japanese army to the Allied Forces. This text is important to consolidate that the news that Indonesian's freedom is the de facto. News consolidation of independent Indonesia Hamzanwadi initiated three agendas: the first, consolidating *santri* (Islamic learners) and local fighters to remain vigilant, because this kind of situation could lead to various transitional conditions. The Second, Hamzanwadi initiated the raise of the Red and White Flag as a symbol of Indonesia freedom. In term of Critical Hermeneutics, this is the first time Red and White fluttered on the land of Lombok at the beginning of Indonesian Freedom. The third, Hamzanwadi initiated the booty of the Japanese army's war weapons. Hamzanwadi's initiation as a form of de facto consolidation of Freedom of Indonesia is an heroic action of the leaders on the battlefield, (pay attention to PPNI-produced National War Films, such as "Janur Kuning", "Naga Bonar")⁸, or War films produced by

⁸ Film Komedi Berlatar Belakang Perang Kemerdekaan, (1987).https://id.m.wikipedia.org/wiki/naga_Bonar.

Hollywood, such as "Pearl Harbor ", " Saving Private Ryan ", " Black Hawk Down ", " Green Zone ", and others)⁹, when they successfully crushed the enemy, it usually divided the troops into groups that guarded situation and conditions and sent news of victory to the Central command; groups that set flags along certain territories; and groups that disarm enemies' weapons. On August 17, 1945, Indonesian Independence, in the Preamble of the 1945 Constitution concerning "Independence is the right of all nations ..." embodied because of the struggle of the freedom movement fighters, including by Hamzanwadi.

d. Guerrilla and NICA Attack

The subsequent stage of the historical tradition is known as internal dialectics and without interrupting of thought as mentioned by Faith and Castle (eds, 1970, in Kuntowijoyo, 2008) in Indonesian Political Thinking 1945-1965. After Indonesian had gained its freedom, it was not admitted by Dutch East Indies. Australia which one allied countries in the World War II and responsible for disarming the Japanese army and a country which was boarded by NICA and also Australia intend to re-control Indonesia. If it is compared to the historical narrative cycle: Colligation, plot, and structure, by W.H. Walsh (1967, in Kuntowijoyo, 2003) in his book: Philosophy of History: An Introduction, through Colligation, plots, and structure allows us to understand two things at once: first, that Hamzanwadi was directly involved in the heroic events of the NICA invasion on 7 June 1946, including the intellectual actor of the event. One attack the of Indonesian under leadership of TGH Faesal and Hamzanwadi in Lombok paralleled with one big attack of Indonesian under control of Lieutenant Soeharto and Sri Sultan HB IX in the March 1, 1949 or it is famous with march 1st attack. The initiator of that attack was Sri Sultan HB IX and the commander of his forces were Lieutenant Colonel Suharto. In this context, who doubts the involvement of Sri Sultan HB IX in that occasion? Only the occasion on that was not recorded in a historical text¹⁰. Secondly, , NWDI Madrasah and NBDI were placed by Hamzanwadi as resistance bases, shielding from NICA attacks. As headquarters, all raid agendas were designed and organized in these two madrasah (schools). As a shield, the position of these two *Madrasah* were not so suspected because the agenda that appears is Islamic education. As a sacrifice, some students of the two *Madrasah*s were arrested; even Hamzanwadi's siblings, TGH Faisal was killed, and were buried not far from the NWDI and NBDI *Madrasah* complexes. Lombok people in *Nusa Tenggara Barat* (West Nusa Tenggara) community knows the funeral of TGH Faisal as the Rinjani Selong Heroes Cemetery.

Phase of filling independence in the Old Order (1947-1965)

a. Hamzanwadi representation of State (Member of the Honorary Hajj NIT Delegation)

One of the stage of the historical stages according to Faith and Castle is; internal dialectics and continuity of thought, independence is the first and foremost condition to run ideology, politics, economy and socializing as a nation and part of the world, cultured in local diversity contexts but unite in maintaining internal and external security. Although Indonesia had been becoming independent state but it is still looking for an ideal form as a country. The current condition (1947) is still full with the nuance of the puppet states as a

⁹ Film-film Perang Asing Berlatar Belakang Kisah Nyata. <https://www.idnentimes.com/hype/entertainment/Sukmasatiti/film-perang-terbaik-yang-diangkat-dari-kisah-nyata-c1c2>.

result of politics of de facto of the Dutch East Indies. Lombok Island as an island included Sunda group island is included in 13 regions in *Negara Indonesia Timur* (NIT). In order to find the form of Indonesia as a state as one agendas, local figures from Eastern part of Indonesia, including Hamzanwadi agreed to dissolve the eastern State of Indonesia (1949), then reunite to the Republic of Indonesia. The previous phase (before 1949) was used to declare the Republic of Indonesia to all parts of the world, including the NKRI recognition diplomacy mission carried out by Hamzanwadi as an honorary member of the NIT pilgrimage in 1947.

The key phrases in this section are the continuation of mind and raising awareness of independence as the historical aspects and continuity of history to fill the Indonesian freedom, such as abandon the Dutch East Indies negative legacy and mobilize diplomatic support to be Republic of Indonesia. The strategic nationality dimension contained in the NKRI's intentions is several articles in the 1945 Constitution; chapter 1 (1); chapter 18 (1); chapter 18 B (1); chapter 18 B (2); chapter 25A; and chapter 37 (5), (MPRRI General Secretariat, 2016)¹¹. Besides being explicit about the chapter in the 1945 Constitution, the formulation of these chapters implies the incarnation of the third principle of *Pancasila*, "Indonesian Unity". "Indonesian Unity" in this sense is understood as the unity of various "diversities" differences which characterize the elements of Indonesians: various ethnicity, religion, language, culture, and customs. In addition to the dimension of Unity Indonesia, this context is full of the dimension of "Unity in Diversity".

b. Gathering Local Resources (Hamzanwadi as *PUIL* Syuriah Council, *Masyumi* and *NU* Consulate)

Indonesia's struggle for independence, diplomacy, recognition and how to maintain them with various development agendas requires a place to gather local resources that have common. *PUIL*, *Masyumi*, and the Constituent are a movement forum to fill Indonesian independence with a variety of agendas such as: political, ideological, religious, social-economic, and cultural, whose elements are derived from local movements. The existence of these places as an instrument of the movements and aspiration to fill Indonesian independence in a system of Indonesian state. Through the fact, the nationality dimension offered by Hamzanwadi as representasi NW, NWDI, NBDI and one of the leaders of the struggle for regional movement is "Indonesian Unity". As an instrument to fill Indonesia's independence, Hamzanwadi's implies the dimension of "Democracy which is led by the Wisdom of Religious Consultation", by considering Indonesia as an archipelago state, which does not allow all people to convey ideas and collective ideas in a decision-making process, thus a representative system is needed in Indonesia. The Representation of each regions have various differences, but the differences are bound by one agenda, namely how to maintain independence. The strategic nationality in this historical context is "*BhinekaTunggal Ika*" means "unity in diversity".

c. NW as a Nation Treasure

On May 2016, at the proposal of National Heroes' Title for Hamzanwadi¹², refers to the historical narrative of Colligation, plot, and structure, by W.H. Walsh (in Kuntowijoyo, 2003), the writer / researcher said, "discussing Nahdlatul Wathan, absolutely discussing

¹¹Lihat Tim Sekretariat MPR RI, p.44

¹²Dokumen Usul Gelar Pahlawan Hamzanwadi diuji akademis melalui sarasehan, seminar, dan lokakarya. Struktur dokumen disusun sesuai tahapan narasi sejarah menurut W.H. Walsh.

Hamzanwadi as a central figure on initial phase, change and development, and actually we are discussing Indonesian nationality". This statement is important because the ideas of NW are in line with the ideals of nation, namely independence, defending, and filling it with the development. Linearity of ideas occurs in agenda of Indonesia as a nation and NW as an organization of national movements. The documentative reference that strengthens this argument, NW, NWDI, and NBDI was born as a struggle organization for people of Lombok NTB specifically and Indonesian nation, state, and religion generally that accommodates locality that in line with the context of Unitary Republic of Indonesia. The strategic dimension in this phase accommodates various differences with one goal, namely how to fill the independence of "*Bhineka Tunggal Ika*", in the nation of Indonesian Unitary State, "Indonesian Unity". The process of unifying different minds requires a deliberative process through the organization of NW, "Leadership by the Wisdom of Representative Policy". NW is a place to gather agenda of struggle to fill independence, it is appropriate if NW becomes an important asset of Indonesian state and nation. NW was officially inaugurated as a mass organization in 1953 which was based on legality at the state level. It means that the state has responsibility of legalizing assets for the sake of nationality.

Phase how to fill freedom in the New Order Era (1966-1998)

a. Hamzanwadi: Dialectical *Ulama-Umara*

Referring to the series of narrative history texts according to Walsh, in the colligation, builds an inner connection between religious knowledge (Islam) which was studied by Hamzanwadi in the Madrasah *ash-Shaulatiyah* making him a scholar and burdening social responsibility as a leader (*umara*). There is a relationship between two different competencies that complete each other in building the two personal capacities of Hamzanwadi. Network Inner connection of knowledge between Madrasah *ash-Shaulatiyah* and conditions in Indonesia at the same time helps understand further explanation of *Azzyumardi Azra* (1994)¹³ "The Ulama Network in Middle East Archipelago Ulama of XVII-XVIII Century", its generation continues until Hamzanwadi in Lombok. An important historical ware is the background of Ulama' in Middle Eastern of that period and the condition of Indonesia which requires ulama to involve in national agendas. As dual responsibility of Hamzanwadi as ulama as well as umara, that Innerconnection that makes Hamzanwadi to take a role as Advisory Council of the Indonesian Ulama Council (MUI) in time period 1971-1982, as well as a member of the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia MPR. This dual role is either social symbols, and historical responsibility that surrounds it. Hamzanwadi's dual role is in the term of realizing the nation, state and religion through the catalytic functions of the community which was represented by him in the context of national development. The Islamic scholars assemblies which were facilitated by Hamzanwadi became a forum for the submission of constitutional substance. Hamzanwadi carried out transmission of content knowledge about the hierarchical relations of several legal documents of the state as an inseparable part of the 1945 Constitution. Hamzanwadi's speech on a study forum in the 1970s, essentially it was about "the responsibility of a leader with various requirements, electoral process, and legal rules that have to be obeyed. The data of this study illustrates the hierarchical relationship between the 1945 Constitution as the basic law, the derivatives laws, and the Government Regulations as technical appointments. As *ulama*, the role of

¹³Ulama dalam buku ini mengacu pada ahli bidang Agama Islam. Secara Hermeneutika, keulamaan yang diperoleh melalui pendidikan di Timur Tengah memiliki pengaruh terhadap gerakan kebangsaan, baik yang berkembang di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara.

Hamzanwadi is as the transmission agent of Islamic Knowledge Content, while as *umara*, his acts can be traced to his role in the development agendas in the government era when Hamzanwadi role as *ulama and umara*.

a. NW, NWDI, NBDI and Contextualization of the Dynamics of National History

History is text, context, and its relationship to society in a historical process. History is understood as a dynamic continuity of thought, awareness, and carrying out the national agenda after Indonesian gained its independence. To fulfill this, Hamzanwadi carried out structural and cultural dynamism. Structurally, NW is built following the development of contextual needs, according to the mission of education, social, Islamic *da'wah*, and economic development of the *ummah* (society). Work units of NW are responsible to run missions of education through schools, training institutions and vocational courses. For the mission of *da'wah* Islamic institution and Islamic studies were established. Then, in term of social missions, social institutions are built that moves in charity. In term of economic missions established several micro finances were built and other economic service bureaus. Culturally, Hamzanwadi initiated the adjustment of all missions, work, and work unions. Educational work units are adapted to national education standards. The social work unit is adapted to the substance of the work of the social sector. The economic work unit is adjusted to the substance of the economic development agenda.

If it is allowed to add attributes of Hamzanwadi, he is not only a "*Madrasah* father but also" mosque figure "he deserves to be called the father of" education modernization ", because of making fundamental changes and basic adjustments to the form of educational system at the local level according to national needs. Hamzanwadi deserves to be a "pioneer of family welfare and child health", as the one who plans Family Planning and immunization programs, and NW becomes one of the important partners in NTB. Hamzanwadi deserves to be called the "Figure of Transmigration, Intensification-Extensification of Agriculture", because he encourages people's welfare distribution through transmigration and intensify the pattern of agriculture through *gogo-rancah* system (a system of agriculture). The adjustment agenda of structural and cultural by Hamzanwadi is to fulfill the 1945 Constitution such as, "educating the nation's life", be spiritually intelligent, academically intelligent, socially intelligent, economically intelligent and culturally intelligent. If all aspects of intelligence are fulfilled, then it becomes a nation that fulfills the "fair and civilized humanity" in the framework of "social justice for all Indonesian people".

Phase of maintaining Independence in the era of Reformation (1999-Present)

a. NW Answers History

History is understood as a dynamic continuity of thought, awareness, and carrying out the national agenda after reaching independence. Accommodating above thoughts, Hamzanwadi prepared his successor. It was realized or not, intentionally or not, Hamzanwadi's thoughts and actions were in line with Ernest Renan's concept (1823-1892, in Prisma, 03/13/2013), that "The nation is a life, a principle" which occurs from two things: people who used to undergo one history; and now they have a will to be one together. Likewise Bung Karno quoted Renan (in Prisma, 03/13/2013), *the nation is ledesird'etre ensemble* (a will to unite), one soul and has sense of solidarity. As a historical maker, Hamzanwadi initiated the national movement along with the birth of NW / NWDI, filling in and developing nationality in the next phase, followed by the current phase for

the next generation of Hamzanwadi. The role of *ulama-umara* carried out by Hamzanwadi was continued by *Tuan Guru Bajang* KH. Muhammad Zainul Majdi (called TGB).

As *anulama'*, TGB takes role as a person who responsible on the Hamzanwadi Education Foundation Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor Islamic Boarding School and da'wah as the transmission agent of Islamic Knowledge *Content*¹⁴ to all parts of the world. As *umara*, TGB took part in national politics as a Member of the Indonesian Parliament (2004-2008). His career was expanded as Governor of NTB (2008-2013 and 2013-2018) and his other strategic roles in reform era. As members of the legislature, executive, and other strategic roles, TGB uses the principle of "love to the region is love to the Nation". The personal-individual vision must be transformed into a collective-institutional vision at the level of state and region. The realization of love and vision according to TGB is transformed in the form of upholding responsibility of the divinity values and maximizing the resources given by God on the earth of Indonesia. This love-vision and responsibility is "educating the nation's life", to fulfill the sense of justice for all, as well as "social justice throughout the Indonesian community."

b. The Narrative History of NW is the History of the Nation

NW history and national history as historical narratives have parallel sequences in terms of goals formed through colligations, plots, and structures. Colligations, the value of Indonesian nationality is also appeared in mind-awareness, and the national agenda through NW. Both become one inner connection, independence and filling Indonesian independence, sourcing from four dimensions of Indonesian nationality: *Pancasila*, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhineka Tunggal Ika*. The plot it is understood, there is an attractive relationship between the historical events of Indonesian and history of NW as a text, then this text comes from context, and lastly context influences community. These two different historical events with the same goal form a series of events that we know as events of national history. The structure, every phase of the history of Indonesian is also history of NW, both bring up the national dimension: *Pancasila*, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhineka Tunggal Ika*. The difference in term of structure only appears in the form of the structure, but the values of the structure remains parallel and has inner connection, namely Indonesian.

c. NW Figures and State Recognition

This study is a historical study with Hermeneutics as an analytical tool, it is responsible for carrying out the process of theoretical evidence, such as finding facts and its relation with other facts in the historical process. It is not only strengthens the position of the theory but makes the dialectical theory guides the study process, it is not possible of dealing with strategic figures in historical processes and events. Based on the help of Hermeneutics, this study process views and understands Hamzanwadi beyond of himself subjectively by relating the causal relationship between him and the history that he has gone through (Dilthey, in Poespoprodjo, 2004). Hamzanwadi's thoughts, acts, and meanings and the consequences of his thoughts and actions had a major contribution to the formation of an independence of Indonesia. Hamzanwadi had succeeded giving birth to thoughts, raising awareness, scheduling his thoughts in real action, Indonesia was

¹⁴Istilah oleh penulis untuk menyebut tanggung jawab dakwah Islam, sehingga disebut Tuan Guru Bajang (Kyai yang masih Muda)

independent, and became a free nation. Today's generation and future require role models and good models to deal with the challenges. In 2017, the Government of the Republic of Indonesia awarded Hamzanwadi a National Hero entitled as *Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*, National Hero¹⁵.

Nationality Values in NW History as Knowledge and Historical Responsibility

Its history and aspects are a collection of knowledge and values inherited through educational process. The ultimate goal of inheritance is the formation of generation who aware of history and has a full of gratitude to the creators of history. Hamzanwadi's initial stage is the transfer of knowledge and values through education and teaching, formal and informal, cultural and structural. Through transferring, the next generations have an ability to identify the noble values of the nation's history. The results of the identification process cause the next generation has an attitude of; accepting and rejecting, following or resisting, and developing or obstructing. With these attitudes, generations have an inner historical within them, and are responsible for the history. After knowledge content, history is understood through the process of historical dialectics. Historical dialectics is the knowledge and NW nationality values as references, sources of thought, and references to national actions. As values, thoughts and acts of reference national, NW nationality influences and relates each other. Hamzanwadi and NW are influenced by previous effects (education and context) and the effects thereafter (real thoughts and actions). Education, conditions of regional and nation made Hamzanwadi realizes that Indonesia have to be independent country, become a nation, and prosperous nation. That realization is embodied by establishing NW and he dedicated through this organization in whole his life.

The next time, his ideas and actions are able to encourage other people around him to struggle together. In the early time, all national movements were carried out collectively with the community around him and all his students. The nationality values which were offered by Hamzanwadi through NW is able to influence people's personaly and collectively in dealing with how to maintain independence. The coming of thoughts which can threaten the thought of national agendas is required to be tackled. As *ulama*, Hamzanwadi held an Islamic recitation as a way of transmission context of the Islamic knowledge content for dissemination or spreading of thoughts and national agenda naturally. Every time he starts his recitation, he always reminded people about innervalues: Belief, sincere, and consistent, and collectivity values: compact, complete, united. And also conveying the message of development that related to the welfare of the nation, furthermore the recitation is enclosed as well as with several important information such as health, harmony in household life, population, agriculture, obedience to the law, and other aspects of nation and state. Hamzanwadi also strengthened ideas and nationality agendas structurally through his educational institutions labeled NW. Likewise, other groups are responsible to struggle and continue the relay of national movements, such as: Muslimat (women group) of NW, Student of NW, Youth of NW, NW Scholars, NW Task Force, and Majelis Ta'lim of NW, and all movements spirit of Indonesia independence that labeled NW. Historical dialectics of NW as a historical responsibility in the history of nationality follows the stages of influencing, implementing, disseminating, and structuring.

¹⁵ Sekretariat Negara RI. Kepres RI No. 115/TK/2017, 6 November 2017, Maulanasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Hamzanwadi) dianugraahkan Gelar Pahlawan Nasional

Conclusion

Nationality in the history of NW is a national treasure reflected in the *Pancasila*, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhineka Tunggal Ika*. The phase of seizing and maintaining independence along with the birth of NW with inner values and collectivity values dominated by the national dimension of the 1945 Constitution, "That independence is the right of all nations, therefore ..." The phase maintains the early independence of the Old Order dominated by the dimension of *Pancasila* nationality, *NKRI* and *Bhineka Tunggal Ika*.

Indonesian nationality has a parallelism historical time with the history of NW nationalist movement since the 1900s, it is started with the struggle to win and maintain independence along with the birth of NW. Subsequent phases, NW became a strategic part of filling independence in the framework of Indonesian nationality. The history of Indonesian nationality in NW history is the collection of knowledge and values inherited for the next generations. History records that the inheritance of Hamzanwadi was carried out through transfer, identification and admission. Knowledge and historical values of Indonesian nationality in the history of NW are dialectic through several stages such as influence, implementation, dissemination, and socialization.

REFERENCES

- Azra, Azzyumardi.. *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad xvii dan xviii: melacak akar-akar pembaruan pemikiran islam di indonesia*. Bandung, Mizan, (1994)
- Dillon, H.S. dan Idham S Bey. *Soekarno dan bangsa* (Prisma, 13/2/3/2013). Jakarta. LP3ES, 2013.
- Harian Sejarah. Film Perjuangan “JanurKuning”.
<https://www.hariansejarah.id/2017/02/sutradara-alam-surawidjaya-tanggal.html?m=1>
Idntimes. Film-FilmPerangproduksiHollywood,
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/sukma-satiti/film-perang-terbaik-yang-diangkat-dari-kisah-nyata-c1c2>
- Jordan, S.. When Nationalism Rears its Ugly Head A Review of Architecture as Peacework by Rudolf Steiner. *Lilipoh Spring*(Society and Community), 2017.
- Kuntowijoyo. *Metodologisejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana,2003.
- _____. *PenjelasanSejarah*. Yogjakarta. Tiara Wacana, 2008.
- Lewis, Bernard.. *Sejarah: diingat, ditemukan kembali, ditemu-ciptakan* (terjemahan oleh Bambang A. Widiyanto dari judul asli: History: Remembered, Recovered, Invented). Yogyakarta. Ombak, 2009.
- Muladi. *Wawasankebangsaan. konsep, nilai, danmakna*. Jakarta. Lemhanas, 2006.
- Myers, J. Saluting the flag is not enough. *Educational leadership*, 40(6), 37-37,1983.
- Nahdi, Khirjan. *Pendidikan Karakter dan Sejarah Bangsa: Dialektika Sejarah yang Terabaikan* (Proceeding Seminar Internaional Pendidikan Fundamental dan Pendidikan Karakter). Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Pei, M. The paradoxes of American nationalism. *Foreign Policy*, 31-37, 2003.
- Poespoprodjo, W. *Hermeneutika*. Bandung. Pustaka Setia, 2004.
- Ricklefs, M.C. *Sejarahindonesiamodern* (terjemahan dari buku asli: A history of modern indonesia, oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 1998.
- Salim, Agus. *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana, 2002.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta, 2016.
- Suhandjati, Sri. *Ajaran tatakrama yasadipuroII: perpaduan syariat islam dengan budaya jawa*. Yogyakarta. UIN SUKA, (2003).
- Suryo, Djoko. “Pengantar Buku Penjelasan Sejarah Kuntowijoyo”,*Penjelasansejarah (Historical Explanation)*. Jogyakarta. Tiara Wacana, 2008.
- Smith, A. D. Cosmopolitanism and Nationalism. *The Hedgehog Review*, Fall, 66-75,2009.
- Wang, Z. National humiliation, history education, and the politics of historical memory: Patriotic education campaign in China. *International Studies Quarterly*, 52(4), 783-806, 2008.
- Wikipedia. Film Komedi Perjuangan “Naga Bonar”. https://id.m.wikipedia.Org/wiki/Naga_Bonar.

LAMPIRAN 4

Lombok, 3rd - 4th November 2018



4th HICE

PROCEEDING

THE 4th HAMZANWADI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 2018

*"Elevating Human Resources through Education,
Language, and Culture"*

Partner



PROCEEDING

THE 4TH HAMZANWADI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION

“Elevating Human Resources through Education, Language, and Culture”

Copyright © 2018 by Universitas Hamzanwadi
All rights reserved. Reproduction of this paper in
any form or way is prohibited without a written
agreement from the publisher.

Printed in Lombok, Indonesia

First Printing, 2018

ISBN

Editor : Moedjito, Ph.D.
Cover & Layout Designer : M. Marzuki, M.Pd.

Universitas Hamzanwadi

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 132
Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
Indonesia 83612

www.hamzanwadi.ac.id

PROCEEDING

THE 4TH HAMZANWADI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION

“Elevating Human Resources through Education, Language, and Culture”

Directors:

Prof. Keith Robert John Wood
Prof. Muhammad Sukri Bin Saud
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.
Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Editors:

Gerard Marchesseau
Ravinesh Rohit Prasad
Laila Wati, M.Pd.
Maman Asrobi, M.Pd.
Siti Maysuroh, M.Pd.
M. Adib Nazri, M.Pd.
Ari Prasetyaningrum

Layouts:

M. Marzuki, M.Pd.
Heri Kuswanto, M.Pd.

Published by:



Universitas Hamzanwadi

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid 132 Pancor, Selong, Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83612

Email : universitas@hamzanwadi.ac.id Website: <http://hamzanwadi.ac.id>

Values of National Construction in the History of Nahdlatul Wathan

Khirjan Nahdi

Study Program of Indonesia language and literature Education, Hamzanwadi University

Corresponding Author: khirjan.nw@gmail.com

Abstract: This study aims to map the construction of national values in the history of NW as a local national treasury values and formulation of social engineering concepts of awareness and implementation of national values. Values of Nationality has alignment with thought and The national agenda of NW, starting with the struggling phase and maintaining independence, full with the desire of struggling to obtain independence and defend it as mandated by the 1945 constitution. The next phase is how to fill independence in the era of old Order by completing *Pancasila* (the national principle of Indonesia) maintaining the independence of Indonesian republic. The subsequent phase is how to fill the independence in the new order era with the values of nation “develop the nation’s intellectual life” and implementing every number of *Pancasila*. The phase of filling the independence in the Reformation era is so full with strengthening the nationality values, the Diversity and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Indonesian nationality values in history of NW is a historical value of intergenerational transfers (identification), identification, and admission. Historical values of NW are dialectic over beliefs that influence, minds which create acts (implementation), runs deliberately through socialization and dissemination.

Key words: Construction, nationality, nahdlatul wathan

The concept of nationality is understood as individual and collective awareness about the nation concerning independence, ideology, welfare, unity, culture, and other aspects of intelligence (Muladi, 2006), nowadays faces challenges. Without reducing the context that occurs it can be stated the facts: denial of basic rights of faith and humanity; strengthening individual identity and denying the diversity; the tendency to take charge of resources individually by abandoning people interests, will gradually disrupt the lofty ideals of educating the life of the nation as mandated by the 1945 Constitution. We have to be proactive restore the collective awareness and action, fill and continue the lofty ideals of educating the life of the nation. The strategic thing to do is to find the construction of national values in the history of Nahdlatul Wathan (abbreviated NW) as a treasure of national dimension to fulfill the universal needs of the Indonesian in understanding their national concepts and actions. The birth of the organization of movement and the dynamism is inseparable from national entities through Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, which is based on the 1945 Constitution. NW, an Islamic organization, established in Lombok, West Nusa Tenggara, 1934, in a condition where the nation did not recognize Indonesian identity. The idea of its birth was inseparable from the awareness and the desire for independence, until the next phases played a strategic role in filling the independence towards Indonesian nationality by covering aspects of independence, ideology, politics, economics, social, culture and defense-security systems.

Indonesian history records the appearance of national ideas starting in the first three decades of the twentieth century. Ricklefs (1998) called it "The First Step Towards National Awakening", marked by massive changes in politics, culture and religion. Awareness of the atmosphere of colonialism rise the anti-colonial movement. History records major changes in politics, culture and religion with the appearance of new ideas about organizations influencing the idea of new leadership, a new definition of identity, which birth a new analysis of the religious, social, political and economic environment. Lewis (2009) records that national awareness of a nation has different causal. Lewis divide history into three classifications: remembered history, recovered history, and invented history. According to Bhaskar (Salim, 2002), the history of Indonesia through three important phases: the genuine at the beginning of independence; the change, at the end of the old order until the end of the new order; and the development at the end of the new order, the reform order till now. According to Lewis and Bhaskar, nationality in the history of Indonesia has been understood as the process of forming the phase of independence, which birth the ideas of independence, diversity, politics, social, and culture. Performatively, the implementation of national values is known as national insight

through a period of glory in the phase of change, although the tendency to perpetuation the power of the new order regime. Phase of development, with changes in the democratic system and state administration, opening flow of information - communication, awareness and implementation of nationalism through a crisis. Nahdi (2014) calls it the practice of "forgetting and not appreciating the history of the nation". According to Lewis, re-disclosure and reformulating the implementation of national values is a recovered history and invented history agenda. The process is to recall the national value construction map sourced from local national treasury and reformulate its implementation.

There several causal differences that initiate the ideas and implementation of national values describe their relational dynamics uniquely according to the national experience of each nation. Zheng Wang (2008) describes China in the '80s as a corrupt anti-democratic nation, dictatorial leader, and the culmination in Tiananment tragedy. Through his study, Zheng Wang formulated a historical education model of Chinese national ideology by reintroducing the Chinese historical sites, greatness in war, mythology, and the heroic attitude of its people in defending the truth. By sending Pennebaker (1997), Zheng Wang believed that the collective memory of nationalism, not suspicion each other, and respect for differences became a strong root of the atmosphere of love the nation and nationality. Zheng Wang concluded, if someone want to form the spirit of nationalism and nationality naturally must be done by influencing collective thoughts and emotions every time and place in the education context. Technology-based communication media, such as movie, radio and television, can accelerate the process.

If China consider the value and implementation of national values based on the needs of democracy, justice and transparency inspired by bad internal experience, America consider nationality based on universal values of democracy, law enforcement, free markets and power sharing. Minxin Pei (1998) in *The Paradoxes of American Nationalism* describe the internal conditions of America as a destination country for immigrant urbanization from various parts of the world. Combine the opinion about the nation and American national values cannot be reduced through the uniqueness of each immigrant, but all of them must be melt into the American values in the policy of a melting pot. George Walker Bush said, American nationality is not a democracy, a law path, a bureaucratic path, and not a free market road, but as individual beliefs transformed into collective beliefs. Therefore, the American have to fight for it as a future view, even though it must be a war. Conditions in China and America are different from Indonesian nationalities, since before has a name, Indonesia was different in terms of: religion, culture, ethnicity, customs and language. Indonesian national identity requires a sublimation process of basic values sourced from a variety of different entities transformed into shared national entities. This process is meaningful, considerations of locality, geography, ethnicity, and different religions are a reference in shaping the value and implementation of Indonesian national values. institutionalization and structuring of values and their implementation become the realm of policy and bureaucracy.

A comparison between the value construction maps and the implementation of Chinese, American and Indonesian national values shows that Indonesia's conditions are far more complex. As a country that never experienced colonialism, China is relatively easier to determine its national direction and policy. America, although has ever be colonized and as a country of immigrant society, is relative easier to determine the direction and policy of nationality, and emphasize if problems occur in implementation. Besides colonized, Indonesia is a nation full of differences. The experience of the colonized nation cause to an independent nationality and accommodated every difference that became its uniqueness. As a former colony and a variety of uniqueness, Indonesia has two strategic agendas: nationality that prioritizes the interests of the nation and patriotism places the ideals of the nation as John W Myers (1983).The attitude of the nationality of the nation today and in the future is in the form of

patriotic attitudes, which understand the independence ideals. Patriotism will reward the nation's past and imitate continuously.

The dynamics of traditional society towards cosmopolitan has impact on the construction of national values as traditional European society after the World War and the French Revolution. Anthony D. Smith (2009) in *Cosmopolitanism and Nationalism* describes three European cosmopolitan groups: individualist, multicultural, and static. The individualist group prioritizes the basic human rights through recognition of rationality, honor, moral values, freedom and security. That five points are not bound by nationality, social class, gender, race, and ethnic. Multicultural groups believe that racial and ethnic issues cannot be simplified in any name and for any reason in a national context. This belief was born from the reality that race and ethnicity have been different since their first existence. In this context, the concept of nationality is appear offering new catalysts as shared identities that do not deny the true identity of each race and ethnicity. Static groups, the groups that relatively unaffected by evolving dynamics, they survive and limit themselves to old national values with a strict legal system. The multicultural reality in Indonesia nowadays global dynamics is important to place different local cultures as a strengthness and basis of values that guide the movement of civilization, becoming a glue that birth to a universal entity. Seth Jordan (2017) in a review of *Architecture as Peacwork* (Rudolph Steiner), in *When Nationalism Rears Its Ugly Head* explains the importance of the concept of humanity that requires each other, nothing stands alone, with universal culture as an adhesive and foundation for shared values in nationality. Hamzanwadi, founder of NW offers and develops national values are not bound by ethnic groups in Indonesia. Based on that thoughts, through the historical method guided by Hermeneutics and *Verstehen* (Djoko Suryo, 2008: xi-xiv) , the academic problem of this study: how is the construction of national values in NW history? The national construction map is the raw material for blue print social awareness and implementation of Indonesian national values for the future generations.

Seize and Defend Independence Phase (1934-1946)

NW and NWDI Born

This phase is marked by the appearance of NW, from Arabic *nahdlah* it means struggle, awakening, or movement, and *wathaniah*, means nation, homeland, or country. As a text, the word NW is a diction with a comprehensive sense of meaning. Awakening, struggle, movement related to integration, simultancy and consistency of actions based on thinking about ‘nation, homeland, state’’. This text raised when Indonesia was not born yet as a sovereign nation and the national agenda could not yet be realized, so Hamzanwadi's thoughts through NW were the first and foremost awareness independent of Indonesia. Rejection raises from three different groups with each arguments. First, the Dutch Indies colonial was suspicious of the agendas of indigenus groups because they wanted to preserve their power as a colonial nation. Hamzanwadi assured the Dutch Colonial Government that the NW agenda was purely Islamic religious education, not an agenda for independent of Indonesia. Therefore, attached after the word NW, followed by Diniyah Islamiyah, abbreviated as NWDI. Second, the local elites who have social and cultural influences in society. This group was split in two, one group affiliated with the Dutch colonial, so its refusal due to Dutch colonial facilities. This historical fact is proven by the leaked and thwarted several times of the Indonesian Independence agenda. Another group that influences because of social, economic and cultural status in society. The rejection of the second group was due to fear of losing influence so that it was disrupted in the process of social, economic and cultural reproduction. Third, the refusal of Islamic leaders who have traditionally studied Islam, considers the pattern of Islamic education by Hamzanwadi deviated from previous Islamic education. Hamzanwadi remains his thoughts and agenda to raise an awareness of Islamic diversity and nationality.

As a thought and awareness about nationality with independence as the first and foremost entity, as said by Brinton (Kuntowijoyo, 2003) that historical thought and awareness is responsible to influencing many people in historical times and later periods. Discern Brinton, Hamzanwadi with independent Indonesian thought and awareness became equal to Indonesia's objective idealism after independence became a sovereign Indonesian nation, ideological, constitutional, unity and diverse (Secretary of the MPRRI, 2016). When Hamzanwadi called *merdeka* is the main requirement for Indonesia through Nahdlah Wathaniah, the next historical phase (August 18, 1945) formulated:

"... independence is the right of all nations. Therefore, the colonization above the world must be abolished, because it is not in accordance with humanity and justice. "... (Opening of the 1945 Constitution).

The historical phenomenon of "MERDEKA" then formulated in the Preamble of the 1945 Constitution, Kuntowijoyo (2003) call it a genesis of thought, because there is nothing new under heaven. Hamzanwadi's thoughts and acts of awareness about *merdeka* to complete the requirements are said to be a nation is a complex and futuristic individual habit through the intellectual process that passes through it. The process of intellectuality in the form of sublimation socio-cultural experience as a colonized nation, and critical analysis of Islamic texts (Qur'an, Hadith, and clerical instructions). As a result of Hamzanwadi's futurization before independent Indonesia had the continuity of history now and in the future with a national dimension, namely the 1945 Constitution document, which contained the word "MERDEKA" as the property of all nations. Refers to Kuntowijoyo, thinking and awareness as genesis, NW text in the context before independence, influenced the implementation of divinity through religion, including Islam, so Hamzanwadi placed independence into a guarantee of the continuity of faith teachings. In the context of Pancasila nationality, "God Almighty" is in the line with Hamzanwadi's conscious mind and the Nahdlah Wathaniah. As an integral entity with religious responsibilities, the next individual and collective rights are the fulfillment of human rights in the overall sense. The mind of independence awareness through NW accommodates the national dimension, "justice and civilized humanity". Furthermore, MERDEKA belongs to all nations with various attributes: ethnicity, nation, language, and customs, and all must be united in one nation, the Indonesian nation, not requiring other conditions except independence. Therefore, the national dimension, "Indonesian Unity" has alignment with independence awareness by Hamzanwadi through NW. Is there a historical context that allows the democratic process, such as consensus-building, and the processes of transforming values of togetherness as the old saying "standing same tall, sitting at the same level" can take place without the context of independence? It seems impossible! Everything needs independence as a nation. Therefore, the dimension of Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan" became in line with awareness about independence as a nation, the Indonesian nation by Hamzanwadi through NW. If the precepts in the Pancasila nationality dimension, the whole requires independence, and all four lead to the creation of "justice for all Indonesian people", it is impossible for justice to be created without the context of the independence nation. Because of that, Hamzanwadi with NW has a futuristic that is effective in offering mind-awareness of independence as the first and first condition as an Indonesian nation.

Thoughts and awareness about independence as a condition of nationality by Hamzanwadi through NW and NWDI continued at the step of consistency in the form of propositions as a strategic pillar of the struggle to produce nationality and religion. Convinced *propositions*, *sincerity*, and *istiqamah* as three hierarchical, cyclical, and integral entities form the determination of the heart and mind for the truth of the importance of nationality and

diversity, earnestly make it happen consistently. The three propositions in the modern management tradition today are equivalent to the community's reference values in working together for common goals. In human relations with one ideals and goal, named independence as a nation, must have inner values, which assure each of them based on a logical analysis that what will be done and fought for in the form of independence will be achieved. Its belief that encouraged the spirit to consistently carry out the agenda of struggle for the achievement of an independent Indonesia. Belief, sincerity, and sincerity are internalization of spirituality to those who confer all ideals and goals. The dimension of Pancasila about "God Almighty" became strategically linked to Indonesia's intentions as a nation, a religious Indonesian nation and believed in the existence of God. Besides the inner values of being sure, sincere, and *istiqamah*, there are three other propositions offered by Hamzanwadi in the thought and awareness of independence to become Indonesian nationals in a position as collectivity values, namely cohesion, completeness and unity. Position of collectivity values as a supporting spirit for all fighters in the achievement of independent Indonesia. The rationalization, everything that believed, elaborated, and endowed to be fought for, cannot be realized without cohesion, completeness, and unity. Therefore, the dimension of "Indonesian Unity" in the third principle of Pancasila became important, strategic, and equal to Hamzanwadi's intentions with a cohesion, completeness and united proposition in the struggle for an independent Indonesia into a nation, the Indonesian nation.

Establishment of NBDI

Accord with Kuntowijoyo, Louis O. Mink who discussed *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood*, as quoted by Sri Suhandjati (2003), the following steps of the thought process for awareness are the steps of thought evolution. This step relates to the addition, expansion and depth of the scope of thought concerning humanitarian aspects. In the phase of NW and NWDI birth is thick with the thought and awareness of the importance of independence as a first and foremost condition of nationhood. The next evolution with the establishment of *Nahdlatul Banat Diniah Islamiyah (NBDI)*, and women beneficiaries. This evolutionary condition is proper because the thought transmission instrument for independent awareness is an educational institution, *madrrasah* form. Universally and fundamentally, education is the basic right of every nation. To fulfill basic rights in terms of education, Hamzanwadi established NBDI for women's education.

Two conditions addressed by the birth of NBDI as Hamzanwadi's contextual habituality; first, the agenda and consequences of Dutch colonial ethics politics, not all natives including women had the opportunity to get an education. Second, the Sasak society's patriarchal culture when with a woman in the second stratum in society. Hamzanwadi's contextual and futuristic habitual are that the women must be equal with men to receive education. Educational democracy views this purpose as education for all. Three key phrases in the big narrative of thought and awareness of independence for nationality and diversity by Hamzanwadi through NBDI. First the phrase of education goals is to educate. The opening of the 1945 Constitution emphasizes the responsibility of the state as a nation, namely, *'educating the life of the nation'*, *...the word "educating" in this context, in the tradition of Critical Hermeneutics means intellectual intelligence. With intellectual intelligence it is expected there is an awareness of the importance of independence as a nation, so that with that awareness, women have the same interests, dreams and goals like a man, namely the realization of Indonesia independent, as an Indonesian nation. Second the educational phrase is a basic human, male and female right (education for all). This phrase implies an integral part of the Preamble of the 1945 Constitution, "justice and civilized humanity", after that well known as the second principle of Pancasila. Education is intended to educate the children of the nation, including in the early steps of awareness of the importance of independence as a nation, then the acquisition of education has fulfilled the basic human rights aspect to become more civilized. Third the phrase*

fulfillment of the basic rights of education for men and women implies aspects of justice for all children of the nation (men and women). The full part of the Preamble of the 1945 Constitution mention, "social justice for all Indonesian people", then we know it as the fifth principle of *Pancasila*.

The Proclamation of Independence Era

Study products with historical approaches are called historical phenomena. Text NW, NWDI, NBDI by Hamzanwadi we called a movement, a struggle, as the movements and struggles of other peoples for the sake of independent Indonesia is not an absurdity as described in Sisyphus's mythical figure by Albert Camus in *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (Albert Camus, 1955, in Kuntowijoyo, 2003), or the thought of World War II which raise the vain. Hamzanwadi's thoughts and awareness along with his inner values-collectivity values proposition produced a brilliant result, with the proclaimed of Indonesian Independence. The Proclamation of Independence August 17, 1945 is the result of the collective work of all the nation's children in various parts of Indonesia. Good news about Indonesian Independence must be distribute to anyone who aspire it. The awareness of Hamzanwadi in the local context which produced the first results: Indonesian Independence, was a thought and historical awareness, as Gadamer (1972, in Kuntowijoyo, 2003), "Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein" or historical awareness, namely Hamzanwadi fulfilled historical responsibility through creating the future.

The Proclamation of Indonesian Independence coincided with the surrender of the Japanese army occupation forces to the allied forces. This text is important for the consolidation of news about de facto Indonesian independence. De facto Indonesian Independence news consolidation, Hamzanwadi initiated three agendas: first, consolidating the *santri* (islamic learners) and local fighters to stay alert, because this situation could lead to various transition conditions. Second, Hamzanwadi initiated to raising the *Merah Putih* Flag as a symbol of Indonesia. In reason of Critical Hermeneutics, this is the first time *Merah Putih* fluttered in Lombok from the beginning of Indonesian Independence. Third, Hamzanwadi initiated to seize the Japanese army's war weapons. The initiation of Hamzanwadi as a form of de facto consolidation of Indonesian Independence was a heroic act of the leader of the struggle on the battlefield, (notice to National War Movies PPNI production, such as "Janur Kuning", "Naga Bonar"), or War movies produced by Hollywood, such as "Pearl Harbor", "Saving Private Ryan", "Black Hawk Down", "Green Zone", and others) when they successfully crushed the enemy, it is usual to divide the troops into groups that guarded situation and conditions and send victory news to the Central command; the group that fly flags along certain territories; and groups that disarm enemy's weapons. On August 17, 1945, Indonesian Independence, in the Preamble of the 1945 Constitution concerning "Independence is the right of all nations ..." realized because of the struggle of the freedom movement fighters, including by Hamzanwadi.

Guerrilla and NICA Attack

The next step in the historical tradition is known as internal dialectics and continuity of thought as mentioned by Feith and Castle (eds, 1970, in Kuntowijoyo, 2008) in *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Indonesia's condition after independence was not recognized by the Dutch East Indies. Australia as one of the allied countries in World War II, which responsible for disarming the Japanese army, was instead boarded by NICA for the purpose of re-controlling Indonesia. If analogous to the historical narrative cycle: Colligation, plot, and structure, by W.H. Walsh (1967, in Kuntowijoyo, 2003) in his book: *Philosophy of History: An Introduction*, through Colligation, plots, and structure allows us to understand two things at once: first, that Hamzanwadi was directly involved in the heroic events of the NICA invasion June 7, 1946, including as the intellectual actor of the event. The ocations and times of the

event were especially the coordination and communication of the raids under the leadership of the People's Fighters (TGH Faesal) and Hamzanwadi equal the coordination and communication between Lieutenant Colonel Soeharto and Sri Sultan HB IX in the March 1, 1949 General Attack incident. The initiator of the attack was Sri Sultan HB IX and the commander of his forces were Lieutenant Colonel Suharto. In this context, who doubts the involvement of Sri Sultan HB IX in the event? Only history is not recorded as a historical text. Second, by Hamzanwadi, NWDI and NBDI *Madrasah* were placed as resistance bases, shielding from NICA attacks, and fighting against the struggle. As headquarters, all raid agendas were designed and organized in these two *madrasah*. As a shield, the position of these *Madrasah* is not so suspected because the agenda that seems invisible is the agenda of Islamic education. As a sacrifice, some students of two *Madrasah* were arrested, even Hamzanwadi's siblings, TGH Faisal were killed, and were buried not far from the NWDI and NBDI *Madrasah* area. The Lombok NTB society knows the funeral of TGH Faisal as the Rinjani Selong Heroes Cemetery.

Phase of Fills the independence of the Old Order Era (1947-1965)

Hamzanwadi represents the State (Member of the Honorary Hajj NIT Delegation)

Back to the step one of the historical steps according to Feith and Castle; internal dialectics and continuity of thought, independence is the first and foremost requirement for the process of ideology, politics, economy, socializing as a nation and parts of the world, cultured in diverse local contexts but into unity, and maintain internal and external security. Although Indonesia has been independent but it still looking for ideal form as a country. The current condition (1947) is still the nuance of the puppet states as a form of the state by the Dutch East Indies through *devide et impera* politics. Lombok Island as an island include Small Sunda group in 13 regions in Negara Indonesia Timur (NIT). One of the agendas to find the form of Indonesia as a state, local figures from the Eastern part of Indonesia, including Hamzanwadi agreed to dissolve the Eastern part of Indonesia (1949), and re-state the Unitary State of the Republic of Indonesia. The previous phase (before 1949) was used to declare the Republic of Indonesia to all corners of the world, including the Republic Indonesia recognition diplomacy mission carried out by Hamzanwadi as an honorary member of the NIT pilgimagre in 1947.

The key phrases in this section are the continuation of the mind and the realization of independence as internal dialects and the continuity of history to fill the Indonesian nation's agenda, namely to leave the state form of the Dutch East Indies and to support *de facto* diplomacy of Republic of Indonesia. The strategic national dimension contained in the Republic Indonesia's intent is several articles in the 1945 Constitution; Article 1 (1); Article 18 (1); Article 18 B (1); Article 18 B (2); Article 25A; and Article 37 (5), (MPRRI General Secretariat, 2016). Besides being explicit about the articles in the 1945 Constitution, the formula of these articles implies the incarnation of the third principle of Pancasila, "*Persatuan Indonesia*". "*Persatuan Indonesia*" in this sense is understood as the unity of various "diveristy" differences which character the elements of Indonesian-ness: differences in ethnicity, clan, religion, language, culture, and customs. In addition to the dimension of Indonesian Unity, this context is thick with the dimension of "Unity in diversity".

Gathering the Local Resources (Hamzanwadi as PUIL Syariah Council, Masyumi and NU Consulate)

Indonesia's struggle for independence, diplomacy, recognition and filling it with various development agendas need a place to gather local resources that has common dreams and goals after Indonesia's independence. PUIL, Masyumi, and the Constituent are a forum for movements to fill Indonesian independence for various agendas: political, ideological, religious, socio-economic, and cultural, which elements are derived from local movements.

The existence of these places as an instrument of the movement to fill Indonesian independence, an instrument of aspiration to fill Indonesian independence in Indonesian state system. Through the facts, the national dimension offered by Hamzanwadi as representation of NW, NWDI, NBDI and one of the leaders of the struggle for the movement of the region is "*Persatuan Indonesia*". As an instrument to fill Indonesia's independence, Hamzanwadi's agenda implies a dimension of "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*", considering that Indonesia is an archipelago state, which doesn't allow all people to present thoughts and ideas together in a decision-making process, so a representative system is needed. The representation of each region has various differences, but the difference is bound by one agenda, namely to fill independence. The strategic nationality dimension in this historical context is "BHINEKA TUNGGAL IKA" means "Unity in Diversity".

NW as a State-Nation Asset

On May 2016, at the encounter for the Proposal of National Heroes Title for Hamzanwadi, it refers to the historical narrative of Colligation, plot and structure, by W.H. Walsh (in Kuntowijoyo, 2003), the writer / researcher said, "discussing Nahdlatul Wathan, of course discussing Hamzanwadi as a central figure in the first phase, change and development, actually we are discussing Indonesian nationality". This statement is important because the ideals of NW are equal with the ideals of nationality, namely independence, defending, and filling it with the development agenda. Linearity occurs in the ideals and agenda between Indonesia as a nation and NW as an organization of national movements. The Documentative reference that strengthens this argument, NW, NWDI, and NBDI was born as a struggle organization for the Lombok NTB people for the nation, state, and religion that accommodates locality equal with the country's context within the Unitary Republic of Indonesia. The strategic dimension in this phase accommodates a variety of differences with one goal, namely to fill the independence of "BHINEKA TUNGGAL IKA", in the place of the Indonesian Unitary State, "*Persatuan Indonesia*". The process of unifying different minds requires a deliberative process through the organization NW, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Considering NW is a place to gather the agenda of the struggle to fill independence, it is appropriate if NW become an important asset of the Indonesian state and nation. NW was officially inaugurated a mass organization in 1953 based on legality provisions at the state level means that the state fulfills the responsibility of legalizing state assets for nationality concern.

Phase of Fills Independence of the New Order Era (1966-1998)

Hamzanwadi: Dialectics Ulama-Umara

Refers to the history series as narrative text according to Walsh, in colligation that builds the inner connection between religious knoweledge (Islam) that studied by Hamzanwadi in the Madrasah ash-Shaulatiyah which make him an ulama and social responsibility as a leader (umara). There is a relationship between two different competencies that reference each other in building the two personal capacities of Hamzanwadi. Inner connection between science at Madrasah ash-Shaulatiyah and conditions in Indonesia at the same time. This inner connection helps us to understand further the explanation of Azyyumardi Azra (1994) "The Middle East Ulama and Archipelago Ulama Network of the XVII-XVIII Century", its generation arrived at Hamzanwadi in Lombok. An important historical tool is the background of Middle Eastern ulama in that period and the condition of Indonesia which requires ulama to plunge into national agendas. That inner connection requires Hamzanwadi to take on the role of the Advisory Council of the Indonesian Ulama Council (MUI) in 1971-1982 period, as a member of the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia MPR Hamzanwadi's dual

responsibility as a ulama and umara. This dual role is not only for social symbols, but the substance of historical responsibility that surrounds it. Hamzanwadi's dual role is realizing the nation, state and religion through the catalytic functions of the community he represents in the context of national development. The *Yaklim* assemblies facilitated by Hamzanwadi became a forum for the submission of constitutional substance. Hamzanwadi conduct the content knowledge transmission about the hierarchical relations of several state legal documents as an inseparable part of the 1945 Constitution. Hamzanwadi's speech on a study forum in the 1970s was essentially "the responsibility of a leader with various requirements, electoral process, and rule of law that must be obeyed. The data of this study illustrates the hierarchical relationship between the 1945 Constitution as the basic law, the acts as derivatives, and Government Regulations as technical appointments. As an ulama, Kiprah Hamzanwadi is the transmission agent of Islamic Knowledge Content, while gait as umara is traced to the development agendas in the government era when Hamzanwadi assumed the dual role. The data of this study illustrates the hierarchical relationship between the 1945 Constitution as the basic law, the Acts as derivatives, and Government Regulations as technical appointments. As an ulama, Hamzanwadi gait is the transmission agent of Islamic Knowledge Content, while gait as umara is traced to the development agendas in the government era when Hamzanwadi assumed the dual role.

NW, NWDI, NBDI and Contextualization of the Dynamics of National History

History is text, context, and its relationship with society in a historical process. History is understood as a dynamic continuity of thought, awareness, and carry out the national agenda after Indonesian independence. To fulfill this, Hamzanwadi carried out structural and cultural dynamism. Structurally, NW is constructed following the contextual needs of development, according to the mission of education, social, Islamic *da'wah*, and economic development of the ummah (society). Work units under NW are formed to be responsible for the achievement of education missions through madrasah, training institutions and vocational courses. For the mission of *da'wah*, *da'wah* institutions and Islamic studies institutions were formed. For social missions, social institutions are formed charity. For economic missions, microfinance institutions and other economic service bureaus are formed. Culturally, Hamzanwadi initiated the adjustment of all mission, work, and work unions. Educational work units adapted to national education standards. The social work unit is adapted to the substance of the work of the social sector. The work unit in the field of economic development is adjusted to the substance of the economic development agenda.

If allowed to add attributes to Hamzanwadi, besides being a "*Madrasah* father" and "mosque figure" he deserves to be called the father of "modernization education", because he made fundamental changes and adjustments to form and system of education at the local level according to national needs. Hamzanwadi deserves to be a "pioneer of family welfare and children health", as the only one who plans family planning and immunization programs, and NW becomes one of the important partners in NTB. Hamzanwadi deserves to called the "Figure of Transmigration, Intensification-Extensification of Agriculture", because he encourages the distribution of welfare through transmigration and intensifies the pattern of agriculture with a *gogo-rancah* system. The structural and cultural adjustment agenda by Hamzanwadi to fulfill the 1945 Constitution, "educate the nation's life", be spiritually intelligent, academically intelligent, socially intelligent, economically intelligent and culturally intelligent. If all aspects of intelligence are fulfilled, then it becomes a nation that fulfills the "justice and civilized humanity" dimension in the frame of "social justice for all Indonesian people".

Phase of Independence Era of Reformation (1999-Present)

NW Answer History

History is understood as a dynamic continuity as a continuation of thought, awareness, and carrying out the national agenda after independence. Accommodate the thoughts above, Hamzanwadi is the founder of the next generation and as his successor. Realized or not, intentionally or not, Hamzanwadi's thoughts and actions are equal with Ernest Renan's concept (1823-1892, in Prisma, 13/02/03/2013), that "the nation is a life, a principle" that occurs from two things: people who used to encounter one history; and nowadays has a will to live together. As like Bung Karno followed Renan (in Prisma, 03/13/2013), the nation *is le desir d'être ensemble* (willing to be unite), one soul and has a sense of solidarity. As a historical layer, Hamzanwadi initiated the national movement along with the birth of NW / NWDI, filling and developing nationality in the next phase, followed by the current phase by the next generation of Hamzanwadi. The role of *ulama-umara* carried out by Hamzanwadi continues on the dual role of *Tuan Guru Bajang*, KH. Muhammad Zainul Majdi (called TGB) as the successor to this phase.

As an *ulama*, TGB takes a role of caretaker of the Hamzanwadi Education Foundation Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor Islamic Boarding School and da'wah safari as the transmission agent of Islamic Knowledge Content to all corners of the country and abroad. As *umara*, TGB took part in national politics as a Member of the Indonesian Parliament (2004-2008). The gait was expanded as a development executor to fill development as the Governor of NTB (2008-2013 and 2013-2018) and other strategic roles in this reform era. As members of the legislature, executive, and other strategic roles, TGB follow the "love for the region is love for the Nation" principle. The personal-individual vision must be transformed into a collective-institutional vision at the regional and state level. The realization of that love and vision according to TGB is transformed in the responsibility form of upholding the divine values and maximizing the resources given by God on the earth of Indonesia. This love-vision and responsibility is "to educate the nation's life", to reach at a sense of justice for all, as "social justice for all the people of Indonesia".

The NW Narrative History is the History of the Nation

NW history and national history as historical narratives have parallel sequences in terms of goals formed through colligations, plots, and structures. Through colligation, the value of Indonesian nationality is also evident in mind-awareness, and the national agenda by Hamzanwadi through NW. Both become one inner connection, namely independence and filling Indonesia's independence, which comes from the four dimensions of Indonesian nationality: *Pancasila*, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhineka Tunggal Ika*. Through the plot it has been understood, there is an attractive relationship between the historical events of Indonesian nationality and NW history as a text, then text from context, and context influences the community. These two different historical events with the same goal form a series of occasions that we understand as occasions of national history. Through the structure, every phase of the history of Indonesian nationality, as well as NW history, both bring up the national dimension: *Pancasila*, The 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *BHINEKA TUNGGAL IKA*. The difference in structure only appears in the structure form, but the value of the structure remains parallel and has an inner connection, namely Indonesian nationality.

NW Figures and State Recognition

This study is a historical study with Hermeneutics as an analysis tool, responsible for carry out the process of theoretical evidence, namely finding facts and relation of facts with other facts in the historical process. Not only it strengthen the position of the theory but makes

the dialectical theory guide the study process. Evidence of theory and facts in this study, doesn't rule out the possibility of dealing with strategic figures in historical processes and events. Based on the help of Hermeneutics, this review process views and understands Hamzanwadi from outside himself subjectively by looking at the causal relationship between himself and the history he passed (Dilthey, in Poespoprodjo, 2004). Hamzanwadi, his thoughts, actions, and meanings and the consequences of his thoughts and actions had a major contribution to the formation of an independent Indonesia and a national Indonesia. Hamzanwadi, as he finished; birth the thoughts, made awareness, scheduled his thoughts in real action, Indonesia was independent, and became a free nation. Nowadays and the future generation need role models to fill the challenges of the future. In 2017, the government of the Republic of Indonesia awarded Hamzanwadi a National Hero Title as Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, National Hero.

Nationality Value in NW History as Knowledge Content and Historical Responsibility

History and aspects are a collection of knowledge and values inherited through the educational process. The ultimate goal of inheritance is the formation of a generation that aware of the history of its people, has an appreciation of the creators of history as a historical nation. Hamzanwadi's first step is transfer of knowledge and education, formal and informal, cultural and structural. Through transfers, generations have the ability to identify (identification) the lofty ideals of the nation's history. Identify the manufacturing process, generation has an attitude; accept or reject, follow or resist, and develop or break up. With attitude, style becomes a person who has an inner history with themselves, and responsible (recognition) of the history of the nation.

After knowledge content, history is understood through the process of historical dialectics. Historical dialectics is the knowledge and value of NW nationality as references, sources of thought, and references to national actions. As values, thoughts, and references to national actions, NW nationalities have relations and influence. Hamzanwadi and NW are between the previous influences (education and the historical contexts), and after the influence (real action and thought). Education, regional conditions and the nation made Hamzanwadi aware that Indonesia must be freedom become a nation, and prosper the nation. That realization is realized by establishing NW and acting through the NW. Next time, the form of ideas and actions is able to arouse other circles around him, the same awareness and struggle together. In the beginning of era, all national context of historical agendas were carried out collectively with the community and their students. The nationality value offered by Hamzanwadi through NW is able to influence the personality and the collective in fighting for and filling in independence. The emergence of the influence of the mind and national agenda is not a one-time thing but need a hard struggle without limits. The assembly of recitation by Hamzanwadi as an ulama in the context of the transmission of Islamic knowledge content is a process for dissemination or the dissemination of thoughts and national agenda naturally. Every start of the assembly is always reminded of inner values: sure, sincere, and istiqamah, and collectivity values: cohesive, complete, united. Includes conveying the message of development for the welfare of the nation, so that the recitation is accompanied by information about health, household harmony, population, agriculture, obedience to the law, other aspects of nation and state. Hamzanwadi also strengthen the idea and agenda of nationality in a structured (socialization) through educational institutions labeled NW. Like, other groups who responsible for continuing the national movement struggle relay, such as: Muslimat NW, NW Students, NW Youth, NW Scholars, NW Task Force, and Majelis Ta'lim NW as symbols, substance and spirit of struggle Indonesian independence and nationality through NW. Historical dialectics NW as a historical responsibility in the history of nationality follows the steps of influencing, implementing, disseminated, and structured.

Conclusion

Nationality in the history of NW is a national treasure reflected in the *Pancasila*, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhineka Tunggal Ika*. The phase of seizing and defending independence along with the birth of NW with inner values and collectivity values dominated by the national dimension of the 1945 Constitution, "That independence is the right of all nations, therefore ..." The phase filled the early independence of the Old Order dominated by the Pancasila national dimension, NKRI, and *Bhineka Tunggal Ika*. The phase of filling the independence of the new order was dominated by the second dimension of nationalism and the fifth principle of Pancasila. The phase fills the independence of the Reformation Era dominated by the national dimension, re-strengthening the national values of the Unitary Republic of Indonesia, Pancasila, and *Bhineka Tunggal Ika*.

Indonesian nationality has a historical time parallelism with NW history, given the nationalist movement since the 1900s, begin with the struggle to win and defend independence along with the birth of NW. Subsequent phases, NW became a strategic part of filling independence in the frame of Indonesian nationality. The history of Indonesian nationality in NW history is a collection of knowledge and values inherited in the next generations. History records that the inheritance by Hamzanwadi was carried out through the steps of transfer, identification and admission. Knowledge and historical value of Indonesian nationality in NW dialectic history through the stages of influence, implementation, dissemination, and socialization.

References

- Azra, Azzyumardi. *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad xvii dan xviii: melacak akar-akar pembaruan pemikiran islam di indonesia*. Bandung. Mizan, (1994)
- Dillon, H.S. dan Idham S Bey. *Soekarno dan bangsa* (Prisma, 13/2/3/2013). Jakarta. LP3ES, 2013.
- Harian Sejarah. Film Perjuangan "Janur Kuning".
<https://www.hariansejarah.id/2017/02/sutradara-alam-sura-widjaya-tanggal.html?m=1>
- Idntimes. Film-Film Perang produksi Hollywood,
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/sukma-satiti/film-perang-terbaik-yang-diangkat-dari-kisah-nyata-c1c2>
- Jordan, S.. When Nationalism Rears its Ugly Head A Review of Architecture as Peacework by Rudolf Steiner. *Lilipoh Spring* (Society and Community), 2017.
- Kuntowijoyo. *Metodologi sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana, 2003.
- _____. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana, 2008.
- Lewis, Bernard. *Sejarah: diingat, ditemukan kembali, ditemu-ciptakan* (terjemahan oleh Bambang A. Widiyanto dari judul asli: History: Remembered, Recovered, Invented). Yogyakarta. Ombak, 2009.
- Muladi. *Wawasan kebangsaan. konsep, nilai, dan makna*. Jakarta. Lemhanas, 2006.
- Myers, J. Saluting the flag is not enough. *Educational leadership*, 40(6), 37-37, 1983.
- Nahdi, Khirjan. *Pendidikan Karakter dan Sejarah Bangsa: Dialektika Sejarah yang Terabaikan* (Proceeding Seminar Internaional Pendidikan Fundamental dan Pendidikan Karakter). Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Pei, M. The paradoxes of American nationalism. *Foreign Policy*, 31-37, 2003.
- Poespoprodjo, W. *Hermeneutika*. Bandung. Pustaka Setia, 2004.

- Ricklefs, M.C. *Sejarah indonesia modern* (terjemahan dari buku asli: A history of modern indonesia, oleh Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 1998.
- Salim, Agus. *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana, 2002.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta, 2016.
- Suhandjati, Sri. *Ajaran tatakramayasadipuroII: perpaduan syariat islam dengan budaya jawa*. Yogyakarta. UIN SUKA, (2003).
- Suryo, Djoko. "Pengantar Buku Penjelasan Sejarah Kuntowijoyo", *Penjelasan sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta. Tiara Wacana, 2008.
- Smith, A. D. Cosmopolitanism and Nationalism. *The Hedgehog Review, Fall*, 66-75, 2009.
- Wang, Z. National humiliation, history education, and the politics of historical memory: Patriotic education campaign in China. *International Studies Quarterly*, 52(4), 783-806, 2008.
- Wikipedia. Film Komedi Perjuangan "Naga Bonar". https://id.m.wikipedia.Org/wiki/Naga_Bonar.

4th HICE



Certificate

NO: 44/UH.Pan.HICE/LL/2018
This certificate is awarded to

Khirjan Nahdi

as a

Presenter

THE 4th HAMZANWADI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 2018
**"Elevating Human Resources through Education,
Language, and Culture"**

Lombok, 3rd - 4th November 2018



Rector of
Hamzanwadi University

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.